

**IMPLEMENTASI PROGRAM BANTUAN PANGAN NON
TUNAI DI DESA MOUTONG TENGAH KECAMATAN
MOUTONG KABUPATEN PARIGI MOUTONG**

OLEH
NIA RAMADHANI
B 101 21 148

SKRIPSI

Dalam rangka penulisan Skripsi
untuk memperoleh gelar Sarjana
Administrasi Publik pada Fakultas Ilmu
Sosial dan Ilmu Politik Universitas
Tadulako



**PROGRAM STUDI ADMINISTRASI PUBLIK
JURUSAN ILMU ADMINISTRASI**
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
UNIVERSITAS TADULAKO
2025

**IMPLEMENTATION OF NON CASH FOOD ASSISTANCE
PROGRAM IN CENTRAL MOUTONG VILLAGE MOUTONG
DISTRICT PARIGI MOUTONG REGENCY**

By

**NIA RAMADHANI
B 101 21 148**

THESIS

**In order to write a thesis
to obtain a bachelor's degree in Public Administration
at the Faculty of Social and Political Sciences
Tadulako University**



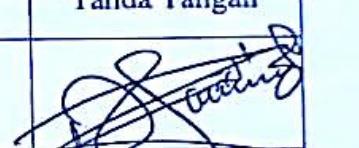
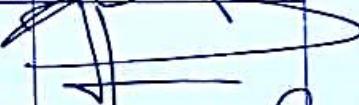
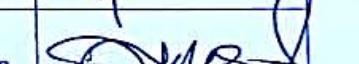
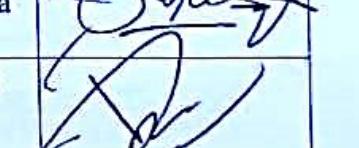
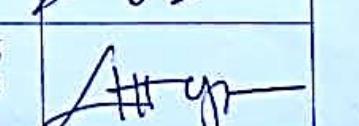
**PUBLIC ADMINISTRATION STUDY PROGRAM
DEPARTMENT OF ADMINISTRATIVE
FACULTY OF SOCIAL AND POLITICAL SCIENCES
TADULAKO UNIVERSITY
2025**

HALAMAN PERSETUJUAN

Diterima dan disetujui oleh panitia Sarjana Strata Satu (S1) pada Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Tadulako untuk memenuhi sebagai syarat-syarat guna memperoleh gelar sarjana.

Nama : Nia Ramadhani
Stambuk : B 101 21 148
Fakultas : Ilmu Sosial dan Ilmu Politik
Program Studi : S1 Administrasi Publik
Pada hari/tanggal : Rabu, 08 Oktober 2025
Jam : 10.00 WITA

Judul Skripsi : " Implementasi Program Bantuan Pangan Non Tunai Di Desa Moutong Tengah Kecamatan Moutong Kabupaten Parigi Moutong"

No.	Nama Pengaji	Jabatan	Tanda Tangan
1.	Dr. Nuraisyah, S.Sos., M.Si NIP. 197012242001122001	Ketua	
2.	Moh. Royfandi, S.Sos., M.Si NIP. 199308172025211071	Sekretaris	
3.	Dr. H. Nasrullah, S.Sos., M.Si NIP. 196908062002121001	Pengaji Utama	
4.	Drs. Rizali Djaelangkara, M.Si NIP. 196509111992031002	Pembimbing Utama	
5.	Askar Mayusa, S.I.P., M.A.P NIP. 198902102023211012	Pembimbing Pendamping	



NIP. 197504172006041002

HALAMAN PENGESAHAN

IMPLEMENTASI PROGRAM BANTUAN PANGAN NON TUNAI DI DESA MOUTONG TENGAH KECAMATAN MOUTONG KABUPATEN PARIGI MOUTONG

OLEH

NIA RAMADHANI
B 101 21 148

SKRIPSI

Dalam rangka penulisan Skripsi
untuk memperoleh gelar Sarjana
Administrasi Publik Pada Fakultas Ilmu Sosial
dan Ilmu Politik Universitas
Tadulako

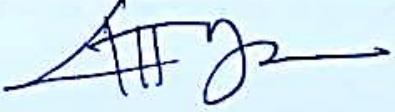
Palu 2025

Pembimbing 1



Drs. Rizali Djaelangkara, M.Si.
NIP. 196509111992031002

Pembimbing 2



Askar Mayusa, S.I.P., M.A.P.
NIP. 198902102023211012

Mengetahui:

Koordinator Prodi Administrasi Publik



PERNYATAAN

Dengan ini saya menyatakan bahwa :

1. Skripsi ini adalah hasil dan belum pernah diteliti sebelumnya untuk mendapatkan gelar akademik (sarjana) baik di Universitas Tadulako maupun di perguruan tinggi lainnya.
2. Skripsi ini adalah murni gagasan dan rumusan dari saya sendiri, tanpa bantuan pihak lain, kecuali dari arahan dari tim pembimbing dan masukan dari tim penguji.
3. Dalam skripsi ini tidak terdapat karya atau pendapat yang telah di tulis atau dipublikasikan oleh orang lain, kecuali yang telah dicantumkan sebagai acuan dalam naskah dan disebut dalam daftar pustaka.
4. Pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya apabila dikemudian hari terdapat penyimpangan dan ketidak benaran dalam pernyataan ini, maka saya bersedia menerima sanksi akademik berupa pencabutan gelar yang telah diperoleh karena karya ini, serta sanksi lainnya sesuai dengan norma yang berlaku di perguruan tinggi ini.

Palu, 9 Agustus 2025



Nia Ramadhani
B 101 21 148

ABSTRAK

Nia Ramadhani, B 101 21 148, "Implementasi Program Bantuan Pangan Non Tunai Di Desa Moutong Tengah Kecamatan Moutong Kabupaten Parigi Moutong". Dibimbing oleh Rizali Djaelangkara selaku pembimbing I dan Askar Mayusa selaku pembimbing II.

Penelitian ini bertujuan untuk mengatahui Implementasi Program Bantuan Pangan Non Tunai Di Desa Moutong Tengah Kecamatan Moutong Kabupaten Parigi Moutong. Metode penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif. Penelitian ini menggunakan teknik pengumpulan data dengan cara observasi, wawancara, dan dokumentasi. Teori yang digunakan yaitu *George C. Edward III*, terdapat 4 (empat) indikator yakni Komunikasi, Sumber Daya, Disposisi dan Struktur Birokrasi. Hasil penelitian menunjukan bahwa Implementasi Program Bantuan Pangan Non Tunai Di Desa Moutong Tengah Kecamatan Moutong Kabupaten Parigi Moutong. Jika di lihat dari Indikator Komunikasi menunjukan bahwa masih banyak masyarakat yang belum mengetahui Program Bantuan Pangan Non Tunai, hal ini disebabkan karena penyampaian informasi dan sosialisasi yang belum menyeluruh. Indikator Sumber Daya menunjukan masih kurangnya sumber daya manusia terhadap Program Bantuan Pangan Non Tunai tersebut karena Desa Moutong Tengah belum memiliki penanggung jawab Program Bantuan Pangan Non Tunai dan hanya diberikan tanggung jawab kepada operator Desa. Indikator Disposisi atau sikap pelaksana menunjukan sikap dan tanggung jawab yang belum cukup baik dalam menjalankan amanah dari pemerintah karena belum sesuai dengan tugas pokok yang diberikan. Indikator Struktur Birokrasi menunjukan bahwa Desa Moutong Tengah belum ada keterpaduan yang baik antara aparatur Desa dalam pelaksanaan tugas akibat kurangnya koordinasi.

Kata Kunci :Implementasi Program, Bantuan Pangan Non Tunai.

ABSTRACT

Nia Ramadhani, B 101 21 148, "Implementation of Non-Cash Food Assistance Program in Moutong Tengah Village, Moutong District, Parigi Moutong Regency". Supervised by Rizali Djaelangkara as Supervisor I and Askar Mayusa as Supervisor II.

This study aims to determine the Implementation of the Non-Cash Food Assistance Program in Moutong Tengah Village, Moutong District, Parigi Moutong Regency. This research method uses a descriptive qualitative approach. This study uses data collection techniques by means of observation, interviews, and documentation. The theory used is George C. Edward III, there are 4 (four) indicators namely Communication, Resources, Disposition and Bureaucratic Structure. The results of the study show that the Implementation of the Non-Cash Food Assistance Program in Moutong Tengah Village, Moutong District, Parigi Moutong Regency, When viewed from the Communication Indicator shows that there are still many people who do not know the Non-Cash Food Assistance Program, this is due to the delivery of information and socialization that is not yet comprehensive. The Resource Indicator shows the lack of human resources for the Non-Cash Food Assistance Program because Moutong Tengah Village does not have a person in charge of the Non-Cash Food Assistance Program and is only given responsibility to the Village operator. The Disposition Indicator or the attitude of the implementer shows that the attitude and responsibility are still not good from the implementer because they are not in accordance with their main duties and functions. Bureaucratic Structure Indicators indicate that Moutong Tengah Village lacks integration among employees and officials in carrying out their duties due to a lack of coordination.

Keywords: Program Implementation, Non-Cash Food Assistance.

KATA PENGANTAR

Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Puji syukur penulis panjatkan kehadirat Allah SWT, karena atas izinnya sehingga Skripsi dengan judul “Implementasi Program Bantuan Pangan Non Tunai Di Desa Moutong Tengah Kecamatan Moutong Kabupaten Parigi Moutong” dapat diselesaikan untuk memenuhi syarat ujian untuk memperoleh gelar Sarjana Strata Satu (S1) dalam Program Studi Administrasi Publik.

Dalam proses penyusunan skripsi ini peneliti banyak mengalami berbagai hambatan dan tantangan, tetapi dengan segala doa dan usaha, serta berbagai bantuan dari berbagai pihak yang tertentunya selalu memberikan motivasi kepada penulis. Sehingga skripsi ini dapat terselesaikan. Penulis menyadari skripsi ini tidak mungkin terselesaikan tanpa adanya dukungan, bantuan bimbingan, dan nasehat dari berbagai pihak selama penyusunan skripsi ini.

Pada kesempatan ini penulis menyampaikan ucapan terima kasih kepada kedua orang tua tersayang *support* sistem terbaik, panutanku Bapak Iswan Karel terima kasih telah berjuang dalam mengupayakan yang terbaik untuk kehidupan penulis, berkorban keringat, tenaga dan fikiran, beliau memang tidak sempat merasakan Pendidikan sampai dibangku perkuliahan, namun beliau mampu mendidik penulis, memberikan motivasi dan dukungan hingga penulis mampu menyelesaikan studinya sampai sarjana. Dan belahan jiwa Ibunda Rostan Manoppo, yang selalu

menjadi pelindung dalam setiap langkah hidup penulis terima kasih atas segala doa, dan dekapan hangat yang diberikan untuk penulis. Terima Kasih juga kepada saudari tercinta saya Nuzma Karel, Nova Karel, Noviyanti Karel Amd. Keb dan kaka ipar Ilham, Nanang Hamzah, Febriyanto Abas serta ponakan Cici, Ifti, Abdul, alif, Afif, Afiyah, Fadlan. Terima Kasih telah memberikan doa dan dukungan yang membuat penulis termotivasi.

Penulis juga mengucapkan terima kasih dan rasa hormat yang sebesar-besarnya atas bantuan selama penulis menyelesaikan skripsi ini. Ucapan terima kasih dan penghargaan ini penulis sampaikan kepada:

1. Bapak Prof. Dr. Ir. Amar S.T., M.T., IPU., ASEAN Eng selaku Rektor Universitas Tadulako yang telah memberikan kesempatan kepada penulis untuk menimba ilmu pengetahuan di Universitas Tadulako.
2. Bapak Dr. Muh. Nawawi, M.Si selaku Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Tadulako.
3. Bapak Dr. Mohammad Irfan Mufti, M.Si selaku Wakil Dekan Bidang Akademik. Bapak Dr. M. Nur Alamsyah, S.I.P., M.Si selaku Wakil Dekan Bidang Keuangan dan Umum. Ibu Dr. Rismawati, S.Sos., MA selaku Wakil Dekan Bidang Kemahasiswaan dan Alumni.
4. Ibu Dr. Hj. Suasa, M.Si selaku Ketua Jurusan Ilmu Administrasi Publik Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Tadulako.
5. Ibu Dr. Intam Kurnia, M.Si selaku Ketua Program Studi Administrasi Publik

Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Tadulako.

6. Dr. H. Nasrullah, S.Sos., M.Si selaku Dosen Wali atas bantuan serta kritik dan saran kepada penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.
7. Bapak Drs. Rizali Djaelangkara, M.Si selaku Dosen Pembimbing I yang telah memberikan bimbingan dan arahan selama penyusunan skripsi
8. Bapak Askar Mayusa, S.I.P., M.A.P selaku Dosen Pembimbing II yang telah memberikan bimbingan dan arahan selama penyusunan skripsi.
9. Ibu Dr. Nuraisyah, S.Sos., M.Si selaku Ketua Penguji yang telah memberikan kritik dan saran yang baik serta arahan yang sangat bermanfaat dalam proses penyelesaian skripsi ini.
10. Bapak Dr. H. Nasrullah, S.Sos., M.Si selaku Penguji Utama yang telah memberikan kritik dan saran yang baik serta arahan yang sangat bermanfaat dalam proses penyelesaian skripsi ini.
11. Bapak Moh. Royfandi, S.Sos., M.A.P selaku Sekretaris penguji yang telah memberikan kritik dan saran yang baik serta arahan yang sangat bermanfaat dalam proses penyelesaian skripsi ini.
12. Terima Kasih kepada Seluruh Staf Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik yang telah melayani urusan administrasi dan bantuan lainnya. Dan seluruh Dosen Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Tadulako yang telah memberikan Ilmu serta nasihat selama peneliti menempuh pendidikan.
13. Terima Kasih kepada seluruh informan Peneliti di Desa Moutong Tengah Bapak Moh. Ridwan Haka selaku Kepala Desa Moutong Tengah. Bapak Risal S.Pd

selaku Sekretaris Desa Moutong Tengah. Bapak Sulman selaku Operator Desa Moutong Tengah. Ibu Astin Dama selaku Masyarakat Penerima Bantuan dan Ibu Rustin Musa selaku Masyarakat Penerima Bantuan.

14. Terima Kasih kepada Rekan Mahasiswa Kelas C Program Studi Administrasi Publik, angkatan 2021 yang telah menjadi teman seperjuangan dalam menempuh pendidikan.
15. Terima Kasih kepada teman-teman KKN 109 Desa Sibayu, Natasya Salsabila S.IP, Tresia Natalia Wula S.IP, Dita Maharani, Hendra Wijaya S.IP.
16. Terima Kasih kepada Ramadhan A.R Malasugi S.E Terima kasih sudah banyak membantu selama penulisan Skripsi.
17. Terima Kasih kepada Sahabat saya Dita Maharani sudah banyak membantu dan mendengarkan segala keluh kesah selama ini dari bangku SMP sampai sekarang ini.
18. Terima Kasih kepada teman kost saya Nurhamidah sudah bersama saya dari dari semester 1 sampai sekarang, sudah banyak membantu mendengarkan keluh kesah saya selama diperantauan ini.
19. Terima Kasih kepada teman-teman saya Oktavia Amir, Asniati, Sukma Ayu, dan Imas Andima yang selalu mendukung dan membantu satu sama lain dalam menyelesaikan Skripsi.
20. Terima Kasih juga kapada seluruh Keluarga, Sahabat dan Teman yang mungkin dalam hal ini belum bisa di sebutkan satu persatu, di mana pun kalian berada semoga kalian semua selalu dimudahkan segala urusan.

Palu, 13 Agustus 2025

Nia Ramadhani

B 101 21 148

DAFTAR ISI	
SAMPUL LUAR	
SAMPUL DALAM	ii
HALAMAN PENGESAHAN	iii
PERNYATAN	iv
ABSTRAK	v
<i>ABSTRAK</i>	vi
KATA PENGANTAR	vii
DAFTAR ISI	xi
DAFTAR TABEL	xiii
DAFTAR GAMBAR	xiv
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Rumusan Masalah	8
1.2.1 Tujuan dan Kegunaan Penelitian	8
1.2.2 Tujuan Penelitian	9
1.2.3 Kegunaan Penelitian	8
BAB II KAJIAN PUSTAKA DAN ALUR PIKIR	10
2.1 Kajian Pustaka	10
2.1.1 Penelitian Terdahulu	10

2.1.2 Landasan Teoritis dan Kepustakaan yang Relevan	14
2.1.2.1 Konsep Administrasi Pablik	14
2.1.2.2 Konsep Kebijakan Pablik	20
2.1.2.3 Konsep Implementasi Kebijakan Pablik	23
2.1.2.4 Program BPNT Di Desa Moutong Tengah	34
2.2 Alur Pikir	35
BAB III METODE PENELITIAN	38
3.1. Dasar dan Tipe Penelitian	38
3.1.1 Dasar Penelitian	38
3.1.2 Tipe Penelitian	38
3.2 Definisi Konsep	39
3.2.1 Komunikasi	39
3.2.2 Sumber Daya	40
3.2.3 Disposisi	40
3.2.4 Struktur Birokrasi	40
3.3 Jenis Data	41
3.4 Sumber Data Dan Teknik Pengumpulan Data	41
3.5 Instrumen Penelitian	45
3.6 Analisis Data	46
3.7 Penentuan Lokasi Penelitian	48
3.8 Waktu Dan Jadwal Penelitian	48
BAB IV DESKRIPSI WILAYAH LOKASI PENELITIAN	49

4.1 Gambaran Umum Desa Moutong Tengah	49
4.2 Keadaan Sosial Budaya Desa	53
4.3 Kondisi Ekonomi Desa	54
4.4 Struktur Organisasi Desa Moutong Tengah	55
BAB V HASIL DAN PEMBAHASAN	63
5.1 Hasil Penelitian	63
5.1.1 Komunikasi	64
5.1.2 Sumber Daya	69
5.1.3 Disposisi	73
5.1.4 Struktur Birikrasi	76
5.2 Pembahasan Penelitian	80
BAB VI KESIMPULAN DAN SARAN	89
6.1 Kesimpulan	89
6.2 Saran	90
DAFTAR PUSTAKA	
LAMPIRAN	

DAFTAR TABEL

2.1 Tabel Penelitian Terdahulu	12
4.1 Daftar Nama-Nama Kepala Desa Moutong Tengah	50
4.2 Jumlah Penduduk Setiap Dusun	51
4.3 Luas Area Pembangunan Lahan Desa Moutong Tengah	51
4.4 Komposisi Penduduk Desa Moutong Tengah Umur 15 Tahun Keatas	53
4.5 Komposisi Penduduk Desa Moutong Tengah Etnis	53

DAFTAR GAMBAR

2.1 Gambar Model Implementasi Kebijakan George C. Edward III	27
2.2 Gambar Alur Pikir	37
3.2 Gambar Model Miles Huberman dan Saldana	47
4.1 Struktur Pemerintah Desa Moutong Tengah	57

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Salah satu yang merupakan tujuan bangsa Indonesia adalah demi memajukan tingkat kesejahteraan umum seperti yang tercantum pada alinea ke 4 UUD 1945. Alat ukur tingkat kesejahteraan umum masyarakat dengan melihat angka kemiskinan yang ada, kondisi kemiskinan tersebut merupakan cerminan dari tingkat kesejahteraan penduduk yang tinggal pada negara/daerah. Krisis ekonomi yang berkepanjangan telah membuat bangsa Indonesia kembali menjadi bangsa yang miskin, bahkan bersifat total dan multidimensi. Kemiskinan yang terjadi di negeri ini tidak lagi bersifat tunggal namun berkaitan dengan seluruh aspek yang ada, di antaranya aspek sosial, hukum, budaya, maupun aspek agama yang kesemuanya melanda seluruh aspek kehidupan masyarakat.

Kemiskinan adalah salah satu masalah yang masih dihadapi oleh Indonesia. Untuk alasan ini, kemiskinan harus menjadi prioritas utama pembangunan karena merupakan masalah yang kompleks dan memiliki banyak aspek. Untuk mengakhiri kemiskinan, pemerintah Indonesia telah meluncurkan berbagai program berupa bantuan secara langsung maupun secara tidak langsung seperti Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT). Banyak penyebab yang melatarbelakangi kemiskinan, dapat ditinjau dari faktor internal dan faktor eksternal. Faktor internal yaitu keadaan individu itu sendiri, keluarga, ataupun kelompok masyarakat yang dianggap rendah baik dari segi pendidikan dan pendapatan ekonominya. Sedangkan dari faktor eksternal yaitu kondisi sosial, politik, dan ekonomi.

Program Bantuan Pangan Non tunai (BPNT) merupakan program transformasi program rastra untuk memastikan program menjadi lebih tepat sasaran, tepat jumlah, tepat waktu, tepat harga, tepat kualitas, dan tepat administrasi. Program Bantuan Pangan Non Tunai ini telah dilaksanakan secara bertahap mulai tahun 2017, dilaksanakan di wilayah yang memiliki keterbatasan dari sisi infrastruktur non tunai, sinyal telekomunikasi dan akses geografis, sehingga transformasi Bantuan Pangan Non Tunai ini diharapkan dapat tuntas di seluruh kabupaten/kota. Program Bantuan Pangan Non Tunai tersebut telah terintegrasikan dengan program bantuan sosial lainnya melalui sistem perbankan. Adapun tujuan Program Bantuan Pangan secara non tunai ini adalah untuk meningkatkan ketepatan kelompok sasaran; memberikan gizi yang lebih seimbang dan lebih banyak pilihan dan kendali kepada rakyat miskin, mendorong usaha eceran rakyat, memberikan akses jasa keuangan pada rakyat miskin, dan mengefektifkan anggaran, serta berdampak bagi peningkatan kesejahteraan dan kemampuan ekonomi penerima manfaat.

Berdasarkan Undang-Undang No. 13 Tahun 2011 tentang penanganan Fakir Miskin pada Bab II Pasal (3) “Fakir Miskin berhak memperoleh kecukupan pangan, sandang dan perumahan, memperoleh perlindungan sosial dan pelayanan Kesehatan”. Ada dua pendekatan yang harus digunakan dalam upaya mengakhiri kemiskinan. Pertama, melindungi keluarga dan kelompok masyarakat miskin dengan memenuhi kebutuhan mereka dalam berbagai hal. Kedua, memberikan pelatihan kepada masyarakat agar mereka dapat mencegah kemiskinan baru muncul.

Untuk mewujudkan cita-cita bangsa, yaitu membangun masyarakat yang Adil dan Makmur, maka pengentasan kemiskinan harus dilakukan. Untuk menyelesaikan masalah ini, kita harus menggunakan kebijaksanaan yang tepat dengan mengidentifikasi kelompok masyarakat yang berada dibawah garis marjinal dan kemudian mengidentifikasi ciri-ciri mereka. Suatu kondisi biasanya disebut miskin jika ia tidak dapat memenuhi kebutuhan dasar manusia. Sehingga tujuan pemerintah mengeluarkan regulasi berupa program bantuan yaitu untuk memberikan sikap adil bagi masyarakat dari sisi kesejahteraan dan memberikan rasa aman untuk masyarakat yang mendapatkan bantuan.

Pemerintah pada saat ini sudah banyak mengeluarkan program-program yang bertujuan untuk meningkatkan kesehatan, pendidikan, ekonomi, dan yang paling utama pemenuhan kebutuhan pangan yang dapat mengurangi beban masyarakat dalam pemenuhan kebutuhan hidup. Berdasarkan Undang-Undang No. 18 Tahun 2012 tentang Pangan pada Bab II Pasal (3) “Penyelenggaraan Pangan dilakukan untuk memenuhi kebutuhan dasar manusia yang memberikan manfaat secara adil, merata, dan berkelanjutan berdasarkan Kedaulatan Pangan, Kemandirian Pangan, dan Ketahanan Pangan”.

Salah satu upaya pemerintah terkait dengan penanggulangan kemiskinan bagi masyarakat yang berpenghasilan rendah adalah dengan melaksanakan program subsidi pangan dalam hal ini berupa beras. Yang bertujuan untuk mengurangi beban pengeluaran masyarakat yang berpendapatan rendah dalam pemenuhan hak dasar berupa kebutuhan pokok dan dikenal dengan Program Beras untuk Keluarga Miskin (Raskin) pada tahun 2002. Raskin adalah inisiatif pemerintah yang

memberikan bantuan beras bersubsidi kepada masyarakat berpenghasilan rendah. Nama Raskin diubah menjadi Beras Sejahtera (Rastra) pada tahun 2015. Rastra merupakan program yang sama dengan Raskin yang membedakannya hanya sebutan untuk program tersebut. Perubahan istilah nama bertujuan untuk merubah paradigma masyarakat, yang sebelumnya program subsidi beras untuk membantu masyarakat miskin, menjadi lebih sejahtera. Sehingga pemerintah telah mengganti istilah Raskin menjadi Rastra saat ini adalah fokus pada peningkatan kualitas, tepat jumlah, tepat waktu, dan tepat sasaran. Perbaikan itu dilakukan karena selama ini pemerintah banyak menerima kritikan soal kualitas Raskin atau Rastra yang cenderung buruk. Dalam perkembangannya pada tahun 2017 ditransformasikan menjadi Program Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) di 44 Kota terpilih. Program Bantuan Pangan Non Tunai merupakan upaya pemerintah untuk mentransformasikan bentuk bantuan menjadi non tunai (*Cashless*). Perbedaan antara program Raskin Atau Rastra terdahulu dengan Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) adalah pada jenis bantuananya, dimana dahulu bantuan hanya berupa beras dengan kualitas tertentu saja, sedangkan pada Bantuan Pangan Non Tunai berupa sejumlah dana bantuan non tunai yang tersimpan pada kartu elektronik perbankan untuk nantinya dapat dibelanjakan bahan pangan.

Program Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) ini diselenggarakan oleh pemerintah dalam rangka untuk meningkatkan efektivitas dan efisiensi ketepatan sasaran penyaluran bantuan sosial serta mendorong keuangan inklusif. Program ini diselenggarakan sesuai dengan Peraturan Menteri Sosial Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2023 Tentang Pelaksanaan Program Sembako. Yang bertujuan

untuk meningkatkan efisiensi, efektifitas, dan transparansi dalam penyaluran bantuan sosial, serta memastikan bahwa bantuan sosial dapat disalurkan dengan tepat dan efektif kepada penerima bantuan sosial.

Nilai Bantuan Pangan Non Tunai pada tahun 2025 ini adalah senilai Rp200.000/KPM per bulan kepada penerima program Bantuan Pangan Non Tunai melalui Kartu Keluarga Sejahtera (KKS). KKS berperan sebagai alat distribusi yang memungkinkan penerima untuk membeli kebutuhan pokok seperti beras dan telur sesuai dengan kebutuhan mereka di E-Warung. Kelompok sasaran penerima bantuan adalah keluarga yang biasa disebut Keluarga Penerima Manfaat (KPM). Untuk masyarakat dengan kondisi ekonomi 25% terendah didaerahnya. Syarat-syarat yang harus dilengkapi atau dipenuhi untuk mendapatkan Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) yaitu, terdaftar dalam Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS), keluarga miskin atau rentan miskin, memiliki kartu keluarga sejahtera (KKS), ibu hamil lansia (diatas 60 tahun) dan penyandang disabilitas, tidak sedang menerima bantuan lain. Namun pada tahun 2025 Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) telah di ganti dengan Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional (DTSEN). Perubahan ini diatur dalam Intruksi Presiden No. 4 Tahun 2025 yang ditandatangani pada 5 Februari 2025 yang bertujuan untuk meningkatkan akurasi dan efisiensi dalam penyaluran bantuan sosial serta memberikan gambaran yang lebih komprehensif tentang kondisi sosial ekonomi masyarakat.

Kabupaten Parigi Moutong Merupakan salah satu kebutuhan yang ikut dalam mengeluarkan kebijakan tentang Program Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT). Banyaknya penerima manfaat Bantuan Pangan Non Tunai di Desa

Moutong Tengah Kecamatan Moutong Kabupaten Parigi Moutong yang tidak sesuai dengan keadaan ekonomi yang dapat dikategorikan sebagai orang marginal malah menerima bantuan dan bantuan yang diterima tidak sesuai dengan kebutuhan masyarakat sebagaimana mestinya. Dengan adanya regulasi pemerintah berupa Program Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) ini merupakan regulasi yang dapat meringankan beban masyarakat yang berada di Desa Moutong Tengah terutama dalam hal pemenuhan kebutuhan pokok untuk dikonsumsi oleh masyarakat yang mendapatkan bantuan ini. Adanya regulasi ini tujuan dari yang adil bagi semua rakyat Indonesia.

Peserta Program Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) di Desa Moutong Tengah ditentukan pemerintah Desa, masyarakat yang dipilih adalah masyarakat yang sudah terdaftar di Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS). Di Desa Moutong Tengah terdapat bantuan Program Bantuan Pangan Non Tunai. Dari program ini sangat berdampak pada keluarga yang membutuhkannya.

Jumlah penerima Bantuan Pangan Non Tunai yang ada di Desa Moutong Tengah berjumlah 119 kepala keluarga yang masing-masing terbagi dalam 5 dusun yang ada pada wilayah administrasi Desa Moutong Tengah, pembagian jumlah penerima Bantuan Pangan Non Tunai yang ada di Desa Moutong Tengah. Dusun satu Desa Moutong Tengah terdapat 26 kepala keluarga, dusun dua terdapat 37 kepala keluarga, dusun tiga terdapat 14 kepala keluarga, dusun empat terdapat 17 kepala keluarga, dan dusun lima terdapat 25 kepala keluarga yang mendapatkan Bantuan Pangan Non Tunai. Dari data ini dapat dilihat bahwa dusun 2 memiliki jumlah penerima paling banyak diantara lima dusun yang ada di Desa Moutong

Tengah dan dusun 3 merupakan yang paling sedikit mendapatkan bantuan pangan non tunai yang ada di Desa Moutong Tengah.

Para penerima Bantuan Pangan Non Tunai di Desa Moutong Tengah merupakan masyarakat yang telah memenuhi kualifikasi dan syarat yang berlaku, dan berhak mendapatkan bantuan yang merupakan regulasi dari pemerintah untuk membantu masyarakat yang ekonominya berada dibawah garis marjinal di Desa Moutong Tengah pada tahun 2025. Dari 119 kepala keluarga penerima bantuan menggambarkan bahwa tingkat kesejahteraan masyarakat Desa Moutong Tengah dapat dikatakan masih sangat membutuhkan peran pemerintah lewat regulasinya untuk membantu memenuhi kebutuhan pokok melalui Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT). Program bantuan ini secara langsung memberikan pengaruh positif untuk kesejahteraan bagi masyarakat Desa Moutong Tengah yang membutuhkannya.

Sehingga dalam proses implementasi Program Bantuan Pangan Non Tunai di Desa Moutong Tengah memerlukan beberapa aspek dari pandangan *George C. Edward III* yaitu komunikasi, sumber daya, disposisi, dan struktur birokrasi.

Komunikasi yang terjadi di Desa Moutong Tengah tentang Implementasi Program Bantuan Pangan Non Tunai tidak berjalan dengan baik. Baik itu dari sisi transmisi, kejelasan informasi, dan konsisten dalam komunikasi yang terjadi pada sistem birokrasi hingga pada penerima manfaat. Karena tidak adanya edukasi atau sosialisasi kepada Keluarga Penerima Manfaat (KPM) sehingga mereka ketinggalan informasi mengenai kapan uang manfaat ditransferkan oleh Bank Himbara ke Kartu Keluarga Sejahtera (KKS).

Sumber Daya terkait dengan implementasi Program Bantuan Pangan Non

Tunai di Desa Moutong Tengah menunjukan bahwa masih terdapat kendala baik itu pada sumber daya manusia, dana, dan fasilitas. Pada sumber daya manusia masih kurang memahami esensi dan orientasi dari Program Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) sehingga dalam penyampaian informasi kepada Keluarga Penerima Manfaat (KPM) belum maksimal. Sedangkan pada sumber daya dana dan fasilitas terdapat kurangnya anggaran untuk melakukan sosialisasi serta masih minimnya pengetahuan dalam memanfaatkan fasilitas.

Disposition terkait dengan Program Bantuan Pangan Non Tunai di Desa Moutong Tengah bahwa kurangnya pengetahuan implementor yang mengakibatkan pelaksana meneiliki kecenderungan sikap acuh tak acuh.

Struktur Birokrasi terkait dengan Program Bantuan Pangan Non Tunai di Desa Moutong Tengah menunjukan bahwa masih terjadi ketidaksinkronan dalam penerapan Standar Oprasional Prosedur (SOP), sehingga terdapat kesalahan yang mengakibatkan pelaksanaan program tidak efektif.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah diuraikan, maka rumusan masalah yang dapat dikemukakan dalam penulisan ini adalah bagaimana Implementasi Program Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) di Desa Moutong Tengah Kecamatan Moutong Kabupaten Parigi Moutong.

1.3 Tujuan dan Kegunaan Penelitian

1.3.1 Tujuan Penelitian

Tujuan yang ingin dicapai dari penulisan ini adalah untuk mengetahui Implementasi Program Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) di Desa Moutong

Tengah Kecamatan Moutong Kabupaten Parigi Moutong.

1.3.2 Kegunaan Penelitian

Manfaat penelitian ini dibagi menjadi dua, yaitu:

a. Manfaat Teoritik

Penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat sebagai bahan referensi tambahan dalam mempelajari hal-hal yang berkaitan dengan Implementasi Program Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT).

b. Manfaat Praktis

Sebagai sumbangan saran atau masukan bagi pemerintah Desa Moutong Tengah dan instansi lainnya dalam upaya meningkatkan kinerja agar pelaksanaan program dimasa yang akan datang dapat dilaksanakan dengan lebih efektif dan efisien.

BAB II

KAJIAN PUSTAKA DAN ALUR PIKIR

2.1 Kajian Pustaka

2.1.1 Penelitian Terdahulu

Penelitian ini dilakukan dengan menjadikan beberapa penelitian terdahulu sebagai dasar maupun sebagai bahan pertimbangan. Meskipun demikian, penelitian ini tidak memiliki kesamaan yang serupa dengan peneliti-peneliti sebelumnya, oleh karena itu untuk menguatkan dan mengembangkan hasil penelitian.

Tujuan penulisan ini untuk mengetahui implementasi Program Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) di Desa Moutong Tengah Kecamatan Moutong Kabupaten Parigi Moutong serta untuk mengetahui faktor-faktor yang berpengaruh terhadap Program Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT).

Penelitian yang dilaksanakan oleh Zulbaidah (2020) “Implementasi Kebijakan Program Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT)”. Tujuan dari penelitian ini untuk mengetahui bagaimana Implementasi Kebijakan Program Bantuan Pangan Non Tunai di Gampong Blang Oi Kecamatan Meuraxa Kota Banda Aceh. Metode penelitian yang digunakan yaitu Metode kualitatif, Pengumpulan data dilakukan dengan cara melakukan observasi, wawancara, dan dokumentasi. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa sejauh ini Program Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) sudah sangat membantu dalam memenuhi kebutuhan pangan bagi keluarga yang kurang mampu.

Penelitian yang dilaksanakan oleh Ayu Ariska (2023) “Implementasi

Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) dalam Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat di Kelurahan Duampanua Kecamatan Baranti Kabupaten Sidrap". Tujuan dari penelitian ini untuk mampu mengurangi kemiskinan dan meningkatkan sumber daya manusia dibidang Pendidikan, Kesehatan, dan kesejahteraan pada kelompok sosial masyarakat miskin. Metode penelitian menggunakan metode Kualitatif, pengumpulan data menggunakan metode observasi, wawancara, dan dokumentasi. Hasil penelitian dapat dikemukakan bahwa Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) adalah bantuan yang disalurkan oleh pemerintah setiap bulannya kepada Keluarga Penerima Manfaat (KPM) untuk keperluan pembelian bahan makanan yang telah ditentukan.

Penelitian yang dilaksanakan oleh Daniel Daniel "Implementasi Program Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) di Kecamatan Parindu Kabupaten Sanggau". Tujuan dari penelitian ini untuk mengetahui Implementasi Program Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) di Kecamatan Parindu Kabupaten Sanggau. Metode penelitian menggunakan Deskriptif Kualitatif, pengumpulan data menggunakan metode observasi, wawancara, dan dokumentasi. Hasil penelitian ini mengenai implementasi Program Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) di Kecamatan Parindu sudah berjalan dengan baik.

Penelitian yang dilaksanakan oleh Kuni Nabila, Pudjo Suharso, Wiwin Hartono "Implementasi Program Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) di Desa Paleran Kecamatan Umbulsari Kabupaten Jember". Tujuan dari penelitian untuk meningkatkan transparansi serta akuntabilitas kebijakan dengan tujuan memudahkan mengontrol, mengawasi serta meminimalisir kesenjangan.

Penelitian ini juga bertujuan untuk mendeskripsikan implementasi Program Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) yang dilaksanakan oleh Dinas Sosial Kabupaten Jember. Metode penelitian ini menggunakan penelitian Kualitatif Deskriptif, pengumpulan data menggunakan menggunakan metode observasi, wawancara, dan dokumentasi. Hasil Penelitian ini menunjukan bahwa implementasi Program Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) di Desa Paleran Kecamatan Umbulsari Kabupaten Jember belum sesuai dengan buku pedoman Bantuan Pangan Non Tunai tahun 2018 sebagai pedoman dalam pelaksanaan program, dengan beberapa tahap, sosialisasi, registrasi penyaluran dan pembayaran.

Penelitian yang dilaksanakan oleh Maryam I. Ngguti, Ismet Sulila, Romy Tantu “Implementasi Kebijakan Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) dalam Menanggulangi Kemiskinan di Desa Sidomukti Kecamatan Mootilango Kabupaten Gorontalo”. Tujuan dari penelitian ini untuk mengetahui implementasi kebijakan Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) dalam menanggulangi kemiskinan dan faktor penentu keberhasilan implementasi kebijakan Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT). Metode penelitian ini menggunakan metode Kuantitatif Deskriptif. Pengumpulan data menggunakan observasi, wawancara, dan dokumentasi. Hasil penelitian ini menunjukan bahwa implementasi kebijakan Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) di Desa Sidomukti Kecamatan Mootilago Kabupaten Gorontalo telah dilaksanakan dengan baik dengan tujuan agar kesenjangan dan kemiskinan di daerah tersebut bisa direduksi.

Tabel 2.1 Penelitian Terdahulu

No	Nama/Judul Penelitian	Metode Penelitian	Teori Penelitian	Hasil Penelitian
1.	Zulbaidah (2020) dengan judul “Implementasi Kebijakan Program Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT)”	Peneliti ini menggunakan metode <i>Kualitatif</i> , yaitu metode penelitian dengan cara melakukan observasi, wawancara, dan dokumentasi.	George C. Edward III	Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa sejauh ini program BPNT sudah sangat membantu dalam memenuhi kebutuhan pangan bagi kelurga yang kurang mampu. Kemudian disaat pandemik Covid-19 ini banyak Kepala Keluarga yang dipemutusan Hubungan Kerja (PHK) kemudian sulitnya dalm memenuhi kebutuhan hidup sehari -hari.
2.	Ayu Ariska (2023) dengan judul “Implementasi Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) dalam Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat di Kelurahan Duampauna Kecamatan Baranti Kabupaten Sidrap”	Peneliti ini menggunakan metode penelitian <i>kualitatif</i> , yaitu metode penelitian dengan cara melakukan observasi, wawancara, dan dokumentasi.	George C. Edward III	Hasil dari penelitian ini mampu mengurangi kemiskinan dan meningkatkan sumber daya manusia dibidang Pendidikan, Kesehatan, dan Kesejahteraan pada kelompok sosial masyarakat miskin.
3.	Daniel dengan judul “Implementasi Program Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) di Kecamatan Parindu Kabupaten Sanggau”	Peneliti ini menggunakan metode penelitian <i>deskriptif kualitatif</i> , yaitu metode penelitian dengan cara melakukan observasi, wawancara, dan dokumentasi.	Van Meter dan Van Horn	Hasil penelitian ini untuk mengetahui Implementasi Program Bantuan Pangan Non Tunai BPNT di Kecamatan Parindu Kabupaten Sanggau. Secara sosialisasi yang dilakukan oleh para pihak aktor pelaksanaan sudah dilaksanakan dengan baik dan berkelanjutan yaitu sebelum diluncurkan program BPNT melalui E-Warung di Kecamatan Parindu Kabupaten Sanggau.
4.	Kuni Nabilah, Pudjo Suharso, Wiwin Hartono “Implementasi Program Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) di Desa Paleran Kecamatan Umbulsari Kabupaten Jember”	Peneliti ini menggunakan metode penelitian <i>kualitatif deskriptif</i> , yaitu metode penelitian dengan cara observasi, wawancara dan dokumentasi.	George C. Edward III	Hasil dari penelitian ini untuk mendeskripsikan Implementasi Program BPNT yang dilaksanakan oleh Dinas Sosial Keluarga penerima Manfaat (KPM) di Desa Paleran sebagai subyek penelitian.

5.	Maryam I.Ngguti, Ismet Sulila, Romi Tantu (2023) dengan judul “Implementasi Kebijakan Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) Dalam Menanggulangi Kemiskinan di Desa Sidomukti Kecamatan Mootilango Kabupaten Gorontalo”	Penelitian ini menggunakan metode penelitian <i>kuantitatif deskriptif</i> , yaitu metode penelitian dengan cara melakukan observasi, wawancara dan dokumentasi.	Van Meter dan Van Horn	Hasil dari penelitian ini agar kesenjangan dan kemiskinan di daerah tersebut sudah bisa di reduksi.
6.	Nia Ramadhan (2025) dengan Judul “Implementasi Program Bantuan Pangan Non Tunai Di Desa Moutong Tengah Kecamatan Moutong Kabupaten Parigi Moutong”	Penelitian ini menggunakan pendekatan <i>kualitatif deskriptif</i> . Yaitu metode penelitian dengan cara observasi, wawancara, dan dokumentasi	George C. Edward III	Hasil penelitian menunjukan bahwa Implementasi Program Bantuan Pangan Non Tunai Di Desa Moutong Tengah Kecamatan Moutong Kabupaten Parigi Moutong belum berjalan dengan efektif dan efisien karena belum terlaksana dengan baik, baik dari aspek komunikasi, sumber daya, disposisi dan struktur birokrasi.

Persamaan Penelitian ini dengan penelitian terdahulu yaitu bertujuan untuk menilai pelaksanaan Program Bantuan Pangan Non Tunai. Masing-masing penelitian menggunakan metode kualitatif serta hambatan yang diidentifikasi dalam setiap penelitian bervariasi, untuk mengurangi kemiskinan dan meningkatkan sumber daya manusia dibidang Pendidikan, Kesehatan, dan Kesejahteraan. Dengan demikian, meskipun menggunakan pendekatan yang serupa, setiap penelitian memiliki konteks, kebijakan dan tantangan yang berbeda dalam Implementasi Program Bantuan Pangan Non Tunai. Perbedaan penelitian saya dengan penelitian terdahulu yaitu terletak pada tujuan untuk mengetahui efisiensi penyaluran bantuan pangan non tunai dan lokasi penelitian yang berbeda.

2.1.2 Landasan Teoritis dan Kepustakaan Yang Relevan

2.1.2.1 Konsep Administrasi Publik

Administrasi publik terdiri dari dua kata yaitu administrasi dan publik. Administrasi berasal dari Bahasa Yunani yang terdiri dari dua kata yaitu ad yang artinya intensif dan ministrare yang artinya melayani (*to serve*). Dengan demikian, Administrasi adalah membantu atau melayani dengan intensif.

Administrasi mengandung dua pengertian, yaitu dalam arti sempit dan arti luas. Administrasi dalam arti sempit didefinisikan sebagai kegiatan catat-mencatat, tulis-menulis, atau sering disebut dengan kegiatan tata usaha. Sedangkan administrasi dalam pengertian luas adalah proses kerja sama secara rasional yang dilakukan oleh sekelompok orang untuk mencapai tujuan yang telah ditentukan sebelumnya.

Menurut S.P Siagian (2004:2 dalam buku teori administrasi publik), mendefinisikan administrasi sebagai keseluruhan proses kerja sama antara dua orang manusia atau lebih yang didasarkan atas rasionalitas tertentu mencapai tujuan yang telah ditentukan sebelumnya.

Menurut The Liang Gie (1993:9 dalam buku teori administrasi publik), mendefinisikan administrasi adalah rangkaian kegiatan terhadap pekerjaan yang dilakukan oleh sekelompok orang di dalam Kerjasama mencapai tujuan tertentu.

Menurut Chandler dan Plano (dalam Keban, 2014:3) administrasi publik adalah proses di mana sumber daya dan personel publik diatur dan dikoordinasikan untuk merumuskan, mengimplementasikan, dan mengelola keputusan dalam kebijakan publik. Mereka juga menjelaskan bahwa administrasi

publik adalah seni dan ilmu yang berfokus pada pengaturan urusan publik dan pelaksanaan tugas-tugas yang telah ditetapkan. Sebagai disiplin ilmu, administrasi publik bertujuan untuk menyelesaikan masalah-masalah publik melalui peningkatan atau penyempurnaan dibidang organisasi, sumber daya manusia, dan keuangan.

Istilah Publik pada dasarnya berasal dari bahasa Inggris “*public*” yang berarti umum, rakyat umum, orang banyak dan rakyat. Nampaknya kata “publik” diterjemahkan oleh beberapa kalangan berbeda-beda sebagaimana kepentingan mereka. Misalnya kata “*Public Administration*” diterjemahkan menjadi “Administrasi Negara”.

Administrasi publik merupakan ilmu sosial yang dinamis, setiap saat mengalami perubahan sejalan dengan perubahan zaman, peradaban, dan teknologi. Dalam administrasi publik pokok kajian yang dibahas adalah tiga elemen utama dalam sebuah negara. Ketiga elemen tersebut yaitu lembaga legislatif, eksekutif, serta yudikatif. Dalam kajiannya, administrasi publik mengaitkan ketiga elemen negara tersebut dengan beberapa peraturan dan kebijakan yang berhubungan dengan publik, tujuan negara serta etika yang menjadi acuan penyelenggaraan negara.

Selain itu, Administrasi publik adalah ilmu yang mempelajari kegiatan kerja sama dalam organisasi yang bersifat publik. Administrasi publik mencakup semua teori, konsep, analisis dan beberapa cabang dari ilmu sosial, seperti ilmu politik, ekonomi, psikologi, antropologi budaya, dan sosiologi. Pada era globalisasi diperlukan penguasaan atas pengetahuan ilmiah mengenai hal-hal yang berkaitan

dengan fungsi dan proses yang berlangsung dan institusi atau organisasi publik

Dalam bidang administrasi publik berkembang wawasan yang lebih luas dan tersedia landasan yang lebih berguna agar tercapainya tujuan organisasi publik lebih efisien dan efektif.

Paradigma administrasi publik mengikuti perkembangan ilmu pengetahuan, terdapat beberapa pandangan dari beberapa tokoh seperti Henry (2016) yaitu dalam memusatkan pengamatannya terhadap lokus serta fokus dari ilmu administrasi seperti yang dianjurkan oleh Golembiewski (1977) membagi ilmu pengetahuan administrasi negara menjadi 6 paradigma yang terdapat selama periode dari tahun 1927 sampai tahun 1990. Ke enam paradigma tersebut adalah sebagai berikut:

1. *The Politics/Administration Dichotomy* atau Pemisahan antara Politik dan Administrasi (dari tahun 1900 sampai dengan tahun 1926).

Paradigma yang pertama memisahkan antara politik dengan administrasi. Paradigma ini berdasarkan pengamatan Woodrow dan Goodnow yang melihat perlunya pemisahan antara administrasi dan politik dikarenakan administrasi di Amerika saat itu masih dipenuhi dengan spoils system juga patronage system yang digunakan dalam perekrutan para pegawai negeri sipil. Dalam paradigma ini dijelaskan bahwa terdapat dua fungsi yang berada dari pemerintah. Kedua fungsi tersebut ialah politik yang menurut Goodnow dalam bukunya *Public Administration* (1990) berhubungan dengan kebijaksanaan atau berbagai masalah yang berhubungan dengan tujuan negara, sedangkan administrasi

berkaitan dengan pelaksanaan dari kebijaksanaan tersebut.

2. *The Principles of Administration* atau Prinsip-prinsip Administrasi (periode tahun 1927 sampai dengan tahun 1950).

Paradigma yang kedua yaitu prinsip-prinsip administrasi negara, dimana prinsip-prinsip tersebut dapat berlaku dimanapun tetap dengan batasan. Prinsip-prinsip tersebut merupakan prinsip bekerja dalam suasana administrasi tanpa memandang budaya, fungsi, lingkungan, misi, ataupun kerangka institusional serta tanpa pengecualian prinsip-prinsip tersebut dapat diterapkan dimana pun juga dengan berhasil. Menurut *Guilck* dan *Urwick*, prinsip-prinsip administrasi penting, namun penerapan dari prinsip tersebut tidaklah penting. Dengan kata lain bahwa fokus lebih penting dari pada lokus.

3. *Public Administration as Political Science* atau Administrasi Negara sebagai Ilmu Politik (periode tahun 1950 sampai dengan 1970).

Paradigma yang ketiga yaitu administrasi sebagai ilmu politik. Dengan demikian terdapat pembaharuan dari penentuan lokusnya yakni birokrasi pemerintah sehingga kehilangan fokusnya. Terdapat dua perkembangan yang terjadi selama periode ini yang menggambarkan adanya perbedaan dalam masalah mengurangi ketegangan antara para ilmuan administrasi dan ilmuan politik secara perlahan. Pertama, bidang yang lebih besar nyata dan jelas dipegari batas budaya. *Parochialisme* administrasi negara Amerika mempunyai banyak kesamaan *parachialisme* dari ilmu-ilmu yang mendasarkan pada pendekatan tingkah laku pada umumnya, kedua bahwa pada umumnya administrasi negara dengan perbandingan administrasi khususnya, mempunyai masalah pertentangan antara

praktek dan teori.

4. *Public Administration as Management* atau Administrasi Negara sebagai Manajemen (1956-1970).

Paradigma keempat ialah administrasi publik sebagai manajemen. Konsep manajemen mulai digunakan kembali karena berbagai konsep dari ilmu politik serta manajemen semakin kehilangan arti dari semula yang mempunyai keunikan dan identitas yang baik. Kemudian teori-teori organisasi dan perilaku, perencanaan dan pengambilan keputusan yang sebenarnya diambil lebih banyak para elit mulai dikembangkan kembali kemudian ditawarkan dalam ilmu administrasi publik.

5. *Public Administration as Public Administration* atau Administrasi Negara sebagai Administrasi Negara (periode 1970-sekarang).

Paradigma kelima yaitu administrasi negara sebagai administrasi negara. Para ilmuan administrasi publik mengembangkan perspektif-perspektif, seperti yang dikemukakan oleh *Felix A. Nigro* dan *Lloyd G. Nigro* (1977) dalam “*Modern Public Administration*” yang memuat:

- a) Usaha dari berbagai kelompok yang bekerjasama di dalam pelayanan publik.
- b) Kelompok terdiri dari 3 elemen yang terdiri dari eksekutif, legislatif, serta yudikatif, dan hubungan antara ketiganya dalam nuansa kerjasama (tidak ada dikatomi).
- c) Memerankan peranan penting dalam proses perumusan kebijakan. Oleh sebab itu, administrasi publik merupakan bagian dari proses politik.

- d) Berbeda dengan organisasi privat, administrasi publik lebih berorientasi pada profit.
- e) Administrasi publik memberikan pelayanan publik dengan demikian, administrasi publik modern berhubungan terus dengan terdapatnya kerja sama antara ketiga elemen pemerintah yaitu perumusan kebijakan, proses politik serta pelayanan publik.

6. *Public Administration as Governance* atau Administrasi Negara Sebagai Pemerintahan (periode 1990 sampai sekarang).

Paradigma keenam yaitu administrasi negara sebagai pemerintahan dimana terdapat perubahan sektoral yaitu peran sektor profit, non profit dan sektor publik mengalami kebangkitan. Hubungan tersebut dinamakan kebangkitan pemerintahan yang memberikan manfaat kepada masyarakat oleh lembaga publik untuk bergerak maju pemerintahan berdasarkan hubungan, pemerintahan horizontal, dan pemerintahan dengan kemitraan. Terdapat konfigurasi dari hukum, kebijakan, dan organisasi yang mengontrol warga negara dan memberikan manfaat kepada publik. Paradigma ini membedakan antara pemerintah (*government*) dengan pemerintahan (*governance*) dimana pemerintah hanya bersifat institusional, sedangkan pemerintahan merupakan gabungan antara institusional dan hubungan pemerintahan.

Untuk Memahami administrasi publik merupakan pertanyaan awal dan filosofi yang dilakukan oleh administrasi publik. Administrasi publik mempunyai tanggung jawab untuk menyelenggarakan kepentingan publik. Isu penting yang tercakup didalamnya meliputi daya tanggap terhadap problem yang terjadi dalam

berbagai skala, keterwakilan, keadilan, transparansi, akuntabilitas, marginalisasi, ketepatan dalam kebijakan, pelayanan publik dan sebagainya. Isu-isu ini memerlukan tindakan nyata dari administrasi publik secara bersinergi untuk memecahkan masalah publik dan berkeadilan.

2.1.2.2 Konsep Kebijakan Publik

Dalam kamus besar Bahasa Indonesia, kebijakan diartikan sebagai rangkaian konsep dan asas yang menjadi garis besar dan dasar rencana dalam pelaksanaan suatu pekerjaan, kepemimpinan dan cara bertindak tentang pemerintah, organisasi, dan sebagainya. Pernyataan cita-cita, tujuan, prinsip dan garis pedoman untuk manajemen dalam usaha mencapai sasaran.

Kebijakan (*policy*) berasal dari Bahasa Yunani, Sanskrit, dan Latin. Akar kata dalam Bahasa Yunani dan Sanskrit polis (negara-kota) dan *pur* (kota) dikembangkan dalam Bahasa Latin menjadi *politia* (negara) dan akhirnya dalam bahasa Inggris pertengahan *policie* yang berarti menangani masalah-masalah publik atau administrasi pemerintahan. Kebijakan publik diarahkan untuk memecahkan masalah publik untuk memenuhi kepentingan dan penyelenggaran urusan-urusan publik. Kebijakan publik sejauh mungkin diupayakan berada dalam rel kebijakan yang beraras pada sebesarnya kebijakan publik. Dalam ranah upaya pemerintah untuk memecahkan masalah publik yang dihadapi.

Kebijakan publik adalah apa saja yang dilakukan dan tidak dilakukan oleh pemerintah. Dalam kaitan ini kebijakan merupakan upaya untuk memahami dan mengartikan apa yang dilakukan untuk tidak dilakukan oleh pemerintah mengenai suatu permasalahan publik. Kebijakan publik dalam kerangka substantif adalah

segala aktivitas yang dilakukan oleh pemerintah untuk memecahkan masalah publik yang dihadapi. Dengan membawa kebijakan publik dalam ranah upaya memecahkan masalah publik maka warna administrasi publik akan lebih terasa kental. Kebijakan publik diarahkan untuk memecahkan masalah publik untuk memenuhi kepentingan dan penyelenggaraan urusan-urusan publik. Kebijakan sejauh mungkin diupayakan berada dalam rel kebijakan yang berdas pada sebesar-besarnya kepentingan publik.

Kebijakan Publik merupakan suatu tindakan pejabat yang mengarah pada acak dan serba ketidakteraturan di era politik modern ini. Akan tetapi saling berkaitan dengan pola yang mengarah pada tujuan yang dilakukan pejabat atau pemerintah menjadi keputusan diri sendiri, karena keputusan tidak selalu mencakup pada perundang-undangan melainkan ada sangkut pautnya dengan implementasi dan pemaksaan berlakuan, karena kebijakan pejabat pemerintah akan bersangkutan dengan bidang tertentu.

Menurut *Dye* (dalam Pasolong, 2008) keputusan yang diambil oleh pemerintah harus memiliki tujuan yang jelas. Kebijakan publik mencakup semua tindakan yang dilakukan oleh pemerintah, sehingga tidak hanya sekedar merupakan pernyataan keinginan dari pemerintah atau pejabat pemerintah saja.

Menurut *Carl Friedrich* (dalam Winarno, 2014:17) menyatakan bahwa: “Kebijakan adalah suatu arah tindakan yang diusulkan oleh individu, kelompok, atau pemerintah dalam suatu lingkungan tertentu. Lingkungan ini memberikan hambatan-hambatan dan peluang-peluang terhadap kebijakan yang diusulkan, yang harus dihadapi dan diatasi untuk mencapai suatu tujuan atau merealisasikan suatu

sasaran atau maksud tertentu”.

Menurut *Thomas R. Dye* (1975, dalam Syafiie, 2006), menyatakan bahwa kebijakan publik mencakup segala hal yang dipilih atau tidak dipilih oleh pemerintah, termasuk keputusan untuk bertindak atau tidak bertindak (*whatever government choose to do or not to do*).

Tujuan kebijakan publik adalah serangkaian tindakan pemerintah yang dirancang untuk mencapai hasil tertentu yang diinginkan oleh publik sebagai konstituen pemerintah. Kebijakan publik merupakan pilihan tindakan yang sah, karena dikembangkan oleh lembaga yang mempunyai legitimasi dalam sistem pemerintahan.

2.1.2.3 Konsep Implementasi Kebijakan Publik

Implementasi atau implementation, sebagaimana dalam kamus *Webstera and Roger dipahami sebagai to carry out, accomplish, fulfill, produce, complete (Hill and Hupe 2002)*. Dalam KBBI (2002), implementasi adalah pelaksanaan, penerapan. Dari segi bahasa, implementasi dimaknai sebagai pelaksanaan, penerapan, atau pemenuhan.

Menurut Wahyu (Mulyadi, 2015:50), studi implementasi bertujuan untuk memahami proses implementasi itu sendiri, memberikan umpan balik pada pelaksanaan kebijakan, mengetahui apakah pelaksanaan tersebut sesuai dengan rencana atau standar yang telah ditetapkan, serta mengidentifikasi hambatan dan masalah yang muncul selama proses implementasi.

Implementasi juga merupakan suatu konsep yang sangat penting dalam teori organisasi, karena konsep implementasi mampu memberikan gambaran tentang

keberhasilan suatu organisasi dalam pencapaian tujuan. Oleh karena itu, diperlukan implementasi untuk menunjang keberhasilan dalam pelaksanaan suatu organisasi.

Implementasi dipandang sebagai suatu usaha untuk mengukur dan memberi nilai secara objektif mencapai tujuan akhir yang telah direncanakan. Pengertian ini dapat dikatakan bahwa jika suatu organisasi telah berhasil mencapai tujuan yang telah di sepakati, maka dapat dikatakan oleh mencapai implementasi. Implementasi kebijakan adalah tahap yang penting dalam kebijakan. Tahap ini menentukan apakah kebijakan yang ditempuh oleh pemerintah berhasil untuk menghasilkan *output* dan *outcomes* seperti yang telah direncanakan. *Output* adalah keluaran kebijakan yang diharapkan dapat muncul sebagai keluaran langsung dari kebijakan. *Outcomes* adalah dampak dari kebijakan yang diharapkan dapat timbul setelah keluarnya output kebijakan.

Implementasi kebijakan merupakan tahapan dari proses kebijakan segera setelah penetapan undang-undang. Sebagaimana dinyatakan *Ripley* dan *Franklin* (dalam winarno 2007:145), implementasi kebijakan adalah apa yang terjadi setelah undang-undang ditetapkan yang memberikan otoritas program, kebijakan, keuntungan (*benefit*), atau jenis keluaran yang nyata.

Implementasi kebijakan adalah aktivitas-aktivitas yang dilakukan untuk melaksanakan sesuatu kebijakan secara efektif. Implementasi ini merupakan pelaksanaan aneka ragam program yang dimaksudkan dalam sesuatu kebijakan. Ini adalah satu aspek proses kebijakan, yang amat sulit dalam menentukan hasil dari kebijakan tertentu. Sebagaimana telah dikemukakan, perbedaan dapat muncul

antara pernyataan kebijakan (*policy statement*) dengan hasil kebijakan (*policy outputs*). Mungkin persoalannya lahir dari dampak kebijakan. Dampak memancarkan hasil kebijakan, yang tentu saja dapat berlainan dengan pernyataan kebijakan. Dampak kebijakan merupakan konsekuensi-konsekuensi yang ditanggung masyarakat, baik yang diharapkan maupun tidak, keluar dari implementasi kebijakan.

Berbagai pendekatan dalam implementasi kebijakan baik terkait dengan implementor, sumber daya, lingkungan, metode, permasalahan dan tingkat kemajemukan yang dihadapi dimasyarakat. Sumber daya manusia sebagai implementor mempunyai peranan penting dalam pengendalian implementasi kebijakan publik. Dalam implementasi kebijakan implementor yang terlihat di selain kaum birokrat banyak lagi antara lain yang ikut terlihat, contohnya para legislator, hakim dan orang perseorangan.

Menurut Riant Nugroho (2018) (dalam Pricilia. M, 2022) terdapat lima prinsip yang harus dipenuhi dalam keefektifan kebijakan, yaitu:

1. Tepat kebijakan. Ketepatan kebijakan dinilai dari sejauh mana kebijakan yang ada telah bermuatan hal-hal yang memang memecahkan masalah yang hendak dipecahkan.
2. Tepat pelaksananya. Terdapat tiga lembaga yang dapat menjadi implementor, yaitu pemerintah, Kerjasama antar pemerintah dan masyarakat/swasta, atau implementasi kebijakan yang bersifat monopoli.
3. Tepat target. Apakah target yang diintervensi sesuai dengan yang direncanakan, tidak tumpang tindih atau bertentangan dengan intervensi

kebijakan lain apakah target dalam kondisi siap diintervensi atau tidak.

4. Tepat lingkungan. Lingkungan dalam hal ini terbagi menjadi lingkungan internal dan lingkungan eksternal.
5. Tepat proses. Terdiri atas tiga proses, yaitu *Policy Acceptance*, *Policy adoption*, *Strategic Readiness*.

Hambatan-hambatan dalam implementasi kebijakan dalam implementasi kebijakan dapat dianalisis sesuai pandangan *George C. Edwards III* yaitu model implementasi kebijakan dengan perspektif *top down* yang berperan penting dalam pencapaian keberhasilan implementasi, yakni; komunikasi, sumber daya, disposisi dan struktur birokrasi. Keempat perspektif dapat dijelaskan bahwa ini:

1. Indikator Komunikasi implementasi kebijakan publik agar dapat mencapai keberhasilan, mensyaratkan agar implementor mengetahui apa yang harus dilakukan secara jelas. Apa yang menjadi tujuan dan sasaran kebijakan harus diinformasikan kepada kelompok sasaran (target group) sehingga akan mengurangi distrosi implementasi. Apabila penyampaian tujuan dan sasaran suatu kebijakan tidak jelas, tidak memberikan pemahaman atau bahkan tujuan dan sasaran kebijakan tidak diketahui sama sekali oleh kelompok sasaran, maka kemungkinan akan terjadi suatu penolakan atau resistensi dari kelompok sasaran yang bersangkutan.
2. Indikator Sumber Daya dalam implementasi kebijakan harus ditunjang oleh sumber daya, baik sumber daya manusia, material dan metode, sasaran, tujuan dan isi kebijakan, walaupun sudah dikomunikasikan secara jelas dan konsisten tetapi apabila implementor kekurangan sumber daya untuk melaksanakan

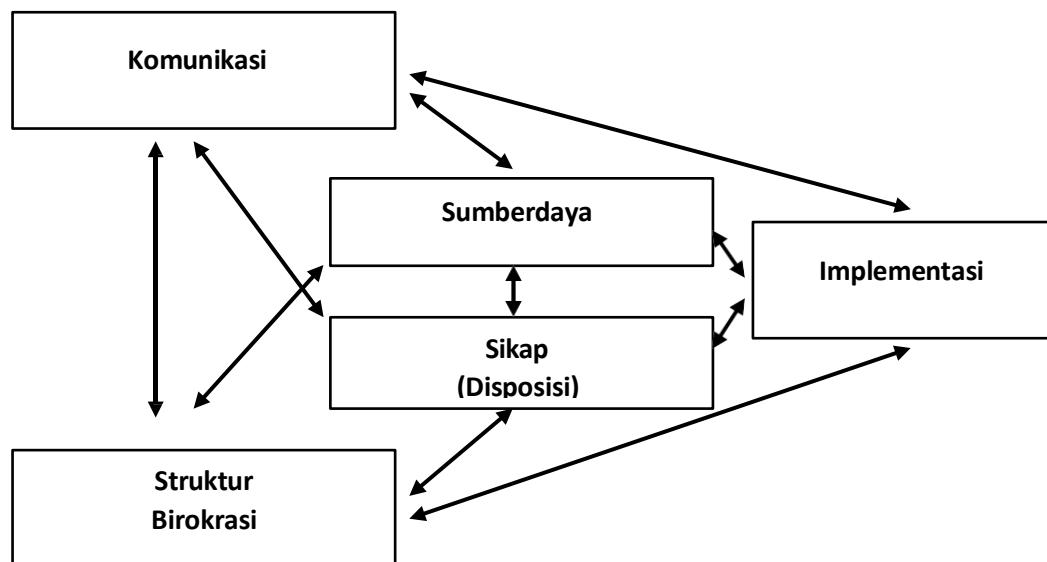
implementasi tidak akan berjalan efektif dan efisien.

3. Indikator Disposisi (sikap) suatu disposisi dalam implementasi adalah karakteristik, sikap yang dimiliki oleh implementor kebijakan, seperti komitmen, kejujuran komunikatif, cerdik, dan sifat demokratis.
4. Indikator Struktur Birokrasi organisasi menyediakan peta sederhana untuk menunjukkan secara umum kegiatan-kegiatannya dan jarak dari puncak menunjukkan status relatifnya.

A. Model Implementasi Kebijakan George C. Edward III

Menurut *George C. Edward III* dalam Tangkilisan (2003:12) terdapat 4 faktor yang mempengaruhi keberhasilan atau kegagalan implementasi kebijakan antara lain yaitu faktor (1) komunikasi, (2) Sumber Daya, (3) Disposisi dan (4) Struktur Birokrasi.

Gambar 2.1



Sumber George C. Edward III dalam terjemahan ringkasan konsep pemikiran dari Teori/Model Implementasi Kebijakan oleh George C. Edward III lokakarya studi Implementasi Kebijakan UNDP/PSKPP UNTAD 2004.

1. Komunikasi

Agar implementasi kebijakan menjadi efektif, maka mereka yang bertanggungjawab melaksanakannya harus mengetahui apa yang seharusnya mereka kerjakan. Perintah untuk mengimplementasikan kebijakan harus disebarluaskan kepada pelaksana yang tepat, kebijakan tersebut harus jelas, akurat dan konsisten. Jika apa yang dikehendaki untuk diimplementasikan oleh pembuat kebijakan tidak jelas, dan tidak terurai secara baik dan memadai, maka akan menimbulkan kesalahpahaman antar pembuat kebijakan dan implementor kebijakan. Kebijakan yang tidak memadai akan memberikan ruang bagi implementor untuk menterjemahkan kebijakan yang masih bersifat umum ke hal-hal yang lebih bersifat spesifik sesuai dengan kehendaknya dan penafsiranya. Hal ini tidak perlu terjadi, kebijakan yang tidak tersebarluaskan secara memadai yang terdistorsi dalam penyebarannya atau tidak jelas dan tidak konsisten akan menghadapi beragam hambatan dalam pelaksanaannya. Sebaliknya juga kebijakan-kebijakan yang terlalu detail dan kakuh akan kehilangan daya adaptasinya dan kreativitas pelaksana ditingkat bawah melaksanakan kebijakan sesuai kondisinya.

Dimensi Indikator :

a. Transmisi/Penyebarluasan (*Transmission*)

- Bagaimana Penyebarluasan Kebijakan terhadap *Policy Implementor* (Dalam badan Eksekutif).
- Bagaimana Sistem penyebarluasan terhadap kebijakan dari badan-

badan peradilan.

- Bagaimana cara penerimaan oleh implementor terhadap kebijakan tersebut.

b. Kejelasan dan Konsistensi Kebijakan (*Clarity*)

- Bagaimana kejelasan dan ketegasan isi dari kebijakan tersebut.
- Bagaimana fleksibilitas kebijakan tersebut terhadap kondisi lingkungan pemberlakuan.
- Bagaimana keleluasaan para implementor dalam melaksanakan kebijakan.
- Bagaimana kapasitas hukum terhadap pelaksanaan kebijakan yang dilakukan oleh implementor.

c. Konsistensi

- Bagaimana konsistensi kebijakan tersebut dalam pelaksanaannya.

2. Sumber Daya

Tidak hanya kejelasan dan konsisten perintah dalam implementasi kebijakan yang penting, tetapi juga jika sumber daya yang bertanggungjawab dalam melaksanakan kebijakan jumlahnya kurang memadai maka implementasi kebijakan menjadi tidak efektif. Sumber daya kebijakan menyangkut jumlah dan komptensi staff yang sesuai dengan kebutuhan, informasi yang relevan dan memadai tentang cara untuk melaksanakan kebijakan dan penyesuaian lainnya berkaitan dengan implementasi kebijakan dilakukan sebagaimana mestinya, berbagai dukungan fasilitas. (termasuk bangunan, peralatan, tanah, dan persediaan lainnya) di mana dengan adanya hal tersebut secara memadai dapat dilakukan pelayanan.

Dimensi Indikator :

a. Ketersedianan Staff (*Staff*)

- Bagaimana keadaan staff dilihat dari kecukupan jumlah.

- Bagaimana keadaan staff dilihat dari Kompetensi/Keterampilan Staff.
- b. Informasi
- Apakah tersedia informasi yang memberikan penjelasan lengkap dan memadai bagaimana implementor menjalankan tugasnya.
 - Apakah tersedia regulasi dan data pendukung yang dibutuhkan oleh implementor guna mendukung keberhasilan pelaksanaan kebijakan.
- c. Kewenangan
- Apakah kebijakan tersebut memberikan otoritas yang memadai bagi *Policy* implementor.
 - Apakah ada sanksi secara eksplisit diberikan jika terjadi pelanggaran dalam kebijakan dalam dokumen kebijakan tersebut.
 - Bagaimana ketepatan orientasi pelayanan dalam pelaksanaan kebijakan.
- d. Fasilitas
- Bagaimana ketersedian fasilitas yang bersifat fisik (*hardware*)
 - Bagaimana ketersedian fasilitas yang bersifat nonfisik (*software*)

3. Disposisi

Disposisi atau sikap dari implementor merupakan faktor kritis ketiga di dalam pendekatan dalam studi implementasi kebijakan publik. Jika implementasi kebijakan diharapkan dapat berjalan secara efektif, tidak saja para implementor harus mengetahui dan untuk melakukan hal tersebut, akan tetapi mereka juga harus memiliki kehendak untuk melakukan kebijakan tersebut. Para implementor memiliki kemampuan dalam melaksanakan atau tidak sebuah kebijakan akan tetapi mereka memiliki ketergantungan dengan pihak atas yang membuat kebijakan. Sikap-sikapnya akan banyak dipengaruhi oleh berbagai pandangnya terhadap

masing-masing kebijakan, dan dengan cara apa mereka melihat kebijakan yang mempengaruhi kepentingan organisasional dan pribadinya. Para implementor tidak selalu siap untuk mengimplementasikan kebijakan sebagaimana seperti para pembuat keputusan sering diperhadapkan dengan tugas mencoba untuk memanipulasi atau mengelola disposisi implementor atau mengurangi opsi-opsi yang ada.

Dimensi Indikator:

- a. Pemahaman terhadap kebijakan
 - Bagaimana pemahaman implementor terhadap eksistensi subtasni dan urgensi kebijakan.
- b. Kapasitas implementor
 - Apakah kapasitas implementor sesuai dengan apa yang diharapkan untuk menjalankan kebijakan.
- c. Kehendak/Motifasi implementor terhadap kebijakan.
 - Bagaimana orientasi sikap atau kehendak dan motivasi implementor terhadap dan dalam menjalankan kebijakan.

4. Struktur Birokrasi

Struktur birokrasi sebagaimana unit-unit organisasional selenggarakan kebijakan mereka mengembangkan prosedur pengoprasian standar *standard operating procedure* (SOP) untuk menangani situasi rutin alam pola hubungan yang beraturan. Malangnya, SOP yang dirancang untuk kebijakan-kebijakan masa depan sering tidak tepat bagi kebijakan-kebijakan baru dan mungkin menyebabkan perintangan terhadap perubahan, penundaan, pemberosan, atau tindakan-tindakan yang tidak diinginkan.

Dimensi Indikator:

a. *Standar Operinting Prosedur*

- Bagaimana penyebarluasan kebijakan terhadap *policy* implementor (dalam badan eksekutif).

b. Fragmentasi

- Bagaimana penyebaran dan besaran unit-unit pelaksana kebijakan (kebijakan yang dikelola oleh unit terlalu besar/gemuk, cenderung banyak mengalami hambatan dalam melaksanakan kebijakan).

B. Model Implementasi Kebijakan Van Meter dan Van Horn

Model implementasi kebijakan dari Van Meter dan Van Horn menetapkan beberapa variabel yang diyakini dapat mempengaruhi implementasi dan kinerja kebijakan. Beberapa variabel yang terdapat dalam Model Van Meter dan Van Horn adalah sebagai berikut:

1. Standar dan Sasaran Kebijakan

Kinerja implementasi kebijakan diukur berdasarkan tingkat keberhasilan dalam mencapai ukuran dan tujuan kebijakan yang realistik sesuai dengan sosio-kultur ditingkat pelaksanaan kebijakan. Ketika ukuran dan sasaran kebijakan terlalu idealis (utopis), maka akan sulit direalisasikan (Agustino, 2006). Van Meter dan Van Horn (dalam Widodo, 2007) menyatakan bahwa untuk mengukur kinerja implementasi kebijakan, penting untuk menegaskan standar dan sasaran tertentu yang harus dicapai oleh para pelaksana kebijakan. Kinerja kebijakan pada dasarnya merupakan penilaian atas tingkat pencapaian standar dan sasaran tersebut.

2. Sumber Daya

Keberhasilan implementasi kebijakan sangat bergantung pada kemampuan

memanfaatkan sumber daya yang tersedia. Manusia merupakan sumber daya terpenting dalam menentukan keberhasilan suatu implementasi kebijakan. Setiap tahap implementasi adanya sumber daya manusia yang berkualitas sesuai dengan pekerjaan yang disyaratkan oleh kebijakan yang telah ditetapkan secara apolitis. Selain sumber daya manusia, sumber daya manusia finansial dan waktu juga menjadi faktor penting dalam keberhasilan implementasi kebijakan. Seperti yang dikemukakan oleh Derthick (dalam Van Meter dan Van Horn, 1975), bahwa keterbatasan insentif federal merupakan salah satu kontributor utama kegagalan program.

3. Karakteristik badan Pelaksana

Perhatian pada agen pelaksana mencakup organisasi formal dan informal yang akan terlibat dalam pengimplementasian kebijakan. Hal ini penting karena kinerja implementasi kebijakan akan sangat dipengaruhi oleh karakteristik yang tepat serta cocok dengan agen pelaksanaannya. Beberapa kebijakan mungkin menuntut pelaksanaan kebijakan yang ketat dan disiplin, sementara kebijakan lain memerlukan agen pelaksanaan yang demokratis dan persuasif. Selain itu, cakupan atau luas wilayah juga menjadi pertimbangan penting dalam menentukan agen pelaksanaan kebijakan.

4. Komunikasi antar badan pelaksana.

Agar kebijakan publik bisa dilaksanakan dengan efektif, Van Meter dan Van Horn (dalam Widodo, 2007) menyatakan bahwa standar dan tujuan harus dipahami oleh individu yang bertanggung jawab atas pencapaian standar dan tujuan kebijakan. Oleh karena itu, standar dan tujuan kebijakan tersebut harus dikomunikasikan kepada para pelaksana kebijakan. Komunikasi dalam

penyampaian informasi kepada para pelaksana kebijakan tentang apa yang menjadi standar dan tujuan harus konsisten dan seragam dari berbagai sumber informasi.

5. Para pelaksana

Menurut Van Meter dan Van Horn (dalam Agustino, 2006), sikap penerimaan atau penolakan dari agen pelaksana kebijakan sangat mempengaruhi keberhasilan atau kegagalan implementasi kebijakan publik. Hal ini bisa terjadi karena kebijakan yang dilaksanakan bukanlah hasil formulasi warga setempat yang mengenal betul permasalahan yang mereka hadapi. Namun, kebijakan publik biasanya bersifat *top-down*, dimana para pengambil keputusan mungkin tidak mengatahui atau bahkan tidak mampu menyentuh kebutuhan, keinginan, atau permasalahan yang harus diselesaikan.

6. Lingkungan Sosial, Politik, dan Ekonomi.

Hal terakhir yang diperlukan untuk menilai kinerja implementasi kebijakan adalah sejauh mana lingkungan eksternal turut mendorong keberhasilan kebijakan publik. Lingkungan sosial ekonomi, dan politik yang tidak kondusif dapat menjadi sumber masalah kegagalan kinerja implementasi. Oleh karena itu, upaya implementasi lingkungan eksternal kebijakan masyarakat kondusif.

2.1.2.4 Program Bantuan Pangan Non Tunai Di Desa Moutong Tengah

Program Bantuan Pangan Non Tunai atau (BPNT) adalah program pemerintah untuk membantu keluarga kurang mampu dalam memenuhi kebutuhan pangan. Program Bantuan Pangan Non Tunai ini menyalurkan bantuan dalam bentuk uang elektronik melalui Kartu Keluarga Sejahtera (KKS). Berdasarkan

Peraturan Presiden Nomor 63 Tahun 2017 tentang penyaluran Bantuan Sosial secara Non Tunai adalah peraturan yang mengatur tentang penyaluran Bantuan Sosial secara Non Tunai kepada masyarakat Desa Moutong Tengah. Tujuan penyelenggaraan Bantuan Pangan Non Tunai yaitu mengurangi beban pengeluaran Keluarga Penerima Manfaat (KPM) yang ada di Desa Moutong Tengah melalui pemenuhan sebagian kebutuhan pangan, memberikan gizi yang lebih seimbang kepada Keluarga Penerima Manfaat (KPM), meningkatkan ketepatan sasaran dan waktu penerimaan bantuan pangan bagi Keluarga Penerima Manfaat (KPM), memberikan pilihan dan kendali kepada Keluarga Penerima Manfaat (KPM) dalam memenuhi kebutuhan pangan, dan mendorong pencapaian tujuan pembangunan berkelanjutan (*Sustainable Development Goals*).

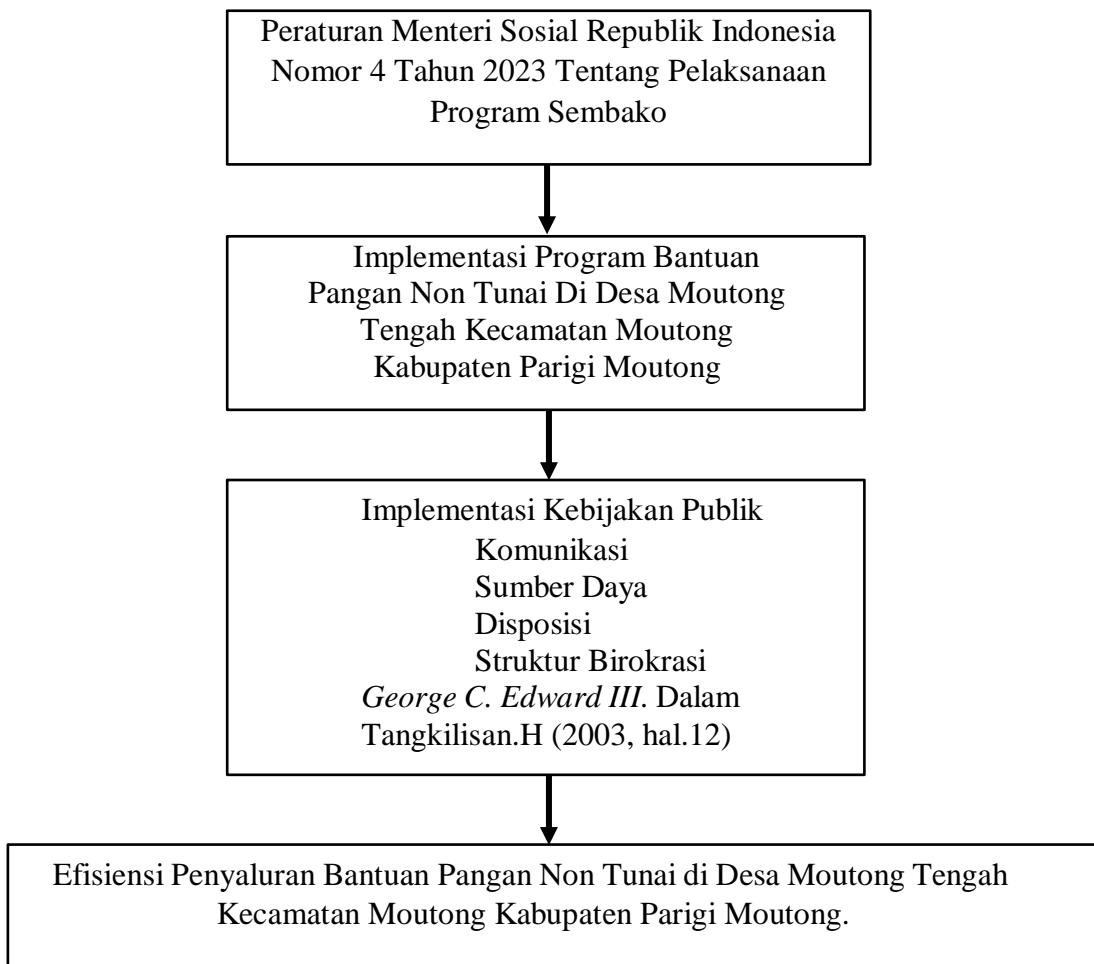
Regulasi pemerintah Indonesia tentang Bantuan Pangan Non Tunai yang diselenggarakan di Desa Moutong Tengah ini sudah ada sejak tahun 2017. Proses implementasinya itu memiliki prosedural yang harus dipenuhi oleh calon penerima bantuan antara lain memiliki KTP, golongan masyarakat miskin atau rentan miskin, bukan ASN, PNS, TNI, atau Polri, memiliki Kartu Keluarga Sejaterah (KKS), dan bukan pegawai swasta bergaji UMR.

Program Bantuan Pangan Non Tanai di Desa Moutong Tengah mulai berjalan pada tahun 2017. Program ini merupakan pengembangan dari program Raskin yang menggunakan sistem elektronik agar memudahkan masyarakat Desa Moutong Tengah. Pada tahun 2017 bantuan ini berupa beras, gula dan minyak goreng. Namun pada tahun 2025 Program Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) adalah senilai Rp200.000/KPM per bulan kepada penerima program Bantuan

Pangan Non Tunai melalui Kartu Keluarga Sejahtera (KKS). Dari 119 kepala keluarga penerima bantuan menggambarkan bahwa tingkat kesejahteraan masyarakat Desa Moutong Tengah dapat dikatakan masih sangat membutuhkan peran pemerintah lewat regulasinya untuk membantu memenuhi kebutuhan pokok melalui Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT).

2.2 Alur Pikir

Penelitian ini akan membahas Implementasi Program Bantuan Pangan Non Tunai di Desa Moutong Tengah Kecamatan Moutong Kabupaten Parigi Moutong. Pada penelitian ini menggunakan metode implementasi kebijakan dari *George C. Edward III* yang memiliki empat indikator didalamnya yaitu, komunikasi, sumber daya, disposisi, dan struktur birokrasi. Penelitian ini memiliki tujuan untuk mengetahui proses implementasi yang ada pada program Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) di Desa Moutong Tengah karena peneliti melihat adanya permasalahan terkait implementasi dari program bantuan yang diselenggarakan oleh pemerintah Desa Moutong Tengah, dimana hal ini berbanding tebalik dengan tujuan dari program Bantuan Pangan Non Tunai karena peneliti melihat adanya perbedaan antara tujuan implementasi program bantuan dengan fenomena yang terjadi dimasyarakat Desa Moutong Tengah. Karena tujuan dari program bantuan ini yaitu untuk memberikan kesejaterahan bagi masyarakat Desa Moutong Tengah untuk hasil akhir dari program bantuan yang diharapkan pemerintah selaku pemangku kebijakan. Adapun gambaran alur pikir dalam Implementasi Program Bantuan Pangan Non Tunai di Desa Moutong Tengah Kecamatan Moutong Kabupaten Parigi Moutong adalah sebagai berikut:



Gambar 2.2 Alur Pikir

BAB III

METODOLOGI PENELITIAN

3.1 Dasar dan Tipe Penelitian

3.1.1 Dasar Penelitian

Dasar penelitian yang digunakan dalam penulisan ini adalah metode penulisan kualitatif. Menurut Moleong (dalam Haris, 2010), penelitian kualitatif adalah penelitian ilmiah yang bertujuan untuk memahami suatu fenomena dalam konteks sosial secara alami dengan mengedepankan proses interaksi komunikasi yang mendalam antara peneliti dengan fenomena yang diteliti.

Metode penelitian kualitatif merupakan penelitian yang bersifat deskriptif serta cenderung menggunakan analisis. Proses dan makna atau perspektif subjek pada penelitian kualitatif lebih ditonjolkan, dibandingkan pada penelitian kuantitatif. Dalam penelitian kualitatif, landasan teori dimanfaatkan oleh peneliti sebagai pemandu, agar proses penelitian lebih fokus dan sesuai dengan fakta yang didapatkan. Penelitian kualitatif memiliki tujuan untuk menjelaskan suatu fenomena dengan sedalam-dalamnya dengan mengumpulkan data sedalam-dalamnya. Pada penelitian kualitatif, peneliti lebih menekankan pada kedalaman data yang didapatkan. Semakin dalam serta semakin detail yang diperoleh, maka semakin baik juga kualitas dari penelitian kualitatif.

3.1.2 Tipe Penelitian

Tipe penelitian yang digunakan penulis adalah tipe penulisan deskriptif dengan pendekatan kualitatif, yaitu tipe penelitian yang bertujuan untuk

menjelaskan berbagai situasi, kondisi, atau variabel yang muncul berdasarkan fakta yang ada.

Menurut Sugiyono (2013), jenis penelitian deskriptif merupakan penelitian yang dilakukan untuk menggambarkan nilai variabel mandiri, baik satu variabel atau lebih tanpa melakukan perbandingan. Metode penelitian deskriptif adalah suatu metode dalam melihat suatu kelompok manusia, objek, kondisi, sistem pemikiran, atau pun suatu kejadian pada masa sekarang.

Tujuan penelitian ini adalah untuk memberikan deskripsi, gambaran, atau lukisan secara sistematis, faktual, dan akurat mengenai fakta, sifat, serta hubungan antara fenomena yang diselidiki.

3.2 Definisi Konsep

Definisi konsep merupakan aktivitas peneliti dalam memberikan makna operasional terhadap konsep atau teori yang digunakan di dalam menjelaskan penelitiannya. Untuk mempermudah peneliti dalam melaksanakan penelitian Implementasi Program Bantuan Pangan Non Tunai di Desa Moutong Tengah Kecamatan Moutong Kabupaten Parigi Moutong. Maka peneliti menggunakan empat indikator yang dikemukakan oleh *George C. Edward III* yaitu Komunikasi, Sumber Daya, Disposisi, dan Struktur Birokrasi.

3.2.1 Komunikasi

Implementasi yang efektif baru akan tercapai apabila individu yang bertanggung jawab dapat memahami ukuran dan tujuan kebijakan Program Bantuan Pangan Non Tunai tersebut. Komunikasi merupakan proses penyampaian Program Bantuan Pangan Non Tunai kepada masyarakat Desa Moutong Tengah

yang sudah terdaftar dalam Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS), yaitu dengan cara koordinasi antara pemerintah Desa Moutong Tengah dan Keluarga Penerima Manfaat (KPM) yang dianggap berperan penting dalam Program Bantuan Pangan Non Tunai yang ada di Desa Moutong Tengah.

3.2.2 Sumber Daya

Sumber daya adalah suatu nilai potensi yang dimiliki oleh suatu materi atau unsur tertentu dalam kehidupan. Sumber daya tersebut, dapat berwujud sumber daya manusia, yakni kompetensi implementor dan sumber daya finansial. Adapun unsur sumber daya yang akan dilihat dalam penelitian ini adalah kemampuan sumber daya manusia dan sarana prasarana pendukung kebijakan Program Bantuan Pangan Non Tunai yang ada di Desa Moutong Tengah.

3.2.3 Disposisi

Disposisi adalah sikap yang harus dimiliki oleh pelaksana atau implementor yang ada di Desa Moutong Tengah, seperti komitmen, kejujuran dan sifat demokratis. Disposisi juga dapat diartikan bahwa pelaksana harus memiliki keinginan yang tulus untuk melaksanakan kebijakan seperti yang dikehendaki oleh pembuat kebijakan. Sikap profesional dan menjunjung tinggi nilai-nilai kejujuran merupakan sikap yang harus dimiliki para implementor dalam menjalankan proses implementasi program Bantuan Pangan Non Tunai di Desa Moutong Tengah.

3.2.4 Struktur Birokrasi

Struktur birokrasi yang diartikan sebagai organisasi atau tempat pelaksana implementasi kebijakan harus mendukung lancarnya pelaksanaan program Bantuan Pangan Non Tunai di Desa Moutong Tengah. Unsur yang dilihat dari

struktur birokrasi dalam penelitian ini adalah pembentukan struktur birokrasi, pembagian tugas dan wewenang dari pemerintah Desa Moutong Tengah dalam menyalurkan bantuan tersebut kepada Keluarga Penerima Manfaat (KPM). Agar bisa mempermudah proses penyaluran program Bantuan Pangan Non Tunai, dalam hal ini pemerintah Desa Moutong Tengah harus membuat Standar Operasional Prosedur (SOP) mengenai pelaksanaan Program Bantuan Pangan Non Tunai yang akan dilakukan guna agar lebih efektif dan efisien.

Dengan menerapkan indikator di atas, Implementasi Program Bantuan Pangan Non Tunai di Desa Moutong Tengah Kecamatan Moutong Kabupaten Parigi Moutong, bisa berjalan dengan efektif dan efisien.

3.3 Jenis Data

Menurut Sugiono (2008) data dibedakan menjadi data primer dan data sekunder, Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini yaitu:

1. Data primer yaitu data yang diperoleh secara langsung melalui wawancara dengan informan.
2. Data sekunder adalah data yang diperoleh dari informasi yang berasal dari tempat penelitian berupa data penerima bantuan, referensi dan arsip atau laporan-laporan berkala yang berkaitan dengan objek penelitian, dokumen profil desa dan fasilitas prasarana pemerintah Desa Moutong Tengah.

3.4 Sumber Data dan Teknik Pengumpulan Data

3.4.1 Sumber Data

Menurut *Lofland* dan *Lyon* yang dimaksud sumber data utama pada penelitian kualitatif adalah bukti-bukti dan tindakan, selebihnya merupakan data tambahan misalnya dokumen dan lain-lain. Oleh karena itu, data yang dipakai untuk menjawab pertanyaan yaitu diperoleh dari berbagai sumber, baik data primer maupun data sekunder.

3.4.1.1 Sumber Data Primer adalah Informan

Sumber data primer yang digunakan dalam penelitian ini adalah informan, data yang diambil dari beberapa informan yang berhubungan secara langsung dengan kegiatan program Bantuan Pangan Non Tunai di Desa Moutong Tengah. Teknik pengumpulan informan dilakukan dengan purposive menurut (Sugiyono, 2008) adalah teknik pengumpulan dengan pertimbangan tertentu sehingga data yang diperoleh lebih representative dengan melakukan proses penelitian yang kompeten dibidangnya. Penelitian ini dengan menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif, maka informan merupakan salah satu hal yang diperlukan dengan sangat penting dalam penelitian ini. Peneliti menentukan informan berdasarkan pada kriteria-kriteria tertentu yang disesuaikan dengan informan yang dibutuhkan dalam penelitian ini. Berdasarkan penelitian ini, peneliti menetapkan informan yang terlibat dalam program Bantuan Pangan Non Tunai di Desa Moutong Tengah adalah sebagai berikut:

1. Kepala Desa Moutong Tengah

Kepala Desa Moutong Tengah berperan penting dalam Program Bantuan Pangan Non Tunai yaitu mengidentifikasi Keluarga Penerima Manfaat (KPM) yang berhak mendapatkan bantuan tersebut, serta melakukan pengawasan

penyaluran Bantuan Pangan Non Tunai di Desa Moutong Tengah.

2. Sekretaris Desa Moutong Tengah

Sekretaris Desa Moutong Tengah berperan sebagai pengelola data Keluarga Penerima Manfaat (KPM), melakukan pengembangan Program Bantuan Pangan Non Tunai di Desa Moutong Tengah agar sesuai dengan kebutuhan masyarakat, dan mengawasi penyaluran Program Bantuan Pangan Non Tunai di Desa Moutong Tengah.

3. Operator Desa Moutong Tengah

Operator Desa Moutong Tengah berperan penting terhadap pelaksanaan Program Bantuan Pangan Non Tunai karena sebagai pendamping masyarakat dalam menerima bantuan yang di dapatkan masyarakat Desa Moutong Tengah.

4. Keluarga Penerima Manfaat

Keluarga Penerima Manfaat yang berada di dusun dua, karena dusun dua merupakan dusun dengan penerima paling banyak Bantuan Pangan Non Tunai dan Keluarga Penerima Manfaat yang berada di Dusun tiga, karena dusun tiga merupakan dusun yang paling sedikit menerima Bantuan Pangan Non Tunai.

3.4.1.2 Sumber Data Sekunder

Data Sekunder data merupakan data yang diperoleh dari informasi yang berasal dari Desa Moutong Tengah yang berupa data penerima bantuan, referensi dan arsip atau laporan berkala yang berkaitan dengan objek penelitian, dokumen profil desa dan fasilitas prasarana pemerintah Desa Moutong Tengah.

3.4.2 Teknik Pengumpulan Data

Menurut (Sugiyono, 2015:224) teknik pengumpulan data adalah cara yang

paling penting dalam penelitian karena tujuannya dari penelitian ialah memperoleh data, tanpa mengetahui teknik pengumpulan data maka penulis tidak akan memperoleh data yang memenuhi standar data yang ditetapkan. Dalam sebuah penelitian, data merupakan hal yang terpenting dan yang paling utama yang harus dipastikan keasliannya. Oleh sebab itu dalam pengumpulan data penelitian harus memiliki metode yang benar-benar sesuai dengan model penelitian yang akan dilakukan. Berikut adalah metode pengumpulan data yang akan di pakai dalam penelitian ini, yaitu:

a. Observasi

Nasution dalam (Sugiyono, 2008:310) menyatakan bahwa observasi merupakan ilmu pengetahuan. Para ilmuan hanya dapat bekerja berdasarkan data, yakni fakta mengenai dunia kenyataan yang diperoleh melalui observasi. Dengan melakukan pengamatan objek penelitian secara langsung. sehingga peneliti memperoleh gambaran data secara nyata dalam melakukan penelitian program Bantuan Pangan Non Tunai di Desa Moutong Tengah.

b. Wawancara

Metode wawancara adalah proses memperoleh data atau informasi dengan cara melakukan tanya jawab dengan Kepala Desa Moutong Tengah, sekretaris Desa, agen mitra penyalur dan Keluarga Penerima Manfaat (KPM). Wawancara adalah kegiatan tanya jawab secara lisan untuk memperoleh informasi. Bentuk informasi yang diperoleh dapat dinyatakan dalam tulisan, rekaman audio, visual atau audio visual. Wawancara merupakan kegiatan utama dalam kajian pengamatan. Pelaksanaan wawancara dapat bersifat langsung maupun tidak

langsung. Wawancara dilakukan oleh dua pihak, pihak pertama bertugas sebagai pewawancara atau orang yang mengajukan pertanyaan dan pihak kedua bertugas sebagai narasumber atau orang yang memberi jawaban atau tanggapan atas pertanyaan pewawancara.

c. Dokumentasi

Dokumentasi adalah sebuah cara yang dilakukan untuk menyediakan dokumen-dokumen dengan menggunakan bukti yang akurat dari pencatatan sumber-sumber informasi dalam melakukan penelitian program Bantuan Pangan Non Tunai di Desa Moutong Tengah.

3.5 Instrumen Penelitian

Instrumen penelitian adalah alat bantu yang digunakan oleh peneliti untuk mengumpulkan data penelitian. Data seperti apa yang akan digunakan, ditentukan oleh rumusan masalah penelitian yang diajukan. Dalam penelitian kualitatif, peneliti harus memiliki pemahaman mengenai penelitian kualitatif dan juga penguasaan terhadap bidang yang diteliti dan peneliti harus memiliki kesiapan dalam memasuki objek penelitian.

Sugiyono (2008) menjelaskan bahwa penelitian kualitatif instrumennya adalah orang atau human instrument, yaitu peneliti sendiri. Untuk dapat menjadi instrumen, peneliti harus memiliki bekal teori dan wawasan yang luas sehingga mampu bertanya, menganalisis, memotret, dan mengkonstruksi situasi sosial yang diteliti menjadi lebih jelas dan bermakna. Sesuai dengan pendekatan yang digunakan, maka instrumen yang dipakai untuk mengumpulkan data adalah peneliti sendiri.

Peneliti sebagai alat pengumpul data utama. Oleh karena itu kehadiran peneliti di lokasi penelitian mutlak diperlukan. Karena peneliti berperan sebagai perencana, pelaksana, pengumpul data dan akhirnya menyajikan hasil penelitian. Instrumen penelitian ini dilengkapi dengan lembar observasi, catatan lapangan, panduan wawancara. Untuk dapat menjadi instrumen, peneliti harus memiliki bekal teori dan wawasan yang luas sehingga mampu bertanya, menganalisis, memotret, dan mengkonstruksi situasi sosial yang diteliti menjadi lebih jelas dan bermakna.

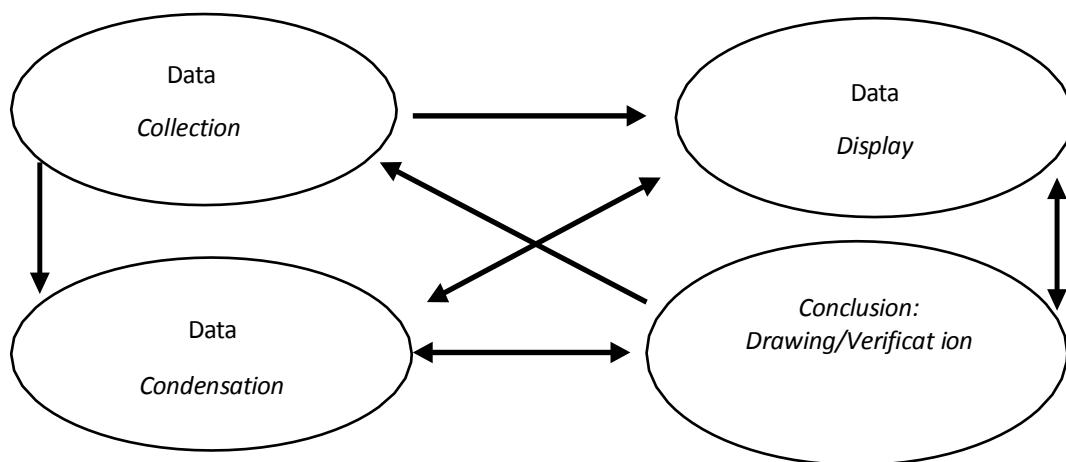
3.6 Analisis Data

Menurut Miles, Huberman dan Saldana (2014) menyebutkan bahwa analisis data dalam penelitian kualitatif dilakukan pada saat pengumpulan data berlangsung dan setelah selesai pengumpulan data dalam periode tertentu. Teknik analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis kualitatif, yaitu metode yang menggunakan sudut pandang peneliti sebagai alat analisis utama.

Analisis data merupakan upaya mencari dan menata secara sistematis catatan hasil observasi, wawancara dan lainnya untuk meningkatkan pemahaman peneliti tentang kasus yang diteliti dan menyajikannya sebagai temuan bagi orang lain. Adapun untuk meningkatkan pemahaman tersebut analisis perlu dilanjutkan dengan berupaya mencari makna dari berbagai aspek yang ditemui dengan mengkaji pendapat, pemikiran, persepsi dan interpretasi dari pihak-pihak yang dianggap kompeten terhadap masalah penelitian. Analisis data dilakukan secara induktif, dan penularannya didasarkan pada data yang cenderung bersifat verbal. Analisis data dalam penelitian kualitatif dilakukan sejak sebelum memasuki lapangan, selama di lapangan, dan setelah selesai di lapangan. Analisis telah mulai

sejak merumuskan dan menjelaskan masalah, sebelum terjun ke lapangan, dan berlangsung terus sampai penulisan hasil penelitian.

Menurut Miles, Huberman dan Saldana (2014) di dalam analisis data kualitatif terdapat tiga alur kegiatan yang terjadi secara bersamaan. Aktivitas dalam analisis data yaitu: Data *Condensation*, Data *Display*, dan *Conclusion Drawing/Verifications*.



Gambar 3.2: Model Miles, Huberman dan Saldana

Sumber: Miles, Huberman dan Saldana (2014. Hal 31-33)

Dari gambar model analisa data menurut Miles, Huberman dan Saldana (2014) diatas dapat dijelaskan sebagai berikut:

- Kondensasi Data (*Data Condensation*) Kondensasi data merujuk pada proses memilih, menyederhanakan, mengabstrakkan, dan atau mentransformasikan data yang mendekati keseluruhan bagian dari catatan-catatan lapangan secara tertulis, transkip wawancara, dokumen-dokumen, dan materi-materi empiris lainnya.
- Penyajian Data (*Data Display*) Penyajian data adalah sebuah pengorganisasian,

penyatuan dari infomasi yang memungkinkan penyimpulan dan aksi. Penyajian data membantu dalam memahami apa yang terjadi dan untuk melakukan sesuatu, termasuk analisis yang lebih mendalam atau mengambil aksi berdasarkan pemahaman.

- c. Penarikan Kesimpulan (*Conclusions Drawing*) Kegiatan analisis ketiga yang penting adalah menarik kesimpulan dan verifikasi. Dari permulaan pengumpulan data, seorang penganalisis kualitatif mulai mencari arti benda-benda, mencatat keteraturan penjelasan, konfigurasi-koritigurasi yang mungkin, alur sebab-akibat, dan proposisi.

3.7 Penentuan Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian ini dilakukan di Desa Moutong Tengah Kecamatan Moutong Kabupaten Parigi Moutong. Peneliti memilih lokasi tersebut sebagai lokasi penelitian karena lokasi tersebut merupakan objek kajian yang tepat dalam penelitian ini. Berdasarkan alasan tersebut, peneliti merasa tertarik untuk melakukan penelitian terkait dengan Program Bantuan Pangan Non Tunai di Desa Moutong Tengah Kecamatan Moutong Kabupaten Parigi Moutong.

3.8 Waktu dan Jadwal Penelitian

Waktu dan jadwal penelitian yang meliputi persiapan, pelaksanaan dan pelaporan waktu penelitian yang dilakukan di Desa Moutong Tengah Kecamatan Moutong Kabupaten Parigi Moutong.

BAB IV

DESKRIPSI WILAYAH LOKASI PENELITIAN

4.1 Gambaran Umum Desa Moutong Tengah

4.1.1 Sejarah Desa Moutong Tengah

Desa Moutong Tengah adalah bagian dari wilayah kecamatan moutong kabupaten parigi moutong yang dulunya masih merupakan bagian dari kampung moutong. Sejak terpecahnya kampung moutong menjadi 3 (tiga) Desa yaitu desa Moutong Timur, Desa Moutong Barat, dan Desa Moutong Tengah yang wilayahnya pada saat itu meliputi sampai dengan Desa Moutong Tengah. Posisi Desa Moutong Tengah menjadi sangat strategis baik dalam bidang perekonomian, pembangunan infrastruktur maupun sarana dan prasarana lainnya, sehingga lambat laun Desa Moutong Tengah mengalami perkembangan yang cukup pesat, di mana-mana di bangun fasilitas seperti jalan, kantor-kantor pemerintah, sekolah-sekolah, pasar dan lain sebagainya. Serta pada akhirnya Desa Moutong Tengah menjadi pusat Pemerintahan Kecamatan Moutong sampai dengan saat ini.

Seiring dengan perkembangan zaman yang didukung oleh kemampuan dalam berbagai bidang pembangunan, maka pada tahun 2003 Dusun Moutong Tengah pada waktu itu memekarkan diri menjadi satu Desa Pemekaran. Selanjutnya pada Tahun 2012 Desa Moutong Utara yang pada saat itu masih merupakan bagian dari Desa Moutong Tengah mekar menjadi satu Desa yang Definitif.

Tabel 4.1
Daftar Nama-Nama Kepala Desa Moutong Tengah

No	Nama Kepala Desa	Periode	Keterangan
1	Intje Lasarika	1968-1976	SK Bupati Donggala
2	Onggara	1976-1979	PJS
3	Moh. Ali M. Undin	1979-1982	SK Bupati Donggala
4	Muslaini Malasugi	1982-1984	PJS
5	Tamrin Pudi	1984-1989	PILKADES
6	Nurdin Tandebua	1984-1986	PJS
7	Tamrin Pudi	1986-1989	PILKADES
8	Moh. Ali M. Undin	1989-1994	PJS
9	Moh. Ali M. Undin	1994-1999	PILKADES
10	Moh. Arief Lasarika S.Sos	1999-2000	Pjbt
11	Hasanuddin S. MO'O	2000-2009	PILKADES
12	Moh. Ridwan Haka	2009-2015	PILKADES
13	Moh. Ridwan Haka	2016-2019	PILKADES
14	Elvis S.Pd	2019-2022	Antar Waktu
15	Moh. Ridwan Haka	2022-2028	PILKADES

Sumber: Profil Desa Moutong Tengah RPJMDES tahun 2022-2028

4.1.2 Kondisi Geografis Desa Moutong Tengah

Letak geografis Desa Moutong Tengah berjarak 1 kilometer dari pusat pemerintahan yang berada di kecamatan Moutong.

- Sebelah Utara** : Moutong Utara
- Sebelah Selatan** : Teluk Tomini
- Sebelah Timur** : Moutong Timur
- Sebelah Barat** : Moutong Barat

Desa Moutong Tengah merupakan desa cukup luas yang berada di kecamatan Moutong dengan luas wilayahnya $3,26 \text{ Km}^2$, dan secara monografi Desa Moutong Tengah menjadi 5 dusun yang terdiri dari dusun 1, dusun 2, dusun 3, dusun 4 dan dusun 5.

Tabel 4.2
Jumlah Penduduk Setiap Dusun

No	Dusun	Laki-Laki	Perempuan	Jumlah	Jumlah (KK)
1	Dusun 1	209	209	418	115
2	Dusun 2	247	235	482	147
3	Dusun 3	201	202	403	128
4	Dusun 4	166	174	340	118
5	Dusun 5	227	221	448	132
Jumlah		1.05	1.041	2.091	640

Sumber:(Per-Desember 2024, Sumber data Kasi Pemerintahan)

4.1.3 Kondisi Demografis Desa Moutong Tengah

a. Potensi Sumber Daya Alam (SDA)

1) Potensi Lahan Pertanian

Potensi lahan pertanian, Desa Moutong Tengah dengan luas Tanah 85,71 Ha yang terdiri dari tanah sawah seluas 5,15 Ha, Kawasan Campuran (Mixed Use) 9,26 Ha, Kawasan Ekosistem Mangrove 10,65 Ha, Kawasan Pendidikan 2,29 Ha, Kawasan Pengembangan Pemukiman 1,70 Ha, Kawasan Penggunaan Lainnya 1,15 Ha, Kawasan Pemukiman 37,82 Ha, Kawasan Kebun Kelapa 10,95 Ha, dan Kawasan Sungai 1,58 Ha. Sedangkan Lahan bukan sawah dikelompokkan menjadi pekarangan/bangunan, tegalan dan lain-lain.

Tabel 4.3
Luas Area Pembangunan Lahan Desa Moutong Tengah

No	Jenis Penggunaan Lahan	Luas (Ha)
1	Sawah	5,15
	a. Irigasi Teknis	-
	b. Irigasi ½ Teknis	-
	c. Tadah Hujan	-
2	Bukan Sawah	
	a. Pekarangan Bangunan	37,82
	b. Tegalan	-

	c. Lain-lain	42,75
--	--------------	-------

Sumber:(Per-Desember 2024, Sumber data Kasi Pemerintahan)

2) Tipologi Desa

Kondisi Tipografi, Desa Moutong Tengah memiliki relief daerah dataran, Desa Moutong Tengah merupakan salah satu desa yang tiang penyangga ekonominya berada pada sektor Pertanian dan Kelautan. Melihat kondisi seperti ini, maka jenis tanaman yang cukup produktif untuk dikembangkan adalah padi, kacang hijau, kedelai dan tanaman hortikultura yang meliputi bawang merah, ubi jalar serta Prasarana Kelautan yang menunjang dan mendukung Nelayan.

Sumber Daya Alam sangat bermanfaat bagi kehidupan makhluk hidup seperti tumbuhan, hewan dan manusia. Kenyataan yang ada sekarang ini sumber daya air di Desa Moutong Tengah pada musim kemarau terjadi kekeringan yang cukup tinggi dan pada musim penghujan sering terjadi banjir dan erosi.

Keadaan iklimnya adalah tropis dengan suhu rata-rata 29°C, suhu minimum 20°C dan suhu maksimum 36°C.

3) Orbitasi

- Jarak Ke Ibu Kota Provinsi : 345 Km
- Jarak Ke Ibu Kota Kabupaten : 315 Km
- Jarak Ke Ibu Kota Kecamatan : 1 Km

b. Potensi Sumber Daya Manusia (SDM)

1) Mata Pencaharian

Penduduk usia kerja adalah penduduk usia 15 tahun keatas. Jenis Mata Pencaharian di Desa Moutong Tengah dominan pada pekerjaan pertanian, jasa dan nelayan. Berikut disajikan data jenis Mata Pencaharian Penduduk umur 15

tahun keatas di Desa Moutong Tengah.

Tabel 4.4
Komposisi Penduduk Desa Moutong Tengah Umur 15 Tahun Keatas

No	Lapangan Pekerjaan	Jumlah (Orang)
1	Petani	476
2	Buruh Tani	70
3	Montir	25
4	Bidan/Perawat Swata	15
5	Penambang	100
6	Karyawan Perusahaan Pemerintah	50
7	Wiraswasta	75
8	Tidak Mempunyai Pekerjaan Tetap	254
9	Belum Bekerja	120
10	Pelajar	360
11	Ibu Rumah Tangga	521
12	Karyawan Honorer	25
	Jumlah	2.091

Sumber:(Per-Desember 2024, Sumber Data Sekretariat Desa)

2) Etnis Masyarakat

Tabel 4.5
Komposisi Penduduk Desa Moutong Tengah Menurut Etnis

No	Etnis/Suku	Jumlah
1	Tialo	1.021
2	Gorontalo	686
3	Sanger	35
4	Kaili	50
5	Jawa	149
6	Bugis	150

Sumber:(Per-Desember 2024, Sumber Data Sekretariat Desa)

4.2 Keadaan Sosial Budaya Desa

a. Kesehatan

1) Puskesmas dan sarana kesehatan lainnya

Desa Moutong Tengah tidak memiliki puskesmas namun jarak dari desa ke

puskesmas hanya 1 Km, dan Desa Moutong Tengah mempunyai Polindes yang dikelola oleh Bidan Desa serta di setiap dusun ada Posiyandu. Desa Moutong Tengah terdapat 5 Posiyandu, di setiap Dusun memiliki 1 Posiyandu.

2) Kesejahteraan Sosial

- Jumlah Keluarga Prasejahtera : 282 KK
- Jumlah Keluarga Sejahtera I : 468 KK
- Jumlah Keluarga Sejahtera II : 87 KK
- Jumlah Keluarga Sejahtera III : 34 KK
- Jumlah Keluarga Sejahtera III Plus : 26 KK

3) Kesenian dan Kebudayaan

- Group Qasidah : 3 grup
- Orkes Gambus : 1 grup

4) Sarana Ibadah

- Masjid : 3 buah
- Mushollah : 2 buah

4.3 Kondisi Ekonomi Desa

a. Perekonomian Desa

Perekonomian yang ada di Desa Moutong Tengah merupakan aset yang besar bagi pertumbuhan perekonomian penduduk Desa. Selain mayoritas penduduk sebagai petani, nelayan, dan jasa di Desa Moutong Tengah juga tumbuh usaha-usaha kerajinan, warung, toko, home industri, peternakan dan pertambangan.

b. Kemampuan Keuangan Desa

Kemampuan keuangan desa masih mengandalkan bantuan dari pemerintah

sementara untuk pendapatan asli desa dan bantuan pihak ketiga masih sangat minim.

c. Sarana dan Prasarana Perekonomian Desa

1. Sarana Jalan, Jalan Desa yang merupakan akses menuju pusat kota belum semua di aspal dan keadaanya banyak yang rusak. Demikian juga dengan jalan dusun belum semuanya di aspal.
2. Sarana Irigasi, Saluran irigasi yang ada di Desa Moutong Tengah sudah banyak yang rusak, sehingga fungsinya belum maksimal.
3. Sarana Telekomunikasi dan Informasi dengan banyaknya alat telekomunikasi yang ada seperti telepon genggam (HP), akses internet membuat komunikasi semakin lancar dan mudah. Disamping itu sebagian keluarga telah memiliki sarana TV, Komputer yang menjadikan pengetahuan perkembangan jaman semakin cepat. Untuk saat ini Desa Moutong Tengah belum memiliki media informasi internet.
4. Sarana Perekonomian

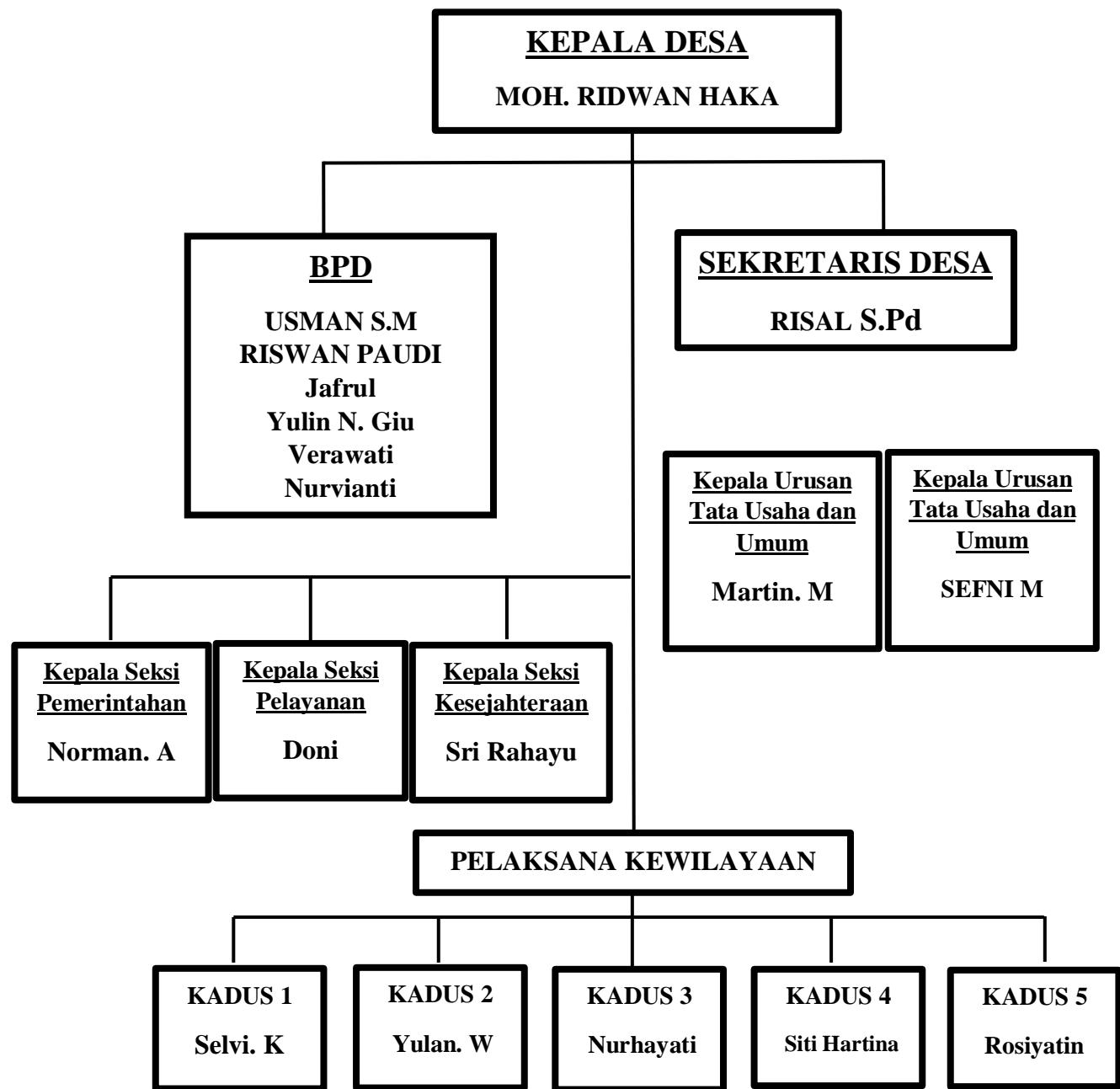
- Toko/Kios/Warung : 110 buah
- Alfamidi : 2 buah
- Indomaret : 1 buah

4.4 Struktur Organisasi Desa Moutong Tengah

Struktur Organisasi adalah merupakan kerangka hubungan antara satuan-satuan organisasi yang didalamnya terdapat pula dikatakan sebagai suatu sistem pembagian kerja secara teratur sebagai hal yang paling mendasar untuk mencapai efisiensi, efektifitas, dan produktifitas kerja sebab pembagian kerja yang transparan dapat menghindarkan pelaksanaan tugas organisasi yang tumpang

tindih. Berdasarkan uraian tersebut dapat disimpulkan bahwa untuk organisasi secara lengkap menggambarkan jalur atau arus hirarki antara satuan-satuan organisasi, para pejabat dan keberadaan pegawai.

Selain itu, struktur organisasi dapat di definisikan sebagai suatu sistem atau jaringan kerja terhadap tugas-tugas, sistem pelaporan dan komunikasi yang menghubungkan secara bersama pekerjaan individual dengan kelompok. Struktur organisasi merupakan suatu atribut yang menjadi kebutuhan bagi tiap organisasi manapun untuk memperlancar jalannya organisasi. Yang dimaksud struktur organisasi adalah suatu bagan organisasi atau seni grafik yang menunjukan keterangan yang pasti tentang fungsi-fungsi, pengelompokkan-pengelompokkan fungsi dan garis-garis tanggungjawab wewenang serta stabilitas dalam organisasi, lebih jelasnya dapat dilihat pada bagan struktur organisasi Desa Moutong Tengah sebagai berikut :



Gambar 4.1
Struktur Pemerintah Desa Moutong Tengah

Tata Kerja

1. Kepala Desa

- a. Menyusun dan merumuskan rencana dan program kerja di bidang pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan sebagai pedoman kerja.
- b. Melakukan korelasi tugas dengan instansi terkait dalam penyelenggaraan pemerintah desa, pelaksana pembangunan dan pembinaan kemasyarakatan sesuai ketentuan perundang-undangan yang berlaku.
- c. Melaksanakan tugas di bidang pembangunan dan pembinaan kemasyarakatan sesuai program yang ditetapkan untuk peningkatan kesejahteraan rakyat.
- d. Melaksanakan kegiatan dalam rangka pembinaan ketentraman, ketertiban, dan kebersihan lingkungan wilayah sesuai program yang ditetapkan guna meningkatkan keamanan masyarakat.
- e. Memberikan informasi, saran dan pertimbangan teknis pelaksanaan tugas kepada aparat desa.

2. Sekretaris Kepala Desa

- a. Mengkoordinasikan pelaksanaan fungsi urusan ketatausahaan, meliputi :
 - Tata naskah
 - Administrasi surat menyurat
 - Arsip
 - Ekspedisi
 - Pengundangan peraturan desa dalam lembaga desa
 - Pengundangan peraturan kepala desa serta peraturan bersama kepala desa dalam berita desa
- b. Mengkoordinasikan pelaksanaan fungsi urusan umum, meliputi :

- Penataan administrasi perangkat desa
 - Penyediaan prasarana perangkat desa dan kantor desa
 - Penyiapan rapat dan musyawarah desa
 - Pengadministrasian dan inventarisasi aset
 - Perjalanan dinas
 - Pelayanan umum
- c. Mengkoordinasikan pelaksanaan fungsi urusan keuangan, meliputi :
- Pengurusan administrasi keuangan
 - Administrasi sumber-sumber pendapatan dan pengeluaran
 - Verifikasi administrasi keuangan
 - Administrasi penghasilan tetap, tunjangan dan penghasilan lainnya yang sah bagi kepala desa dan perangkat desa
 - Administrasi tunjangan dan operasional DPD
- d. Mengkoordinasikan pelaksanaan fungsi urusan perencanaan, meliputi :
- Menyusun rencana pembangunan jangka menengah desa
 - Menyusun rencana kerja pemerintahan desa
 - Menyusun rencana anggaran pendapatan dan belanja desa
 - Menginventarisir data-data dalam rangka pembangunan
 - Melakukan monitoring dan evaluasi program
- e. Menyusun rancangan laporan penyelenggaraan pemerintah desa setiap akhir tahun anggaran, rancangan, laporan pentelenggaraan pemerintah desa akhir masa jabatan kepala desa, rancangan laporan keterangan pemerintah desa setiap akhir tahun anggaran, rancangan informasi penyelenggaraan pemerintah

desa setiap akhir tahun anggaran, rancangan informasi penyelenggaraan pemerintah desa secara tertulis kepada masyarakat desa setiap akhir tahun anggaran.

3. Seksi Pemerintahan

- a. Melaksanakan kegiatan administrasi kependudukan
- b. Mempersiapkan bahan-bahan untuk penyusun rancangan peraturan desa dan keputusan desa
- c. Melaksanakan kegiatan administrasi pertanahan
- d. Melaksanakan kegiatan penataan dan pengelolaan wilayah
- e. Mempersiapkan dan melaksanakan kegiatan penataan kelembagaan masyarakat bagi kelancaran penyelenggaraan pemerintah desa
- f. Mempersiapkan bahan dan agenda untuk penyelenggaran rapat BPD
- g. Mempersiapkan bahan dan melaksanakan kegiatan kemasyarakatan yang berhubungan dengan upaya menciptakan ketertiban dan pertahanan sipil
- h. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan sekretaris desa

4. Seksi Pelayanan

- a. Melaksanakan penyuluhan dan motivasi terhadap pelaksanaan hak dan kewajiban masyarakat
- b. Meningkatkan upaya partisipasi masyarakat
- c. Melaksanakan pelestarian nilai sosial budaya masyarakat
- d. Melaksanakan pembinaan keagamaan
- e. Melaksanakan fasilitas administrasi ketenagakerjaan di desa

5. Seksi Kesejahteraan

- a. Melaksanakan pembangunan sarana prasarana pedesaan, pembangunan bidang pendidikan dan pembangunan bidang kesehatan
- b. Melaksanakan fasilitas pemenuhan persyaratan perizinan sesuai kewenangan
- c. Melaksanakan pembinaan, sosialisasi serta motivasi masyarakat di bidang budaya, ekonomi, politik, lingkungan hidup, pemberdayaan keluarga, pemuda, olahraga dan karang taruna

6. Kepala Urusan Umum

- a. Melaksanakan menerima dan mengendalikan surat-surat masuk dan keluar serta melaksanakan tata kearsipan
- b. Pencatatan inventarisasi kekayaan desa
- c. Melaksanakan kegiatan administrasi umum
- d. Melaksanakan penyediaan penyimpanan dan pendistribusian alat-alat tulis kantor desa, serta pemeliharaan dan perbaikan peralatan kantor desa
- e. Mengelola administrasi perangkat desa
- f. Mempersiapkan bahan-bahan laporan baik berupa notulen rapat maupun bentuk-bentuk laporan lainnya yang menjadi kewajiban desa
- g. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan sekretaris desa

7. Kepala Urusan Keuangan

- a. Menghimpun, menggali dan menganalisa sumber pendapatan desa
- b. Mempersiapkan bahan penyusun APBN desa
- c. Mempersiapkan kegiatan administrasi keuangan desa

- d. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan sekretaris desa

8. Kepala Dusun

- a. Melaksanakan pembinaan ketentraman dan ketertiban, mobilitas kependudukan dan penataan serta pengelolaan wilayah
- b. Melaksanakan pengawasan pelaksanaan pembangunan di wilayahnya
- c. Melaksanakan pembinaan kemasyarakatan dalam meningkatkan kemampuan dan kesadaran masyarakat dalam menjaga lingkungannya

BAB V

HASIL DAN PEMBAHASAN

5.1 Hasil Penelitian

Kebijakan dapat di rumuskan sebagai tindakan pemerintah yang di tetapkan dalam undang-undang atau ketentuan lainnya dengan tujuan untuk merealisasikan maksud dari pemerintah dan di dalam kebijakan itu terdapat kepentingan publik yang dimotori oleh pemerintah. Beranjak dari pemahaman tersebut, maka lahirlah sebuah proses kebijakan yang di realisasikan dalam bentuk Implementasi Kebijakan. Kebijakan ini tentunya di dalam pelaksanaannya akan mengarah pada kepentingan masyarakat.

Untuk mengetahui bagaimana Implementasi Program Bantuan Pangan Non Tunai di Desa Moutong Tengah Kecamatan Moutong Kabupaten Parigi Moutong, Peneliti menggunakan teori George C. Edward III yang dimana terdapat empat indikator yang penting yaitu Komunikasi, Sumber Daya, Disposisi, dan Struktur Birokrasi.

Sesuai dengan tujuan penelitian untuk melihat implementasi Program Bantuan Pangan Non Tunai di Desa Moutong Tengah Kecamatan Moutong Kabupaten Parigi Moutong dengan memperhatikan indikator maka hasil wawancara dengan melibatkan beberapa informan yang di anggap mengetahui dan mengerti masalah-masalah yang akan di teliti. Setiap informan untuk memahami setiap karakter informan sehingga informasi yang diperoleh bersifat optimal.

Adapun informasi yang dilibatkan dalam penelitian ini terdiri dari Kepala Desa, Sekretaris Desa, Operator Desa dan penerima bantuan yang berjumlah 2 orang. Berdasarkan hasil wawancara dapat dijabarkan sebagai berikut :

5.1.1 Komunikasi

Salah satu unsur yang dapat mempengaruhi keberhasilan pelaksanaan sebuah kebijakan menurut George C. Edward dalam Tangkilisan adalah komunikasi. Komunikasi dalam konteks penelitian ini digunakan agar pelaksanaan kebijakan Program Bantuan Pangan Non Tunai dapat berjalan dengan baik. Komunikasi ini dilakukan oleh Desa Moutong Tengah, Kecamatan Moutong, Kabupaten Parigi Moutong untuk mengkomunikasikan kebijakan ini kepada masyarakat maka dalam penyampainya harus benar dan tepat agar masyarakat dapat memahami Program Bantuan Pangan Non Tunai. Dengan adanya komunikasi yang baik ini diharapkan para komponen pelaksana dalam hal ini adalah aparat diharapkan dapat memahami akan isi dan kejelasan dari kebijakan tersebut. Komunikasi dalam hal dimaksudkan meliputi tentang bagaimana kejelasan konsep kebijakan tersebut, kejelasan akan tujuan dan sasaran adanya perangkat aturan yang efektif.

Jika kebijakan ingin di implementasikan sebagai mana mestinya, maka petunjuk-petunjuk itu harus jelas. Jika petunjuk-petunjuk pelaksana itu tidak jelas, maka pelaksana (implementor) akan mengalami kebingungan tentang apa yang harus mereka lakukan. Selain itu, mereka juga akan mempunyai keleluasaan untuk memaksakan perundang-undangan atasan mereka atau perundang-undangan yang seharusnya dijadikan acuan.

Berdasarkan hasil penelitian tentang komunikasi yang dilakukan oleh pemerintah desa mengenai Implementasi Program Bantuan Pangan Non Tunai di Desa Moutong Tengah Kecamatan Moutong Kabupaten Parigi Moutong dengan Bapak Moh. Ridwan Haka selaku Kepala Desa Moutong Tengah, yang menyatakan bahwa:

“untuk Program Bantuan Pangan Non Tunai yang ada di Desa Moutong Tengah kami selaku pemerintah desa menggunakan cara penyampaian informasi secara lisan yang disampaikan langsung kepada kepala-kepala dusun di Desa Moutong Tengah, kemudian mereka yang melakukan pendataan masyarakat yang memiliki kualifikasi sebagai penerima Bantuan Pangan Non Tunai dengan cara mendatangi setiap rumah warga yang layak mendapatkan bantuan dengan kualifikasi yang ada.”(wawancara Bapak Moh. Ridwan Haka, 04 Juni 2025)

Berdasarkan wawancara dengan kepala Desa Moutong Tengah dapat diketahui bahwa benar tidak ada nya sosialisasi mengenai Program Bantuan Pangan Non Tunai, yang ada hanya di sampaikan langsung kepada masyarakat Desa Moutong Tengah bahwa mereka menerima Program Bantuan Pangan Non Tunai tersebut. Dan sampai sekarang masyarakat Desa Moutong Tengah masih banyak yang tidak mengetahui adanya bantuan tersebut.

Selanjutnya, hasil wawancara dengan Bapak Risal S.Pd selaku Sekretaris Desa Moutong Tengah, yang menyatakan bahwa:

“saya selaku sekretaris desa yang memiliki peran untuk mengawal keberlangsungan penyaluran Bantuan Pangan Non Tunai di Desa Moutong Tengah secara langsung dengan tujuan untuk memastikan proses penyaluran berjalan dengan efektif dan tepat sasaran. Memang benar adanya kami selaku aparat desa tidak melakukan penyampaian secara langsung kepada masyarakat tetapi bapak kepala desa menggunakan cara penyampaian melalui kepala-kepala dusun untuk melakukan pendataan secara langsung kepada masyarakat.”(wawancara Bapak Risal S.Pd, 11 Juni 2025)

Berdasarkan pernyataan dari sekretaris Desa Moutong Tengah dapat disimpulkan bahwa selama proses penyaluran Bantuan Pangan Non Tunai di Desa Moutong Tengah bahwa benar adanya sekretaris desa dan operator desa yang berperan sebagai pendamping Bantuan Pangan Non Tunai yang memantau langsung proses penyaluran program tersebut.

Selanjutnya, hasil wawancara dengan Bapak Sulman selaku Operator Desa Moutong Tengah, yang menyatakan bahwa :

“saya sebagai operator desa tentu memiliki tanggung jawab untuk melakukan penyampaian terkait informasi mengenai Program Bantuan Pangan Non Tunai ini sekaligus mengirimkan data masyarakat yang menerima bantuan kepusat data yang ada dikecamatan. Mengenai penyampaian informasi kepada masyarakat memang benar kami tidak melakukan sosialisasi sebagaimana yang disampaikan oleh bapak kepala Desa Moutong Tengah tetapi kami melakukan musyawarah desa yang dihadiri langsung oleh kepala-kepala dusun di Desa Moutong Tengah.”(wawancara Bapak Sulman, 11 Juni 2025)

Berdasarkan pernyataan dari operator Desa Moutong Tengah ketahui bahwa cara menyampaikan informasi dengan cara mempercayakan kepada kepala dusun untuk menyampaikan informasi ini sekaligus mereka yang mendata masyarakat yang kurang mampu. Untuk selanjutnya data penerima Bantuan Pangan Non Tunai akan muncul dalam Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS), akan tetapi pada bulan Juni 2025 akan di gantikan dengan Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional (DTESN) yang digunakan sebagai basis data utama dalam penyaluran program Bantuan Pangan Non Tunai.

Untuk memvalidasi kebenaran dari hasil wawancara dengan aparat desa diatas, peneliti memberikan pertanyaan yang sama kepada masyarakat penerima Bantuan Pangan Non Tunai yang menjadi informan.

Wawancara dengan masyarakat yang menerima Bantuan Pangan Non Tunai Ibu Astin Dama, yang menyatakan bahwa:

“sebelum saya mendapatkan Bantuan Pangan Non Tunai ini saya belum sama sekali memahami atau tidak tahu tentang apa itu Bantuan Pangan Non Tunai, karena saya hanya didatangi langsung oleh kepala dusun yang memberikan informasi bahwa adanya Program Bantuan Pangan Non Tunai untuk masyarakat yang kurang mampu. Kemudian kepala dusun mendata saya sebagai calon penerima Bantuan Pangan Non Tunai, yang dimana program bantuan ini sangatlah bermanfaat bagi kami untuk dipergunakan.”(wawancara Ibu Astin Dama, 14 Juni 2025)

Berdasarkan pendapat penerima Bantuan Pangan Non Tunai di Desa Moutong Tengah dapat disimpulkan masih banyak masyarakat Desa Moutong Tengah belum mengataui adanya bantuan tersebut karena mereka hanya menerima informasi dari Operator Desa saja bahwa mereka mendapatkan bantuan untuk di lengkapi berkasnya di kantor desa untuk proses penerimaan bantuan, akan tetapi tidak adanya sosialisasi yang dilakukan di Desa Moutong Tengah.

Selanjutnya pertanyaan serupa dengan masyarakat yang menerima Bantuan Pangan Non Tunai Ibu Rustin Musa, yang menyatakan bahwa:

“saya belum mendapat informasi tentang Program Bantuan Pangan Non Tunai ini karena tidak adanya sosialisasi atau pengumuman dari pihak aparat desa. Tetapi setelah saya didatangi oleh kepala dusun barulah saya mengetahui adanya Program Bantuan Pangan Non Tunai ini sekaligus kepala dusun melakukan pendataan terhadap diri saya untuk diajukan sebagai calon penerima Bantuan Pangan Non Tunai yang ia sampaikan kepada saya.”(wawancara Ibu Rustin Musa, 16 Juni 2025)

Hasil wawancara diatas dapat di simpulkan aspek komunikasi Program Bantuan Pangan Non Tunai belum berjalan dengan baik, dikarenakan para implementor program ini tidak terlalu memperhatikan pentingannya penyebaran informasi atau sosialisasi yang dilakukan tetapi diganti dengan hanya memberikan tugas kepada kepala dusun untuk mengerjakannya secara langsung dengan mendatangi rumah-rumah warga yang dianggap memiliki kualifikasi untuk menerima Program Bantuan Pangan Non Tunai ini.

Berdasarkan hasil penelitian bahwa memang benar tidak adanya sosialisasi mengenai program Bantuan Pangan Non Tunai di Desa Moutong Tengah dikarenakan masih kurangnya komunikasi yang dilakukan oleh pemerintah Desa Moutong Tengah untuk masyarakat yang ada di Desa Moutong Tengah itu sendiri. Hal ini mengakibatkan banyak masyarakat yang tidak mengetahui Program Bantuan Pangan Non Tunai yang diberikan oleh pemerintah pusat yang disebabkan minimnya informasi yang mereka ketahui.

Dari hasil wawancara dengan informan, terdapat perbedaan persepsi mengenai komunikasi yang dilakukan di Desa Moutong Tengah tersebut menurut pemerintah Desa Moutong Tengah sudah melakukan komunikasi dengan baik antara masyarakat yang menerima Bantuan Pangan Non Tunai di Desa Moutong Tengah akan tetapi tidak sesuai dengan yang disampaikan masyarakat penerima Bantuan Pangan Non Tunai mereka tidak mendapatkan pelayanan komunikasi yang baik karena mereka tidak mempunyai pendamping bantuan untuk tempat mereka menanyakan kapan pencairan bantuan tersebut. Seperti yang disampaikan informan penerima bantuan tersebut bahwa selama ini jika bantuan yang biasa

mereka dapatkan tidak cair, mereka hanya menunggu begitu saja tanpa adanya kejelasan dari pemerintah Desa Moutong Tengah.

Sehingga dapat di simpulkan bahwa indikator Komunikasi dalam penelitian ini belum sesuai dengan landasan hukum terhadap pelaksanaan Program Bantuan Pangan Non Tunai yang tertera pada Peraturan Menteri Sosial Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2023 Tentang Pelaksanaan Program Sembako Pasal 8 poin b yaitu “Edukasi dan sosialisasi”. Hasil kesimpulan ini diambil dari temuan yang ada pada saat wawancara dengan para informan dari proses penyebaran informasi yang belum sesuai dengan intruksi yang ada pada landasan hukum dan indikator komunikasi yang dikemukakan oleh George C. Edward III, yang menjelaskan Pemerintah Desa Moutong Tengah harus memberikan informasi kepada penerima akan tetapi tidak sesuai dengan hasil yang diharapkan masyarakat Desa Moutong Tengah.

5.1.2 Sumber Daya

Tingkat keberhasilan implementasi dapat dipengaruhi dan bergantung pada sumber daya manusia yang ada. Manusia adalah sumberdaya yang sangat penting untuk menentukan tingkat keberhasilan suatu implementasi kebijakan. Dan sumberdaya yang berkualitas adalah sesuai dengan kemampuan pada bidangnya.

Dalam Implementasi Program Bantuan Pangan Non Tunai di Desa Moutong Tengah yang menjadi komponen yang berperan aktif yaitu sumber daya yang meliputi panitia pelaksana, sarana dan prasarana untuk mencapainya tujuan dari pelaksanaan program tersebut. Untuk mengetahui apakah sumber daya sudah baik

dan berkualitas maka dapat dilihat dari hasil wawancara dari beberapa informan berikut.

Untuk lebih jelasnya berikut hasil wawancara peneliti dengan Bapak Moh. Ridwan Haka selaku kepala Desa Moutong Tengah, yang menyatakan bahwa:

“kemampuan sumber daya yang ada di Desa Moutong Tengah sendiri cukup baik dengan adanya unit-unit elektronik untuk kepentingan sudah cukup memadai, kami juga mempunyai operator desa yang cukup memahami cara pengelolaan data para penerima bantuan. Dari sisi sumber daya untuk saat ini dan selanjutnya kami akan menambahkan jumlah pegawai dikantor Desa Moutong Tengah untuk operator desa agar pekerjaan bisa lebih efektif.” (wawancara Bapak Moh. Ridwan Haka, 04 Juni 2025)

Berdasarkan pernyataan diatas diketahui bahwa sumber daya di Desa Moutong Tengah sudah cukup baik hanya saja dari fakta yang ada di masyarakat Desa Moutong Tengah belum mempunyai pendamping Program Bantuan Pangan Non Tunai di mana sekarang masih di urus pendamping Program PKH dan operator Desa. Berbeda dengan program bantuan lain yang ada di Desa Moutong Tengah sudah mempunyai pendamping program, akan tetapi Program Bantuan Pangan Non Tunai hanya di serahkan kepada operator desa yang mengurus Keluarga Penerima Bantuan (KPM).

Selanjutnya hasil wawancara dengan Bapak Risal S.Pd selaku Sekretaris Desa Moutong Tengah, yang mengatakan bahwa:

“kemampuan yang ada sekarang sudah cukup memadai, yang dimana ditunjang dengan fasilitas yang ada dikantor Desa Moutong Tengah untuk melakukan pekerjaan yang telah diberikan.”(wawancara Bapak Risal S.Pd, 11 Juni 2025)

Berdasarkan wawancara diatas diketahui bahwa sarana dan prasarana sudah cukup baik baik dari segi fasilitas umum, fasilitas pendukung dan infrastruktur di Desa Moutong Tengah sudah memadai.

Selanjutnya hasil wawancara dengan Bapak Sulman selaku Operator Desa Moutong Tengah, yang mengatakan bahwa:

“saya selaku operator desa sangatlah terbantu dalam menjalankan implementasi kebijakan yang ada dilakukan oleh Desa Moutong Tengah, karena fasilitas seperti alat elektronik, pengetikan, dan bangunan kantor desa membuat saya terbantu.” (wawancara Bapak Sulman 11 Juni 2025)

Berdasarkan pernyataan diatas operator desa sangat terbantu dengan adanya fasilitas yang mendukung dan memadai untuk melaksanakan tugas dan fungsi sebagai operator Desa Moutong Tengah.

Selanjutnya hasil wawancara dengan masyarakat yang menerima Bantuan Pangan Non Tunai Ibu Astin Dama, yang mengatakan bahwa:

“menurut pendapat saya sumber daya yang dimiliki sudah cukup baik dan didukung dengan fasilitas yang moderen dan lengkap. Dengan kemampuan dan sarana yang ada seharusnya pekerjaan dapat dengan mudah dikerjakan.” (wawancara Ibu Astin Dama 14 Juni 2025)

Pernyataan dari salah satu narasumber yang menerima bantuan memberikan penilaian yang positif terhadap fasilitas dan SDM yang ada pada pemerintahan Desa Moutong Tengah dalam menjalankan Proses Bantuan Pangan Non Tunai.

Selanjutnya hasil wawancara dengan masyarakat yang menerima Bantuan Pangan Non Tunai Ibu Rustin Musa, yang mengatakan bahwa:

“menurut saya sumber daya yang dimiliki belum cukup, karena masih banyak yang kurang di desa Moutong tengah baik dalam aparat desa, karena program Bantuan Pangan Non Tunai ini belum memiliki ketua penyalur bantuan karena masih masuk dalam bagian ketua penyalur PKH yang mengurus masalah program Bantuan Pangan Non Tunai.”(wawancara Ibu Rustin Musa 16 Juni 2025)

Berdasarkan pernyataan diatas dapat disimpulkan dari hasil wawancara dengan penerima bantuan pangan non tunai ini mempunyai pandangan yang berbeda, dari hasil penelitian ini membenarkan memang sumber daya manusia yang ada pada pemerintahan Desa Moutong Tengah belum memiliki banyak SDM yang bisa melaksanakan tugas sebagai ketua penyaluran bantuan. Dari karena itu pemerintah Desa Moutong Tengah memanfaatkan SDM yang ada untuk merangkap sebagai ketua penyaluran Bantuan Pangan Non Tunai di Desa Moutong Tengah.

Hasil wawancara dengan informan dan fakta yang ditemukan saat penelitian, serta data-data sebagai penguatan, penulis menyimpulkan bahwa dalam aspek sumber daya dapat diketahui sarana dan prasarana sudah cukup baik akan tetapi terdapat kekurangan dalam aspek ketersediaan staf yang memiliki keahlian dan keterampilan yang dibutuhkan dalam pelaksanaan penyampaian Program Bantuan Pangan Non Tunai. Hal ini menunjukkan bahwa dalam implementasi kebijakan Bantuan Pangan Non Tunai di Desa Moutong Tengah, masih terdapat hambatan yaitu masih terbatasnya staf yang tersedia dimana tugas pokok dan fungsi dalam implementasi Bantuan Pangan Non Tunai tersebut merupakan tanggungjawab dari bidang sosial dan kesejahteraan masyarakat.

Dapat disimpulkan dari hasil wawancara yakni sumber daya yang tersedia dipemerintahan Desa Moutong Tengah belum sepenuhnya dapat mendukung untuk proses implementasi kebijakan Program Bantuan Pangan Non Tunai. Karena sumber daya yang dimiliki Desa Moutong Tengah masih minim dari jumlah fasilitas dan prasarana serata masih kurangnya staf ahli dalam bidanganya yang bekerja di kantor Desa Moutong Tengah itu sendiri. Karena masih terdapat kekurangan dari segi jumlah tenaga ahli dan fasilitas tetapi pemerintah Desa Moutong Tengah belum sesuai dengan landasan hukum yang ada pada Peraturan Menteri Sosial Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2023 Tentang Pelaksanaan Program Sembako Pasal 21 BAB III yaitu “Pendampingan Program Sembako dilaksanakan oleh direktorat yang menangani Program Sembako dibantu oleh pendamping sosial.” dari hasil penelitian ini dapat disimpulkan indikator sumber daya pada penelitian ini belum sesuai dengan teori implementasi kebijakan yang dikemukakan oleh George C. Edward III, yang menjelaskan bahwa sumber daya dapat berwujud sumber daya manusia, yakni kompetensi implementor dan sumber daya finansial yang harus di miliki agar pelaksanaan penerimaan bantuan dapat berjalan dengan efisien.

5.1.3 Disposisi

Kejujuran mengarahkan implementor untuk tetap berada dalam ketentuan program yang telah digariskan, sedangkan komitmen yang tinggi dari pelaksanaan implementasi kebijakan akan membuat mereka selalu antusias dan inisiatif dalam menjalankan tugas , wewenang, fungsi dan tanggung jawab sesuai dengan peraturan yang telah ditetapkan. Dimana pelaksanaan Program Bantuan Pangan

Non Tunai sudah menjadi komitmen dan tanggung jawab para pelaksana implementasi kebijakan.

Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan peneliti Bapak Moh. Ridwan Haka selaku Kepala Desa Moutong Tengah, yang mengatakan bahwa:

“kejujuran dan komitmen itu adalah sikap yang harus dipegang teguh untuk menjalankan kebijakan Bantuan Pangan Non Tunai ini. Dalam menjalankan tugas ini kami akan berusaha semaksimal mungkin untuk kepentingan rakyat yang membutuhkan. Dan kami mengharapkan program ini bisa dapat membantu masyarakat yang benar membutuhkan dan tepat sasaran.”(wawancara Bapak Moh. Ridwan Haka 04 Juni 2025)

Berdasarkan pernyataan di atas saat penelitian diketahui bahwa benar pemerintah Desa Moutong Tengah sudah menjalankan tugas dan fungsinya dengan baik dengan memperhatikan masyarakat yang memiliki kepentingan.

Selanjutnya hasil wawancara yang dengan Bapak Risal S.Pd selaku Sekretaris Desa Moutong Tengah, yang mengatakan bahwa:

“dalam menjalankan program ini tentu bukan hal yang mudah. Tapi kami sebagai pemerintah Desa Moutong Tengah sudah berkomitmen dalam menjalankan tugas ini dan dengan jujur agar masyarakat merasa adil dan dapat marasakan kesejahteraan dari Bantuan Pangan Non Tunai ini.”(wawancara Bapak Risal S.Pd 11 Juni 2025)

Dari pernyataan diatas dapat disimpulkan pemerintah Desa Moutong Tengah memiliki sikap yang profesional dalam menjalankan tugas dengan maksimal untuk kepentingan pada masyarakat yang membutuhkan bantuan untuk memenuhi kebutuhannya.

Selanjutnya hasil wawancara dengan Bapak Sulman selaku Operator Desa Moutong Tengah, yang mangatakan bahwa:

“program Bantuan Pangan Non Tunai ini dilakukan dengan cara terbuka dan trasparan. Sebagai operator Desa Moutong Tengah yang bertugas dalam mengurus hal ini setiap data yang dimasukan oleh kepala dusun masing-masing sudah saya cek kembali dan mencocokannya dengan data masyarakat kurang mampu yang ada di Desa Moutong Tengah. Saya pribadi sudah melakukan tugas saya dengan jujur dan penuh komitmen untuk melayani masyarakat yang ada di Desa Moutong Tengah.”(wawancara Bapak Sulman 11 Juni 2025)

Dari pernyataan yang diberikan oleh operator desa Moutong Tenagah dapat disimpulkan bahwa sumber daya manusia yang dimiliki oleh pemerintah Desa Moutong Tengah memiliki sikap yang penuh dengan komitmen untuk menjalankan tugas dan perannya sebagai implementor dari kebijakan program yang diberikan oleh pemerintah pusat.

Selanjutnya wawancara dengan masyarakat penerima Bantuan Pangan Non Tunai Ibu Astin Dama, yang mengatakan bahwa:

“dalam hal ini saya sebagai masyarakat melihat bahwa pemerintah desa sudah menjalankan tugasnya dengan cukup baik, walaupun masih ada beberapa prosesnya belum maksimal seperti memberikan sosialisasi akan adanya hal seperti Bantuan Pangan Non tunai ini. Tujuannya adalah untuk memberikan masyarakat informasi dan bisa melihat pemerintahan yang ada di Desa Moutong Tengah itu sendiri memberikan informasi secara terbuka untuk masyarakatnya. Namun bagi saya selaku penerima bantuan ini juga berterimakasih terhadap pemerintah desa yang sudah memberikan saya bantuan ini untuk meringankan beban dan biaya yang saya rasakan.”(wawancara Ibu Astin Dama 14 Juni 2025)

Pernyataan diatas dapat disimpulkan bahwa kinerja yang diberikan oleh pemerintah sekaligus aparat Desa Moutong Tengah mendapat respon yang sangat baik dalam proses implementasinya. hal ini dapat meningkatkan kepercayaan publik terhadap pemerintahan Desa Moutong Tenagah itu sendiri.

Selanjutnya wawancara dengan masyarakat penerima Bantuan Pangan Non Tunai Ibu Rustin Musa, yang mengatakan bahwa:

“bagi saya pemerintah desa belum menjalankan tugasnya dan sesuai arahan dari pemerintah pusat. Memang benar adanya bahwa dalam hal penyampaian informasi dari pemerintah desa masih kurang baik karena tidak melakukan sosialisasi atau pengumuman secara langsung. Karena pada saat penerimaan bantuan saya tidak mendapat respon yang cepat dari aparat desa.”(wawancara Ibu rustin musa 16 Juni 2025)

Berdasarkan hasil wawancara diatas dapat disimpulkan bahwa pemerintah Desa Moutong Tengah belum menjalankan peran dan tugasnya dengan baik hal ini dapat dilihat dari respon masyarakat yang menerima Program Bantuan Pangan Non Tunai itu sendiri.

Sehingga dapat disimpulkan dari hasil penelitian, tingkat pelayanan di Desa Moutong Tengah ditanggapi cukup baik, namun masih terdapat fakta yang terjadi di Desa Moutong Tengah belum susuai ada pada landasan hukum yang tertulis pada Peraturan Menteri Sosial Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2023 Tentang Pelaksanaan Program Sembako Pasal 27 BAB IV yaitu “Pengaduan pelaksanaan Program Sembako dibentuk untuk menjamin prinsip keterbukaan dan akuntabilitas program kepada masyarakat.”. Hal yang sama juga dapat dikatakan belum sesuai dengan teori implementasi kebijakan yang dikemukakan oleh George C. Edward III, dimana setiap pelaksana atau implementor harus memiliki sikap kejujuran, komitmen, dan demokratis. Hal ini juga didukung oleh keterangan yang diberikan oleh masyarakat Desa Moutong Tengah yang menjadi penerima bantuan bahwa pemerintah Desa masih mempunyai sikap acuh tak acuh terhadap Program Bantuan Pangan Non Tunai.

5.1.4 Struktur Birokrasi

Hasil dari observasi yang peneliti lakukan, diketahui bahwasannya belum memiliki validasi yang nyata dalam implementasi kebijakan, hal ini dikarenakan belum optimalnya kordinasi yang dilakukan pemerintah desa Moutong Tengah dalam menjalankan proses implementasi program Bantuan Pangan Non Tunai. Tingkat validasi penting dalam mencapai keberhasilan pencapaian dari tujuan implementasi yang telah ditetapkan sebelumnya. Peneliti juga menyimpulkan dari temuan pada observasi bahwa implementasi program ini belum sepenuhnya berjalan dengan baik dan efektif karena dalam proses penerapannya sendiri tidak adanya informasi kepublik secara terbuka dan merata.

Hasil wawancara dengan Bapak Moh.Ridwan Haka selaku kepala Desa Moutong Tengah, yang menyatakan bahwa:

“kebijakan ini saya rasa sudah dijalankan sesuai standar oprasional yang diberikan dari pemerintah Kabupaten/Kota. Namun semua data yang kami kirimkan untuk para masyarakat yang menerima bantuan itu belum semuanya merasakan manfaat dari program itu sendiri yang dikarenakan adanya seleksi lanjutan yang dilakukan oleh pemerintah di Kabupaten/Kota.”(wawancara Bapak Ridwan Haka, 04 Juni 2025)

Berdasarkan pernyataan diatas menunjukan bahwa program kebijakan yang diberikan pemerintah pusat sudah dijalankan dengan standar oprasional yang diberlakukan. Walaupun belum semua masyarakat dapat merasakan manfaatnya secara langsung karenan adanya seleksi pada tingkat pusat untuk menentukan masyarakat sebagai bakal calon penerima program bantuan kebijakan ini.

Hasil wawancara dengan Bapak Risal S.Pd selaku sekretaris Desa Moutong Tengah, yang menyatakan bahwa:

“berjalannya program Bantuan Pangan Non Tunai ini sudah dalam standar oprasional prosedur yang ada, karena kami melakukan kordinasi dengan pemerintahan Kabupaten/Kota dalam menjalankan program ini. Namun tidak bisa dipungkiri dalam proses implementasi program ini ada banyak kendala masalah teknis yang kami alami, dan semua data yang kami kirimkan untuk menerima bantuan program ini masih diseleksi oleh pemerintah Kabupaten/Kota. Jadi hasilnya masih ada masyarakat yang belum bisa dapat merasakan manfaat langsung dari program Bantuan Pangan Non Tunai itu sendiri.”(wawancara Bapak Risal S.Pd 11 Juni 2025)

Berdasarkan pernyataan yang diberikan bapak sekretaris Desa Moutong Tengah diatas, walaupun standar oprasional yang sudah dijalankan sesuai dengan pedoman dari pemerintah pusat akan tetapi pada proses implementasinya masih saja menemui kendala, kendala yang dimaksudkan adalah kendala teknis untuk verifikasi data masyarakat yang diusulkan.

Hasil wawancara dengan Bapak Sulman selaku operator desa, yang menyatakan bahwa:

“program ini kami sudah jalankan sesuai dengan aran yang diberikan oleh pemerintah Kabupaten/Kota. Namun ada kendala yang sering kami alami karena banyaknya data yang dikembalikan kepada kami. Itu menyebabkan adanya masyarakat yang sudah kami data tetapi belum mendapatkan program bantuan ini.”(wawancara Bapak Sulman, 11 Juni 2025)

Berdasarkan pernyataan diatas memang benar adanya kendala teknis pada saat verifikasi data masyarakat penerima bantuan. Hal ini dikarenakan pemerintah pusat masih melakukan seleksi lanjutan untuk bakal calon penerima manfaat dari program kebijakan ini.

Selanjutnya hasil wawancara dengan masyarakat yang menerima Bantuan Pangan Non Tunai Ibu Astin Dama, yang menyatakan bahwa:

“saya menilai bahwa pemerintah Desa Muotong Tengah belum bisa menjalankan program Bantuan Pangan Non Tunai ini secara maksimal, hal ini terkait masyarakat yang belum bisa merasakan manfaat dari program bantuan yang diberikan oleh pemerintah pusat.”(wawancara Ibu Astin Dama, 14 Juni 2025)

Berdasarkan pernyataan dari penerima program kebijakan diatas dapat disimpulkan bahwa masyarakat belum cukup puas karena ada yang menerima bantuan dan ada yang belum bisa menerima dikarenakan seleksi lanjutan pada tahap verifikasi yang dilakukan pemerintah pusat terhadap bakal calon penerima bantuan yang diberikan.

Selanjutnya hasil wawancara dengan masyarakat yang menerima Bantuan Pangan Non Tunai Ibu Rustin Musa, yang mengatakan bahwa:

“menurut saya proses implementasi program bantuan ini belum maksimal bukan karena kenerja aparat Desa Moutong Tengah tetapi lebih ke pemerintah pusat yang dimana masih melakukan seleksi data masyarakat yang diajukan oleh aparat Desa Moutong Tengah yang menyebabkan masih banyaknya masyarakat dan tetangga saya belum bisa merasakan manfaat program BPNT.”(wawancara Ibu Rustin Musa, 16 Juni 2025)

Berdasarkan hasil wawancara diatas dapat disimpulkan bahwa pernyataan sebelumnya pada wawancara dengan informan yang berbeda dapat dikatakan identik. Dan sangat menyayangkan proses seleksi lanjutan yang menyebabkan adanya masyarakat yang belum dapat merasakan manfaat karena tidak lolos verifikasi data bakal calon penerima bantuan.

Dari hasil wawancara yang ditemukan oleh peneliti, dapat disimpulkan bahwa para aparat Desa Moutong Tengah sepakat dalam proses implementasi kebijakan mengatakan bahwa mereka sudah menjalankan program bantuan sesuai arahan dari pemerintah pusat. Akan tetapi pendapat lain diberikan oleh masyarakat yang mengatakan prosenya belum maksimal karna kurangnya

kordinasi sehingga proses penyaluran bantuan pangan non tunai belum terlaksana secara maksimal. Seperti yang tertulis dalam Peraturan Menteri Sosial Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2023 Tentang Pelaksanaan Program Sembako Pasal 25 BAB V yaitu “Pemantauan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk memastikan pelaksanaan Program Sembako dilakukan secara tepat waktu, tepat jumlah, dan tepat administrasi.” Hal ini belum sejalan dengan teori George C. Edward III yang menjelaskan pelaksana implementasi harus mendukung lancarnya pelaksanaan program dengan melakukan pembentukan struktur birokrasi, pembagian tugas dan wewenang dalam menyalurkan bantuan. Sehingga dapat disimpulkan struktur birokrasi di Desa Moutong Tengah belum sesuai dengan landasan hukum pada Peraturan Presiden yang menjelaskan mekanisme penyaluran Program Bantuan Pangan Non Tunai.

Tahun	Dusun	Jumlah
2024	1	26
2024	2	31
2024	3	12
2024	4	15
2024	5	23
2025	1	26
2025	2	37
2025	3	14
2025	4	17
2025	5	25

Sumber: SIKS-NG Desa Moutong Tengah Tahun 2024-2025

5.2 Pembahasan Penelitian

Implementasi kebijakan Program Bantuan Pangan Non Tunai berdasarkan program dan regulasi pemerintah untuk kepentingan masyarakat dan memberikan keringanan atas apa yang masyarakat alami dan rasakan. Tujuan dari kebijakan ini yaitu untuk memberikan bantuan secara nyata kepada masyarakat yang ada di

Desa Moutong Tengah dan untuk memberikan kesejahteraan bagi masyarakat di Desa Moutong Tengah terkhusus masyarakat yang kurang mampu dalam hal ekonomi.

Setelah melakukan analisis penelitian dari data wawancara. Implementasi kebijakan Program Bantuan Pangan Non Tunai di Desa Moutong Tengah belum sepenuhnya maksimal dalam proses implementasinya menurut teori yang dikembangkan oleh George C. Edward III. Peneliti akan mendeskripsikan implementasi program bantuan pangan non tunai yang dikembangkan oleh George C. Edward III dengan mengukur tingkat keberhasilan kebijakan bantuan pangan non tunai di Desa Moutong Tengah yang terdapat 4 indikator yang meliputi Komunikasi, Sumber Daya, Disposisi, dan Struktur Biroktasi.

Aspek Komunikasi, sasaran dan tingkat keberhasilan tujuan kebijakan ini untuk mencapai hasil yang maksimal. Tetapi tujuan dari kebijakan ini belum terlaksana secara maksimal. Hal ini dikarenakan oleh sistem dan cara penyebarluasan informasi yang dilakukan oleh para implementor yang berbasis di kantor desa Moutong Tengah. Implementor program bantuan ini hanya memberikan tugas kepada ketua-ketua dusun untuk mendata masyarakat yang mendapat program kebijakan ini secara langsung. Dalam proses pelaksanaan seperti ini belum sesuai dengan landasan hukum dan arahan dari pemerintah secara langsung karena peneliti menemukan keluhan dari masyarakat yang menyangkakan tidak adanya sosialisasi tentang program bantuan pangan non tunai ini di Desa Moutong Tengah, akibatnya masih banyak masyarakat yang layak untuk menerima bantuan ini tetapi tidak bisa merasakan manfaat dikarenakan

tidak memiliki informasi yang memadai. Hal ini secara langsung dapat menyimpulkan bahwa dalam proses implementasi kebijakan publik ini belum berjalan secara maksimal dan efektif karena didasari oleh tahapan prosedur yang telah ditetapkan oleh pemerintah pusat. Tidak adanya sosialisasi atau pengumuman dari pihak pemerintah desa mengakibatkan adanya ketidak adilan yang dirasakan oleh masyarakat yang seharusnya mendapatkan bantuan pemerintah tapi pada kenyataannya masyarakat tersebut tidak dapat merasakan bantuan tyang diberikan oleh pemerintah pusat.

Aspek Sumber Daya, pada proses implementasi program bantuan pangan non tunai ini sudah memiliki sumber daya manusia dan fasilitas untuk proses implementasi kebijakan. Adapun yang terlibat atau implementor kebijakan ini yaitu kepala desa, sekretaris desa, operator desa dan kepala-kepala dusun yang ada di Desa Moutong Tengah dan fasilitas yang dimiliki berupa 1 unit komputer, kantor desa serata sarana prasarana yang mendukung proses implementasi program kebijakan. Berdasarkan pengamatan dan fakta dilapangan masih kurangnya sumber daya manusia (aparat desa) yang memiliki keahlian dibidangnya, hal ini menyebabkan proses dalam penyaluran Bantuan Pangan Non Tunai ini masih memiliki kendala teknis dalam pengolahan data masyarakat penerima program Bantuan Pangan Non Tunai ini. Begitupun pada fasilitas yang tersedia di Desa Moutong Tengah yang belum memiliki kapasitas atau daya tampung ruangan untuk melakukan rapat atau pertemuan antara aparat desa dan para penerima program Bantuan Pangan Non Tunai yang ada di Desa Moutong Tengah. Temuan ini menjelaskan bahwa sumber daya yang ada belum

sepenuhnya memadai dan cukup efektif untuk melakukan implementasi program kebijakan ini.

Aspek Disposisi, sikap para pelaksana atau implementor dalam pelaksanaan kebijakan Program Bantuan Pangan Non Tunai yang diberikan pemerintah, hasil wawancara menyatakan bahwa para implementor ini sudah menjalankan peran dan tugasnya secara sistem yang diberikan oleh pemerintah pusat. Hal ini dapat dibuktikan dari hasil wawancara dengan masyarakat penerima Bantuan Pangan Non Tunai yang mengatakan bahwa aparat desa sudah menjalankan tugasnya sesuai dengan pedoman yang diberikan oleh pemerintah pusat. Tetapi disisi lain ada beberapa masyarakat yang kecewa akibat dari tindakan pemerintah desa yang tidak melakukan sosialisasi diruang publik untuk menyampaikan bahwa pemerintah pusat mengeluarkan regulasi kebijakan bahwa adanya bantuan yang diberikan. Hal ini memicu perspektif dari masyarakat itu sendiri bahwa pemerintah desa melakukan tindakan yang merugikan masyarakat itu sendiri karena tidak mengikuti prosedur dari pemerintah pusat yaitu melakukan sosialisasi diruang publik.

Aspek Struktur Birokrasi, dari hasil penelitian di Desa Moutong Tengah peneliti menemukan bahwa aparat Desa Moutong Tengah sudah menjalankan Prosedur implementasi yang diberikan oleh pemerintah pusat secara maksimal. Akan tetapi cara yang maksimal dilakukan oleh aparat Desa Moutong Tengah tidak dapat memberikan atau menyalurkan bantuan ke semua masyarakat yang mereka daftarkan, karena data masyarakat yang mereka kirim ke pusat data itu tidak semua masyarakat yang terdaftar dapat merasakan manfaat program

kebijakan ini. Hal ini dikarenakan pemerintah pusat masih melakukan seleksi terhadap penerima Program Bantuan Pangan Non Tunai. Dapat dikatakan juga hal ini disebabkan kurangnya kordinasi berkelanjutan antara aparat Desa Moutong Tengah dengan pemerintah pusat. Hasil observasi juga menemukan fakta bahwa bukan hanya kurangnya kordinasi tetapi pemerintah desa Moutong Tengah tidak melakukan sosialisasi mengenai bantuan yang diberikan oleh pemerintah pusat, hal ini yang membuat sebagian masyarakat yang kecewa atas langkah yang diambil oleh pemerintah di Desa Moutong Tengah.

Dari keempat inikator penentu keberhasilan program kebijakan pemerintah yang diperoleh dari hasil wawancara keseluruhan dan observasi penyaluran Program Bantuan Pangan Non Tunai di Desa Moutong Tengah peneliti menyimpulkan masih belum efisien penyaluran di desa Moutong Tengah dalam:

1. Ketepatan Sasaran

Ketepatan sasaran program dikarenakan masih banyak masyarakat yang masih belum menerima bantuan tersebut padahal sudah memenuhi kriteria dari penerimaan bantuan Bantuan Pangan Non Tunai. Pengawasan program perlu dipantau lebih jauh seperti pihak pemerintah update terhadap data informasi tentang kondisi keluarga penerima manfaat (KPM). Data penerimaan yang diusulkan oleh operator desa dan perangkat desa dan langsung terpusat masih belum terealisasikan dengan cepat dan secara maksimal yang menyebabkan

masyarakat yang berhak mendapatkan harus menunggu dan bahkan tidak mendapatkan bantuan.

Kurangnya ketepatan sasaran ini mengakibatkan kecemburuan sosial. Ada juga keluarga yang sudah dikatakan mampu namun masih menerima program Bantuan Pangan Non Tunai, hal ini karena program Bantuan Pangan Non Tunai ini masih menggunakan data lama sehingga keluarga yang dulunya tidak mampu sekarang sudah mampu masih mendapatkan program Bantuan Pangan Non Tunai dan masih banyak juga keluarga yang sudah mampu tetapi tidak sadar atau tidak mengetahui tujuan adanya program Bantuan Pangan Non Tunai ini jadi mereka tidak ingin melepasnya karena tidak ada orang yang tidak ingin mendapatkan sesuatu yang gratis sekalipun keluarganya sudah mampu. Hal ini sejalan dengan hasil penelitian (Thalia, 2020) yang menunjukkan bahwa Ketepatan sasaran penerima bantuan program Bantuan Pangan Non Tunai masih kurang tepat dikarenakan pembaharuan data masyarakat miskin yang belum efisien.

2. Tepat Waktu Penyaluran

Pelaksanaan pencairan Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) dilakukan pada bulan Januari sebagai titik awal program ini. Pemerintah berusaha memberikan kepastian dan dukungan yang berkesinambungan kepada keluarga-keluarga berpenghasilan rendah di seluruh negeri, memulai tahun dengan langkah positif dalam memerangi kemiskinan. Untuk tahun fiskal 2025, pemerintah telah mengalokasikan dukungan finansial sejumlah Rp 200.000 per bulan kepada setiap

keluarga yang terdaftar sebagai penerima manfaat dari program ini. Selama periode satu tahun, setiap keluarga akan menerima total dukungan finansial sebesar Rp2,4 juta. Sejalan dengan hasil penelitian (Kuswatun, 2020) bahwa efektivitas program bantuan pangan non tunai telah dicairkan sudah tepat waktu, adapun jika terjadi keterlambatan disebabkan oleh jaringan/server eror. Berbeda dengan hasil penelitian Dedi, Budi, (2021) bahwa ketepatan waktu penyaluran dana masuk ke Kartu Keluarga Sejahtera (KKS) dalam Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) dalam kategori belum tepat waktu setiap akhir bulan mengalami keterlambatan pada tanggal yang tidak menentu misalnya terjadi tanggal 26,27,28 yang diakibatkan oleh gangguan jaringan dalam menerima bantuan dana, maka dapat dikatakan dalam ketepatan waktu ini belum efektif, begitu pula dengan hasil penelitian (Thalia, 2020) juga menjelaskan Ketepatan waktu pencairan dana program Bantuan Pangan Non Tunai kepada Keluarga Penerima Manfaat (KPM) masih kurang baik karena sering mengalami keterlambatan penyaluran bantuan. Bantuan disalurkan secara non tunai dengan sistem perbankan melalui Kartu Keluarga Sejahtera. Kartu elektronik ini berfungsi untuk pengambilan bahan pangan seperti bisa digunakan untuk memperoleh beras, telur, dan bahan pokok lainnya. Masyarakat akan menerima uang sebesar Rp 200.000/bulan yang dibagikan dalam dua bulan sekali. Sehingga, dalam satu tahun, ada 6 tahap penyaluran. Jadi, Keluarga Penerima Manfaat (KPM) akan menerima Rp 400.000 dalam sekali pencairan. Namun Terkait jadwal cair Bantuan Pangan Non Tunai 2025 kita tidak dapat memastikan jadwal pencairan melalui web site resmi Kementerian sosial.

3. Pengawasan

Pengawasan di tingkat desa dilakukan oleh aparatur Pemerintah Desa yang bertanggung jawab atas pelaksanaan program Bantuan Pangan Non Tunai di wilayah mereka. Pengawasan dilakukan satu kali dalam setahun, mengikuti pedoman yang telah ditetapkan oleh otoritas terkait. Tujuan dilaksanakan pengawasan adalah untuk memastikan bahwa bantuan Bantuan Pangan Non Tunai benar-benar sampai kepada pihak-pihak yang berhak menerima sesuai dengan kriteria yang telah ditetapkan dan mengevaluasi perkembangan dan pelaksanaan program di desa untuk mengidentifikasi dan mengatasi masalah yang muncul selama penyaluran bantuan. Pemerintah Desa melakukan verifikasi data penerima bantuan untuk memastikan keakuratan dan kelayakan penerima.

Pengawasan lapangan dilakukan untuk memantau proses distribusi bantuan dan memastikan tidak ada penyelewengan atau penyimpangan. Tantangan yang dihadapi dalam Pengawasan adalah kurangnya Pemahaman di kalangan aparat desa mengenai ketentuan dan kriteria penerima Bantuan Pangan Non Tunai, yang menyebabkan kesalahan dalam penentuan penerima bantuan. Karena ada praktik keberpihakan, di mana keluarga dari pejabat desa lebih diprioritaskan untuk menerima bantuan dibandingkan masyarakat yang tidak memiliki hubungan keluarga dengan aparat desa. Selain itu, Keterbatasan Sumber Daya. Pemerintah Desa sering kali menghadapi keterbatasan sumber daya dalam melakukan pengawasan yang efektif, baik dari segi tenaga kerja maupun anggaran. Oleh karena itu, maka dampak dari pengawasan yang Tidak Optimal adalah Banyak masyarakat yang seharusnya berhak menerima bantuan Bantuan Pangan Non

Tunai tidak mendapatkannya, yang berpotensi menimbulkan ketidakpuasan dan konflik sosial di tingkat desa. Dengan demikian, meskipun pengawasan program Bantuan Pangan Non Tunai di desa telah dilaksanakan oleh Pemerintah Desa, perlu adanya peningkatan pemahaman mengenai ketentuan penerima bantuan dan upaya untuk mengurangi praktik keberpihakan agar program ini dapat berjalan lebih efektif dan tepat sasaran. Sesuai dengan Teori Implementasi Kebijakan Model *Top-Down* dan *Bottom-Up*. Menurut (Winarno, 2017) teori implementasi kebijakan, model top-down menekankan pentingnya arahan yang jelas dari pemerintah pusat dan ketaatan di tingkat lokal. Sedangkan model bottom-up menekankan pentingnya masukan dari tingkat lokal dalam penerapan kebijakan. Dalam konteks Bantuan Pangan Non Tunai, kombinasi kedua pendekatan ini diperlukan untuk memastikan kebijakan diimplementasikan secara efektif di desa.

Pengawasan yang efektif atas program Bantuan Pangan Non Tunai membutuhkan transparansi dalam proses seleksi penerima dan akuntabilitas aparat desa untuk menghindari keberpihakan keluarga. Sebab fungsi transparansi dalam administrasi publik mengacu pada aksesibilitas informasi bagi masyarakat dan kejelasan proses administratif (Holzner & Holzner, 2006). Dengan meningkatkan transparansi dalam penyaluran Bantuan Pangan Non Tunai, masyarakat dapat lebih mudah memantau dan mengawasi distribusi bantuan.

Sesuai dengan hasil Penelitian oleh Hanna and Olken (2018) menunjukkan bahwa program bantuan sosial sering kali tidak mencapai sasaran karena berbagai bentuk korupsi dan ketidaktepatan data penerima. Ini sejalan dengan temuan

bahwa keberpihakan keluarga di desa dapat menghambat distribusi yang adil dari Bantuan Pangan Non Tunai.

Senada juga dengan hasil penelitian M. Hidayat, (2019) bahwa pelaksanaan program Bantuan Pangan Non Tunai belum berjalan dengan baik karena masih terdapat kendala di tingkat pemerintahan bawah yang belum mengoptimalkan pelaksanaan program Bantuan Pangan Non Tunai dengan lancar karena masih banyak masyarakat kurang mampu yang belum terdaftar sebagai penerima bantuan. Hal tersebut terjadi karena adanya praktik keberpihakan keluarga.

Menurut teori kapital sosial oleh Bourdieu (1986), hubungan sosial dan jaringan dapat mempengaruhi akses individu terhadap sumber daya. Di desa, keberpihakan keluarga menunjukkan adanya kapital sosial yang menguntungkan kelompok tertentu, sehingga menghambat keadilan dalam distribusi bantuan. Praktik keberpihakan keluarga bertentangan dengan prinsip keadilan sosial dan menuntut adanya reformasi dalam proses pengawasan Bantuan Pangan Non Tunai. Maka untuk mengurangi keberpihakan keluarga, perlunya partisipasi masyarakat secara merata dalam proses pengambilan keputusan dan pengawasan dapat meningkatkan akuntabilitas dan efektivitas program. Dengan meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pengawasan Bantuan Pangan Non Tunai, potensi untuk mengurangi keberpihakan dan meningkatkan keadilan distribusi bantuan akan lebih besar.

BAB VI

KESIMPULAN DAN SARAN

6.1 Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa Implementasi Program Bantuan Pangan Non Tunai di Desa Moutong Tengah Kecamatan Moutong Kabupaten Parigi Moutong belum terlaksana dengan efektif. Masalah utama bukan pada aturan atau kebijakan yang belum tersedia, tetapi pada pelaksanaannya yang belum efektif di Desa Moutong Tengah.

Untuk memastikan implementasi program non-tunai yang efektif, penting untuk menjaga kesadaran sosial di antara semua pemangku kepentingan, secara teratur memperbaiki data, dan meningkatkan tata kelola di Kabupaten dan Desa yang terkait dengan program, validitas dan transparansi data. Agar pelaksanaan program bantuan pangan non tunai dapat efektif, maka perlu adanya sosialisasi kembali kepada seluruh kelompok sasaran tentang siapa saja yang berhak menerima bantuan. Di satu sisi Perlunya perbaikan data secara periodik sehingga seluruh masyarakat yang berhak menerima dapat merasakan manfaat dari Bantuan Pangan Non Tunai. Adapun diharapkan akan ada peningkatan pengawasan di tingkatan Kabupaten dan tingkatan desa terkait dengan pelaksanaan program Bantuan Pangan Non Tunai termasuk memvalidasi data penerima dan yang belum menerima Bantuan Pangan Non Tunai, serta dapat menerapkan prinsip keadilan dan transparan sehingga pelaksanaan program Bantuan Pangan Non Tunai benar-benar tepat sasaran dan dapat dirasakan oleh seluruh masyarakat yang berhak menerima.

Secara umum, indikator Komunikasi menunjukan, bahwa masih banyak masyarakat yang tidak mengetahui dan mengerti dengan Program Bantuan Pangan Non Tunai yang diselenggarakan oleh pemerintah untuk membantu masyarakat kurang mampu yang ada di Desa Moutong Tengah. Hal ini disebabkan tidak adanya sosialisasi atau pengumuman terhadap Program Bantuan Pangan Non Tunai itu sendiri. Dari indikator Sumber Daya menunjukan, bahwa masih ada sumber daya manusia yang belum memiliki keahlian, kewenangan masih belum diberikan sepenuhnya. Dan masih belum mencukupi, begitu pun sarana dan prasarana yang belum bisa menunjang baik untuk proses implementasi yang dilakukan oleh aparat Desa Moutong Tengah. Dari indikator Disposisi menunjukan, sikap dan tanggung jawab yang belum cukup baik dalam menjalankan amanah dari pemerintah, karena belum sesuai dengan tugas pokok yang diberikan. Di sisi lain indikator Struktur Birokrasi menunjukan, bahwa belum adanya keterpaduan yang baik antara aparat Desa dalam pelaksanaan tugas akibat kurangnya koordinasi.

6.2 Saran

1. Pemerintah Kecamatan dan Desa perlu untuk memberikan sosialisasi dan edukasi lagi kepada masyarakat Desa Moutong Tengah tentang Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT).
2. Pemerintah setempat perlu mengevaluasi mengenai pemanfaatan yang dilakukan oleh masyarakat, sehingga bantuan ini dimanfaatkan sesuai kebutuhan sehari-hari.
3. Pemerintah Desa Moutong Tengah harus lebih teliti dalam memilih

masyarakat yang berhak menerima bantuan, yang nantinya ditambahkan ke dalam Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional (DTSEN).

4. Pemerintah Desa Moutong Tengah harus mempunyai penanggung jawab Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT), agar mempermudah masyarakat dalam menanyakan tentang program Bantuan Pangan Non Tunai.

Waktu dan Jadwal Penelitian

	Kegiatan	Alokasi Waktu (Minggu)																							
		Bulan 10				Bulan 1				Bulan 4				Bulan 5				Bulan 6							
		1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4
1	Survey Awal dan Penentuan Lokasi Penelitian	■	■																						
2	Persiapan			■	■																				
3	Penentuan Topik Penelitian				■	■																			
4	Penyusunan Proposal					■	■	■																	
5	Konsultasi dan Bimbingan								■	■	■														
6	Seminar Proposal											■													
7	Perbaikan Hasil Proposal												■	■	■	■									
8	Pengurusan Izin Penelitian																■								
9	Penelitian																	■	■	■	■				

No	Kegiatan	Alokasi Waktu (Minggu)																							
		Bulan 10				Bulan 1				Bulan 4				Bulan 5				Bulan 6				Bulan 8	Bulan 9	Bulan 10	
		1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4				
1	Survey Awal dan Penentuan Lokasi Penelitian		■																						
2	Persiapan			■	■																				
3	Penentuan Topik Penelitian				■	■																			
4	Penyusunan Proposal					■	■																		
5	Konsultasi dan Bimbingan									■	■	■													
6	Seminar Proposal										■														
7	Perbaikan Hasil Proposal										■	■	■												
8	Pengurusan Izin Penelitian													■											
9	Penelitian													■	■	■	■								
10	Seminar Hasil																	■							
11	Perbaikan Hasil																	■	■	■	■				
12	Sidang Skripsi																					■			
13	Perbaikan Skripsi																					■	■		

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

- Adi, Isbandi Rukminto. 2003. *Pemberdayaan, Pengembangan Masyarakat dan Intervensi Komunitas (Pengantar Pada Pemikiran dan Pendekatan Praktis)*. Cet. I. Jakarta: Lembaga Penerbit FEUI
- Harbani, P. (2016). Teori Administrasi Publik (7 ed.). CV.ALFABETA.
- Henry, Nicolas, 2004. *Public administration & public affairs, ninth edition*. New Jersey: Person Prentice Hall.
- Keban, Y. T. (2014). *Enam dimensi strategis administrasi publik: konsep, teori dan isu*. Yogyakarta: Gava Media.
- Haris, H. (2010). Metodologi penelitian kualitatif untuk ilmu-ilmu sosial. *Jakarta: Salemba Humanika*, 8, 131.
- Miles, Matthew B., A. Michael Huberman., & Johnny Saldaña. (2014). *Qualitative Data Analysis: A Methods Sourcebook and The Coding Manual for Qualitative Researchers*. Thousand Oaks, CA: SAGE.
- Moleong, Lexy J. 2011. *Metode Penelitian Kualitatif edisi Revisi*. Bandung: PT. Remaja Rosdakarya
- Mulyadi, D. (2015). *Study Kebijakan Publik dan Pelayanan Publik* Bandung: Alfabeta. Perangin: Bandung.
- Panji, S. (2008). *Administrasi Publik, Teori, Dan Aplikasi Good Governance*. Redaksi Refika.
- Pasolong, H. (2008). *Kepemimpinan birokrasi*. Bandung: CV Alfabeta. Syafiee,
- I. K. (2006). *Ilmu Administrasi Publik*. Rineka Cipta: Jakarta.
- Pasolong. (2019). Teori Admnistrasi Publik. *Angewandte Chemie International Edition*, 6(11), 951–952., 3(1), 10–27.

- Sugiyono, D. (2008). *Metode Penelitian Pendidikan Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*. Bandung: Alfabeta.
- Sugiyono, D. (2010). *Metode Penelitian Pendidikan Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*. Bandung: Alfabeta.
- Sugiyono, D. (2013). *Metode Penelitian Pendidikan Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*. Bandung: Alfabeta.
- Sugiyono, D. (2015). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. Bandung: Alfabeta.
- Lofland and Lofland. 2013. *Metode Penelitian Kualitatif*. Bandung: Rosadakarya. Tangkilisan, H. N. S. (2003). *Implementasi Kebijakan Publik*. Lukman Offset.
- Wiliam, J. (2022). *Administrasi Publik (Teori dan Pergeseran Paradigma keera Digital)*. Zifatama Jawara.
- Winarno, B. (2014). *Kebijakan Publik: Teori, Proses, dan Studi Kasus*. Yogyakarta: CAPS.
- Eko Handoyo, 2012, *Kebijakan Publik*, Widya Karya, Semarang.

B. Sumber Jurnal, Skripsi, Tesis, Disertasi dan Dokumen Lainnya

- Ariska, A. (2023). *Skripsi implementasi bantuan pangan non tunai (bpnt) dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat di kel. duampanua, kec. baranti, kab. sidrap*.
- Mawuntu, P., Rares, J., & Plangiten, N. (2022). Efektivitas Kebijakan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (Ppkm) Skala Mikro Dalam Penyebaran Covid- 19 Di Desa Warembungan. *Jurnal Admninistrasi Publik (JAP) Universitas Sam Ratulangi (Unsrat)*,
- Nabila, K., Suharso, P., & Hartanto, W. (2021). *IMPLEMENTASI PROGRAM BANTUAN PANGAN NON TUNAI (BPNT) DI DESA*. 15(63), 303–309.
- Ngguti, M. I., Sulila, I., & Tantu, R. (2023). Implementasi Kebijakan Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) Dalam Menanggulangi Kemiskinan di Desa Sidomukti Kecamatan Mootilango Kabupaten Gorontalo. *Madani: Jurnal*

Ilmiah Multidisiplin, 1(10), 71-82, (2023-11-04).
<https://doi.org/10.5281/zenodo.10071781>

Sosial, J., & Pertanian, E. (2020). *Kebijakan Program Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT)*. 6628(3), 456–465.

C. Perundang-Undangan

Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2011 Tentang Penanganan Fakir Miskin

Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 Tentang Pangan

Peraturan Menteri Sosial Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2023 Tentang Pelaksanaan Program Sembako

D. Website

<https://infopublik.id/kategori/nusantara/383404/wabup-parigi-moutong-luncurkan-bpnt>

<https://anjirmuara.baritokualakab.go.id/bantuan-pangan-non-tunai-bpnt/> <https://info.populix.co/articles/informan-adalah/>

<https://www.gramedia.com/literasi/pengertian-penelitian-kualitatif/?srsltid=AfmBOooIOo6UYNNew0C38sQEBklJy1P-ri7CVEs4FvP6zbaiVWKrVSmq>

L

A

M

P

I

R

A

N

DAFTAR RIWAYAT HIDUP



Identitas Diri Mahasiswa

Nama : Nia Ramadhani
Stambuk : B 101 21 148
Tempat Tanggal Lahir : Moutong, 31 Maret 2003
Jenis Kelamin : Perempuan
Agama : Islam
Alamat : Desa Moutong Tengah
Email : niakarel416@gmail.com

Identitas Orang Tua

Nama Ayah : Iswan Karel
Pekerjaan : Wiraswasta
Alamat : Desa Moutong Tengah
Nama Ibu : Rostan Manoppo
Pekerjaan : IRT
Alamat : Desa Moutong Tengah

Riwayat Pendidikan

SD N 1 MOUTONG TAHUN 2015

SMP NEGERI 1 MOUTONG TAHUN 2018

SMA NEGERI 1 MOUTONG TAHUN 2021

TERDAFTAR DI UNIVERSITAS TADULAKO FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN
ILMU POLITIK PRODI ADMINISTRASI PUBLIK TAHUN 2021

DAFTAR PERTANYAAN

1. Komunikasi :

Bagaimana bentuk dan cara penyebarluasan informasi mengenai kebijakan Program Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) di Desa Moutong Tengah agar diketahui masyarakat.?

2. Sumber Daya :

Bagaimana kemampuan sumber daya manusia dalam mengimplementasikan kebijakan program Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) di Desa Moutong Tengah.?

3. Disposisi :

Bagaimana sikap pelaksana implementor dengan masyarakat dalam mengimplementasikan kebijakan program Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) di Desa Moutong Tengah.?

4. Struktur Birokrasi :

Apakah program Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) di Desa Moutong Tengah sudah berjalan sesuai prosedur yang berlaku.?

Daftar Informan

Nama : Moh.Ridwan Haka
 Umur : 54 Tahun
 Jenis Kelamin : Laki-laki
 Jabatan/Pekerjaan : Kepala Desa Moutong Tengah

Nama : Risal S.Pd
 Umur : 31 Tahun
 Jenis Kelamin : Laki-laki
 Jabatan/Pekerjaan : Sekretaris desa Moutong Tengah

Nama : Sulman
 Umur : 29 Tahun
 Jenis Kelamin : Laki-laki
 Jabatan/Pekerjaan : Operator Desa Moutong Tengah

Nama : Ibu Astin Dama
 Umur : 48 Tahun
 Jenis Kelamin : Perempuan
 Jabatan/Pekerjaan : Pijat Tradisional

Nama : Ibu Rustin Musa
 Umur : 42 Tahun
 Jenis Kelamin : Perempuan
 Jabatan/Pekerjaan : IRT

Transkip Wawancara dengan Informan

Hari/Tanggal : Rabu, 4 juni 2025
 Tempat : Rumah
 Waktu : 16:11 WITA
 Informan : Moh.Ridwan Haka

No	Pertanyaan	Narasumber	Indikator
1	Bagaimana bentuk dan cara penyebarluasan informasi mengenai kebijakan Program Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) di Desa Moutong Tengah agar diketahui masyarakat.?	Untuk Program Bantuan Pangan Non Tunai yang ada di Desa Moutong Tengah kami selaku pemerintah desa menggunakan cara penyampaian informasi secara lisan yang disampaikan langsung kepada kepala-kepala dusun di Desa Moutong Tengah, kemudian mereka yang melakukan pendataan masyarakat yang memiliki kualifikasi sebagai penerima Bantuan Pangan Non Tunai dengan cara mendatangi setiap rumah warga yang layak mendapatkan bantuan dengan kualifikasi yang ada.	Komunikasi
2	Bagaimana kemampuan sumber daya manusia dalam mengimplementasikan kebijakan program Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) di Desa Moutong Tengah.?	Kemampuan sumber daya yang ada di Desa Moutong Tengah sendiri cukup baik dengan adanya unit-unit elektronik untuk kepentingan sudah cukup memadai, kami juga mempunyai operator desa yang cukup memahami cara pengelolaan data para penerima bantuan. Dari sisi sumber daya untuk saat ini dan selanjutnya kami akan menambahkan jumlah pegawai dikantor Desa Moutong Tengah untuk operator desa agar pekerjaan bisa lebih efektif.	Sumber Daya
3	Bagaimana sikap pelaksana implementor dengan masyarakat dalam mengimplementasikan kebijakan program Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) di Desa Moutong Tengah.?	Kejujuran dan komitmen itu adalah sikap yang harus dipegang teguh untuk menjalankan kebijakan Bantuan Pangan Non Tunai ini. Dalam menjalankan tugas ini kami akan berusaha semaksimal mungkin untuk kepentingan rakyat yang membutuhkan. Dan kami mengharapkan program ini bisa dapat membantu masyarakat yang benar membutuhkan dan tepat sasaran.”	Disposisi
4	Apakah program Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) di Desa Moutong Tengah sudah berjalan sesuai prosedur yang berlaku.?	Kebijakan ini saya rasa sudah dijalankan sesuai standar operasional yang diberikan dari pemerintah Kabupaten/Kota. Namun semua data yang kami kirimkan untuk para masyarakat yang menerima bantuan itu belum semuanya merasakan manfaat dari program itu sendiri yang dikarenakan adanya seleksi lanjutan yang dilakukan oleh pemerintah di Kabupaten/Kota.	Struktur Birokrasi

Transkip Wawancara dengan Informan

Hari/Tanggal : Rabu, 11 juni 2025
 Tempat : Kantor Desa
 Waktu : 10:15 WITA
 Informan : Risal S.Pd

No	Pertanyaan	Narasumber	Indikator
1	Bagaimana bentuk dan cara penyebarluasan informasi mengenai kebijakan Program Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) di Desa Moutong Tengah agar diketahui masyarakat.?	Saya selaku sekdes yang memiliki peran untuk mengawal keberlangsungan penyaluran Bantuan Pangan Non Tunai di Desa Moutong Tengah secara langsung dengan tujuan untuk memastikan proses penyaluran berjalan dengan efektif dan tepat sasaran. Memang benar adanya kami selaku aparat desa tidak melakukan penyampaian secara langsung kepada masyarakat tetapi bapak kepala desa menggunakan cara penyampaian melalui kepala-kepala dusun untuk melakukan pendataan secara langsung kepada masyarakat.	Komunikasi
2	Bagaimana kemampuan sumber daya manusia dalam mengimplementasikan kebijakan program Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) di Desa Moutong Tengah.?	Kemampuan yang ada sekarang sudah cukup memadai, yang dimana ditunjang dengan fasilitas yang ada dikantor Desa Moutong Tengah untuk melakukan pekerjaan yang telah diberikan.	Sumber Daya
3	Bagaimana sikap pelaksana implementor dengan masyarakat dalam mengimplementasikan kebijakan program Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) di Desa Moutong Tengah.?	Dalam menjalankan program ini tentu bukan hal yang mudah. Tapi kami sebagai pemerintah Desa Moutong Tengah sudah berkomitmen dalam menjalankan tugas ini dan dengan jujur agar masyarakat merasa adil dan dapat marasakan kesejahteraan dari Bantuan Pangan Non Tunai ini.	Disposisi
4	Apakah program Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) di Desa Moutong Tengah sudah berjalan sesuai prosedur yang berlaku.?	Berjalannya program Bantuan Pangan Non Tunai ini sudah dalam standar oprasional prosedur yang ada, karena kami melakukan kordinasi dengan pemerintahan Kabupaten/Kota dalam menjalankan program ini. Namun tidak bisa dipungkiri dalam proses implementasi program ini ada banyak kendala masalah teknis yang kami alami dan semua data yang kami kirimkan untuk menerima bantuan program ini masih diseleksi oleh pemerintah Kabupaten/Kota. Jadi hasilnya masih ada masyarakat yang belum bisa dapat merasakan manfaat langsung dari program Bantuan Pangan Non Tunai itu sendiri.	Struktur Birokrasi

Transkip Wawancara dengan Informan

Hari/Tanggal : Rabu, 11 juni 2025
 Tempat : Kantor Desa
 Waktu : 11:10 WITA
 Informan : Sulman

No	Pertanyaan	Narasumber	Indikator
1	Bagaimana bentuk dan cara penyebarluasan informasi mengenai kebijakan Program Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) di Desa Moutong Tengah agar diketahui masyarakat.?	Saya sebagai operator desa tentu memiliki tanggung jawab untuk melakukan penyampaian terkait informasi mengenai Program Bantuan Pangan Non Tunai ini sekaligus mengirimkan data masyarakat yang menerima bantuan kepusat data yang ada dikecamatan. Mengenai penyampaian informasi kepada masyarakat memang benar kami tidak melakukan sosialisasi sebagaimana yang disampaikan oleh bapak kepala Desa Moutong Tengah tetapi kami melakukan musyawarah desa yang dihadiri langsung oleh kepala-kepala dusun di Desa Moutong Tengah	Komunikasi
2	Bagaimana kemampuan sumber daya manusia dalam mengimplementasikan kebijakan program Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) di Desa Moutong Tengah.?	Saya selaku operator desa sangatlah terbantu dalam menjalankan implementasi kebijakan yang ada dilakukan oleh Desa Moutong Tengah, karena fasilitas seperti alat elektronik, pengetikan, dan bangunan kantor desa membuat saya terbantu.”	Sumber Daya
3	Bagaimana sikap pelaksana implementor dengan masyarakat dalam mengimplementasikan kebijakan program Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) di Desa Moutong Tengah.?	Program Bantuan Pangan Non Tunai ini dilakukan dengan cara terbuka dan trasparan. Sebagai operator Desa Moutong Tengah yang bertugas dalam mengurusi hal ini setiap data yang dimasukan oleh kepala dusun masing-masing sudah saya cek kembali dan mencocokannya dengan data masyarakat kurang mampu yang ada di Desa Moutong Tengah. Saya pribadi sudah melakukan tugas saya dengan jujur dan penuh komitmen untuk melayani masyarakat yang ada di Desa Moutong Tengah.	Disposisi
4	Apakah program Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) di Desa Moutong Tengah sudah berjalan sesuai prosedur yang berlaku.?	Program ini kami sudah jalankan sesuai dengan aran yang diberikan oleh pemerintah Kabupaten/Kota. Namun ada kendala yang sering kami alami karena banyaknya data yang dikembalikan kepada kami. Itu menyebabkan adanya masyarakat yang sudah kami data tetapi belum mendapatkan program bantuan ini.	Struktur Birokrasi

Transkip Wawancara dengan Informan

Hari/Tanggal : Sabtu, 14 juni 2025
 Tempat : Rumah Tinggal
 Waktu : 16:10 WITA
 Informan : Astin Dama

No	Pertanyaan	Narasumber	Indikator
1	Bagaimana bentuk dan cara penyebarluasan informasi mengenai kebijakan Program Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) di Desa Moutong Tengah agar diketahui masyarakat.?	Sebelum saya mendapatkan Bantuan Pangan Non Tunai ini saya belum sama sekali memahami atau tidak tahu tentang apa itu Bantuan Pangan Non Tunai, karena saya hanya didatangi langsung oleh kepala dusun yang memberikan informasi bahwa adanya Program Bantuan Pangan Non Tunai untuk masyarakat yang kurang mampu. Kemudian kepala dusun mendata saya sebagai calon penerima Bantuan Pangan Non Tunai, yang dimana program bantuan ini sangatlah bermanfaat bagi kami untuk dipergunakan.	Komunikasi
2	Bagaimana kemampuan sumber daya manusia dalam mengimplementasikan kebijakan program Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) di Desa Moutong Tengah.?	Menurut pendapat saya sumber daya yang dimiliki sudah cukup baik dan didukung dengan fasilitas yang moderen dan lengkap. Dengan kemampuan dan sarana yang ada seharusnya pekerjaan dapat dengan mudah dikerjakan.	Sumber Daya
3	Bagaimana sikap pelaksana implementor dengan masyarakat dalam mengimplementasikan kebijakan program Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) di Desa Moutong Tengah.?	Dalam hal ini saya sebagai masyarakat melihat bahwa pemerintah desa sudah menjalankan tugasnya dengan cukup baik, walaupun masih ada beberapa prosesnya belum maksimal seperti memberikan sosialisasi akan adanya hal seperti Bantuan Pangan Non tunai ini. Tujuannya adalah untuk memberikan masyarakat informasi dan bisa melihat pemerintahan yang ada di Desa Moutong Tengah itu sendiri memberikan informasi secara terbuka untuk masyarakatnya. Namun bagi saya selaku penerima bantuan ini juga berterimakasih terhadap pemerintah desa yang sudah memberikan saya bantuan ini untuk meringankan beban dan biaya yang saya rasakan.	Disposisi
4	Apakah program Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) di Desa Moutong Tengah sudah berjalan sesuai prosedur yang berlaku.?	saya menilai bahwa pemerintah Desa Muotong Tengah belum bisa menjalankan program Bantuan Pangan Non Tunai ini secara maksimal, hal ini terkait masyarakat yang belum bisa merasakan manfaat dari program bantuan yang diberikan oleh pemerintah pusat.	Struktur Birokrasi

Transkip Wawancara dengan Informan

Hari/Tanggal : Senin, 16 juni 2025
 Tempat : Rumah Tinggal
 Waktu : 10:13 WITA
 Informan : Rustin Musa

No	Pertanyaan	Narasumber	Indikator
1	Bagaimana bentuk dan cara penyebarluasan informasi mengenai kebijakan Program Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) di Desa Moutong Tengah agar diketahui masyarakat.?	Saya belum mendapat informasi tentang Program Bantuan Pangan Non Tunai ini karena tidak adanya sosialisasi atau pengumuman dari pihak aparat desa. Tetapi setelah saya didatangi oleh kepala dusun barulah saya mengetahui adanya Program Bantuan Pangan Non Tunai ini sekaligus kepala dusun melakukan pendataan terhadap diri saya untuk diajukan sebagai calon penerima Bantuan Pangan Non Tunai yang ia sampaikan kepada saya.	Komunikasi
2	Bagaimana kemampuan sumber daya manusia dalam mengimplementasikan kebijakan program Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) di Desa Moutong Tengah.?	Menurut saya sumber daya yang dimiliki belum cukup, karena masih banyak yang kurang di Desa Moutong tengah baik dalam aparat desa, karena program Bantuan Pangan Non Tunai ini belum memiliki ketua penyalur bantuan karena masih masuk dalam bagian ketua penyalur PKH yang mengurus masalah program Bantuan Pangan Non Tunai.	Sumber Daya
3	Bagaimana sikap pelaksana implementor dengan masyarakat dalam mengimplementasikan kebijakan program Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) di Desa Moutong Tengah.?	Bagi saya pemerintah desa belum menjalankan tugasnya dan sesuai arahan dari pemerintah pusat. Memang benar adanya bahwa dalam hal penyampaian informasi dari pemerintah desa masih kurang baik karena tidak melakukan sosialisasi atau pengumuman secara langsung. Karena pada saat penerimaan bantuan saya tidak mendapat respon yang cepat dari aparat desa	Disposisi
4	Apakah program Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) di Desa Moutong Tengah sudah berjalan sesuai prosedur yang berlaku.?	Menurut saya proses implementasi program bantuan ini belum maksimal bukan karena kenerja aparat Desa Moutong Tengah tetapi lebih ke pemerintah pusat yang dimana masih melakukan seleksi data masyarakat yang diajukan oleh aparat Desa Moutong Tengah yang menyebabkan masih banyaknya masyarakat dan tetangga saya yang seperti saya belum bisa merasakan manfaat dari Program bantuan ini.	Struktur Birokrasi

DOKUMENTASI PENELITIAN



Kantor Desa Moutong Tengah



Wawancara dengan Bapak Moh. Ridwan Haka selaku Kepala Desa Moutong Tengah
(Wawancara Pada Tanggal 04 Juni 2025)



**Wawancara dengan Bapak Risal S.Pd Selaku Sekretaris Desa Moutong Tengah
(Wawancara Pada Tanggal 11 Juni 2025)**



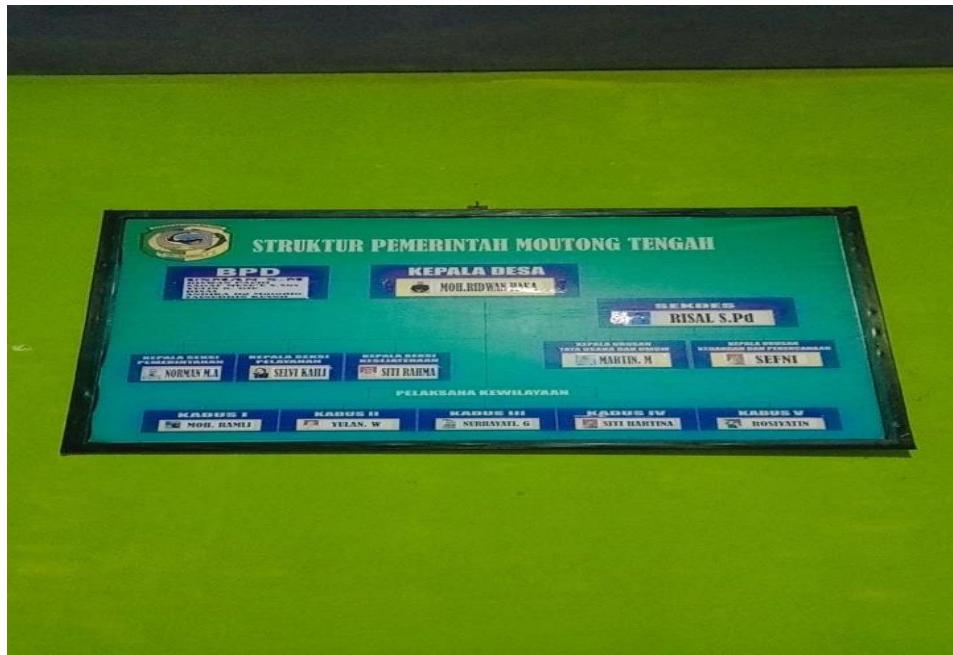
**Wawancara dengan Bapak Sulman Selaku Operator Desa Moutong Tengah
(Wawancara Pada Tanggal 11 Juni 2025)**



**Wawancara dengan Ibu Selaku Keluarga Penerima Manfaat BPNT Desa Moutong Tengah
(Wawancara Pada Tanggal 14 Juni 2025)**



**Wawancara Dengan Ibu Selaku Keluarga Penerima Manfaat BPNT Desa Moutong Tengah
(Wawancara Pada Tanggal 16 Juni 2025)**



Struktur Organisasi Pemerintah Desa Moutong Tengah

SULMAN
Pengisi Data Desa

DTSEN

Klarifikasi Bansos

Unduh

Perbaikan Data

PBI JK

Usulan Bansos

Usulan Pembaruan DTSEN

Selamat Datang,
SULMAN
7208040605960001

version 9.0.3

Sistem Aplikasi data dari KEMENSOS

A. Surat Pra Observasi Penelitian



**KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN,
RISET DAN TEKNOLOGI
UNIVERSITAS TADULAKO
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK**
 Jl. SoekarnoHatta, Kilometr. 9 Tondo, Mantikore, Palu 94119
 Surel: untadfisip18@gmail.com Laman : <https://fisip.untad.ac.id>

Nomor : 2549 /UN28.3/DT.00.00/2024
 Lampiran :
 Perihal : **Pra Observasi**

Palu, 8 November 2024

Kepada Yth.
Kepala Desa Moutong Tengah

di-
 Tempat

Dengan Hormat,

Dengan ini kami sampaikan kepada Bapak/Ibu, Kiranya mahasiswa yang tersebut di bawah ini :

Nama	: Nia Ramadhani
Stambuk	: B 101 21 148
Fakultas	: Ilmu Sosial dan Ilmu Politik
Jurusan/Prodi	: Ilmu Administrasi/Ilmu Administrasi Publik
Judul Proposal	: Implementasi Program Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) di Desa Moutong Tengah Kecamatan Moutong Kabupaten Parigi Moutong

Kiranya dapat diberikan data dan informasi yang dibutuhkan dari kantor/Instansi Yang Bapak/Ibu Pimpin sesuai dengan data yang dibutuhkan oleh mahasiswa yang bersangkutan.

Demikian surat ini, atas bantuan dan kerjasamanya kami ucapan terima kasih.

a.n. Dekan
 Wakil Dekan Bidang Akademik,

Dr. Nuraisyah, M.Si.
NIP. 196303181989032001

Tembusan Yth :
 1.Dekan Fisip Univ. Tadulako (Sebagai Laporan);
 2.Ketua Jurusan Ilmu Administrasi FISIP Univ. Tadulako;
 3.Koordinator Prodi Ilmu Administrasi Publik FISIP Univ. Tadulako;
 4.Arsip.



SERTIFIKAT SNI ISO 9001:2015-CERTIFICATE NO. 1687

B. Surat Izin Penelitian



KEMENTERIAN PENDIDIKAN TINGGI SAINS DAN TEKNOLOGI
UNIVERSITAS TADULAKO

FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK

Kampus Bumi Tadulako Tondo Palu - Sulawesi Tengah 94111
Jl. Soekarno-Hatta Km. 9 Telp. (0451) 422611-422355 Fax. (0451) 422844,
Email : Untadfisip18@gmail.com

Nomor : 1897/UN28.1.31/KP/2025
Lampiran : -
Perihal : Izin Penelitian

Palu, 27 Mei 2025

Kepada Yth.
Kepala Desa Moutong Tengah
Kecamatan Moutong
Kabupaten Parigi Moutong
di-

Tempat

Dengan Hormat,

Dengan ini kami sampaikan kepada Bapak/Ibu , Kiranya mahasiswa yang tersebut di bawah ini :

Nama : **Nia Ramadhani**
Stambuk : B10121148
Fakultas : Ilmu Sosial dan Ilmu Politik
Jurusan/Prodi : Ilmu Administrasi /Administrasi Publik
Judul Proposal : Implementasi Program Bantuan Pangan Non Tunai di Desa Moutong
Tengah Kecamatan Moutong Kabupaten Parigi Moutong

Kiranya dapat diberikan data dan informasi yang dibutuhkan dari Kantor/Instansi Yang Bapak/
Ibu Pimpin sesuai dengan data yang dibutuhkan oleh mahasiswa yang bersangkutan.

Demikian surat ini, atas bantuan dan kerjasamanya kami ucapan terima kasih.



Tembusan Yth:
1.Dekan Fisip Univ. Tadulako (Sebagai Laporan);
2.Ketua Jurusan Ilmu Administrasi Fisip Univ. Tadulako;
3.Koordinator Prodi Ilmu Administrasi /Administrasi Publik Fisip Univ. Tadulako;
4.Arsip.

C. Surat Balasan Selesai Penelitian



**PEMERINTAH KABUPATEN PARIGI MOUTONG
KECAMATAN MOUTONG
DESA MOUTONG TENGAH**

Alamat : Jln. Trans Sulawesi No. 001 Moutong Tengah Kode Pos 94379

SURAT KETERANGAN

Nomor : 400.10.2.2/ 279 /UMUM

Yang Bertanda Tangan di bawah Ini:

Nama	: MOH. RIDWAN HAKA
Jabatan	: KEPALA DESA MOUTONG TENGAH

Menerangkan Dengan Sesungguhnya Kepada:

Nama	: NIA RAMADHANI
Jenis Kelamin	: Perempuan
Stambuk	: B10121148

Sesuai dengan surat dari UNIVERSITAS TADULAKO FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK Nomor :1897/UN 28.1.31/KP/2025 Benar Bawa Mahasiswa Tersebut di atas telah melaksanakan pengambilan Data mulai Dari 4 Juni s/d 18 Juni 2025 Di Desa Moutong Tengah Kecamatan Moutong Kabupaten Parigi Moutong dan telah di berikan data sesuai yang di butuhkan

Demikian Surat Keterangan ini dibuat dengan benar untuk digunakan sebagaimana perlunya.

Dikeluarkan Di : Moutong Tengah
Pada Tanggal : 18 juni 2025

KEPALA DESA MOUTONG TENGAH



MOH. RIDWAN HAKA